

Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

NOVEMBER 2024





LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

November 2024

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau

November 2024

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kepulauan Riau dipublikasikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau. Penerbitan laporan ini bertujuan sebagai: 1) Laporan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia mengenai kondisi perkembangan ekonomi dan keuangan di Provinsi Kepulauan Riau, dan 2) Informasi kepada stakeholders di daerah mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan terkini.

1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah,
2. Perkembangan Keuangan Daerah,
3. Perkembangan Inflasi,
4. Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM,
5. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah,
6. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan, serta
7. Prospek Perekonomian Daerah.

Tim Penulis

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
Jalan Engku Putri No. 1, Kota Batam – Indonesia

Kata Pengantar

Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau periode November 2024 dapat diselesaikan. Dalam laporan ini juga dikemukakan hal-hal lain terkait dengan tugas Bank Indonesia antara lain asesmen perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau secara umum serta prospeknya. Bank Indonesia menyadari bahwa peran perekonomian regional menjadi semakin penting dalam konteks pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi otonomi daerah serta potensi ekonomi regional yang besar telah terbukti ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau secara rutin melakukan asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Asesmen perekonomian mencakup perkembangan ekonomi makro regional, inflasi, perbankan dan sistem pembayaran. Asesmen perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dilakukan setiap triwulan dan laporan dimaksud dikenal dengan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Penyusunan Laporan Perekonomian dimaksud sebagai upaya memenuhi kebutuhan *stakeholder* eksternal serta bagi Kantor Pusat Bank Indonesia.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau dan Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Keuangan atas kerja sama dalam mendukung penyediaan data. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Perekonomian ini, harapan kami hubungan yang baik ini dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Kami menyadari isi dari laporan yang kami susun ini masih mempunyai banyak kekurangan, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kualitas Laporan Perekonomian ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah senantiasa melimpahkan ridho-Nya dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam meningkatkan kinerja kita semua.

Batam, November 2024
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau

TTD

Suryono
Direktur

Daftar Isi

Tim Perumusan KEKDA Provinsi	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Daftar Grafik	VIII
Ringkasan Eksekutif	X
Lampiran	63



Bab I	
Perkembangan Makro Ekonomi Daerah	1
1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN	3
1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga	4
1.1.2 Konsumsi Pemerintah	4
1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB	5
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Impor	6
1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	7
1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan	8
1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi	8
1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	8
1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	9
BOKS 1	11
Laporan <i>Liaison</i> Triwulan III 2024	
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau	

Bab II	
Perkembangan Keuangan Daerah	13
2.1 REALISASI PENDAPATAN	15
2.2 REALISASI BELANJA	16
2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI	17

Bab III	
Perkembangan Inflasi	21
3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA	23
3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA	24
3.2.1 Inflasi Kota Batam	24
3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang	24
3.2.3 Inflasi Kabupaten Karimun	25
3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI	25
3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI	25

Bab IV	
Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	27
4.1 PERKEMBANGAN KONDISI PERBANKAN PROVINSI KEPRI	29
4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan	29
4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan	30
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan	30
4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan	32
4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM	32
4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi	32
4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga	33
4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	34

BOKS 2	37
Gebyar Melayu Pesisir 2024: Digitalisasi Untuk Transformasi Ekonomi Kepri Bagi Kemajuan Negeri	



Bab V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1	TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI	39
5.1.1	Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (<i>Inflow/Outflow</i>)	41
5.1.2	Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	41
5.1.3	Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)	42
5.2	TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI	42
5.2.1	Transaksi Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS)	42
5.2.2	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	42
5.2.3	Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)	43
5.2.4	Perkembangan QRIS	43
5.2.5	Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai	44
5.2.6	Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	45
5.2.7	Bantuan Sosial Nontunai	45
5.3	TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR	46
5.3.1	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	46
5.3.2	Perkembangan Transaksi PJP LR	46
5.3.3	Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau	47

BOKS 3

Digital Competition CBP Rupiah 2024: Wadah Kreativitas Generasi Muda Menuju Transformasi Digital

Bab VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan 51

6.1	KETENAGAKERJAAN	53
6.1.1	KETENAGAKERJAAN	53
6.2	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	54
6.2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	54
6.2.2	Kemiskinan	55
6.2.3	<i>Gini Ratio</i> (GR)	55
6.2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	56

Bab VII

Prospek Perekonomian Daerah 57

7.1	PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI	59
7.2	PROSPEK INFLASI	60
7.3	REKOMENDASI	61

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)	4
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha	7
Tabel B1.1	<i>Likert Scale</i> Tahun 2023 s.d Triwulan II 2024 di Kepri	11
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2024	15
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2024 (dalam miliar Rupiah)	16
Tabel 2.3	Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri	18
Tabel 2.4	Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri	19
Tabel 3.1	Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kab. Karimun (% yoy)	23
Tabel 3.2	Penyumbang Inflasi Provinsi Kepri September 2024	23
Tabel 3.3	Penyumbang Deflasi Provinsi Kepri September 2024	23
Tabel 3.4	Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% , yoy)	24
Tabel 3.5	Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)	25
Tabel 4.1	Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri	29
Tabel 4.2	Penyaluran Kredit (Spasial)	32
Tabel 4.3	Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga	34
Tabel 5.1	Penyaluran PKH Tahap 4 tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kepri	45
Tabel 5.2	Perbandingan Jumlah Pengaduan	47
Tabel 6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri	53
Tabel 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel 6.3	Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri	53
Tabel 6.4	Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)	54
Tabel 6.5	Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri	54
Tabel 6.6	Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri	55
Tabel 6.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen	56
Tabel 6.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota	56
Tabel 7.1	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2024	60
Tabel 7.2	Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2025	60
Tabel 7.3	Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2024	61
Tabel 7.4	Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2025	61

Daftar Gambar

Gambar B2.1	Kepala Perwakilan BI Prov. Kepri dan Sekda Prov. Kepri dalam Opening Ceremony GMP 2024	37
Gambar B2.2	Menteri Koperasi dan UKM dan Deputi Gubernur Bank Indonesia turut hadir secara virtual dalam Opening Ceremony GMP 2024	37
Gambar B2.3	<i>Welcoming Speech</i> oleh Menparekraf Sandiaga Uno dalam Seminar Sistem Pembayaran	38
Gambar B2.4	Kunjungan pameran UMKM oleh <i>influencer</i> Teuku Wisnu	38
Gambar B2.5	<i>Funbike</i> Kemerdekaan sebagai rangkaian GMP 2024	38
Gambar B2.6	Peluncuran Kurikulum “Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah” oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam	38
Gambar B3.1	<i>Design Twibbon, flyer, backdrop</i> dan <i>feed</i> program <i>Digital Competition</i> CBP Rupiah	50
Gambar B3.2	Roadshow Program <i>Digital Competition</i> CBP Rupiah	50
Gambar B3.3	<i>Workshop</i> dan <i>Bootcamp</i> program <i>Digital Competition</i> CBP Rupiah	50

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)	3
Grafik 1.2	Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)	3
Grafik 1.3	Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran	4
Grafik 1.4	Impor Barang Konsumsi	4
Grafik 1.5	Survei Konsumen	4
Grafik 1.6	Realisasi Belanja APBD	5
Grafik 1.7	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Wilayah Kepri	5
Grafik 1.8	Simpanan Pemerintah Daerah pada Perbankan	5
Grafik 1.9	Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	5
Grafik 1.10	Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)	5
Grafik 1.11	SBT Investasi	5
Grafik 1.12	Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri	6
Grafik 1.13	Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas	6
Grafik 1.14	Perkembangan Ekspor Produk Elektronik dan Produk Mesin	6
Grafik 1.15	<i>Index of Industrial Production (IIP)</i> Singapura untuk Peralatan Elektronik	6
Grafik 1.16	Perkembangan Impor	6
Grafik 1.17	Perkembangan Impor Nonmigas - BEC	7
Grafik 1.18	Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)	7
Grafik 1.19	Konsumsi Listrik Industri	8
Grafik 1.20	SBT Industri Pengolahan	8
Grafik 1.21	SBT Konstruksi	8
Grafik 1.22	Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen	8
Grafik 1.23	Kunjungan Wisman	8
Grafik 1.24	Kredit Multiguna	9
Grafik 1.25	Perkembangan Ekspor Migas	9
Grafik B1.1	LS Penjualan Domestik dan Pertumbuhan IKK & IEK Survei Konsumen	12
Grafik B1.2	Kapasitas Utilisasi dan LS Penjualan Domestik	12
Grafik 2.1	Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan III 2024	15
Grafik 2.2	Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan III 2024	15
Grafik 2.3	Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	16
Grafik 2.4	Komposisi Realisasi Belanja Triwulan III 2024	17
Grafik 2.5	Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan III 2024	17
Grafik 2.6	Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri	17
Grafik 3.1	Inflasi Triwulan III 2024 Regional Sumatera (% yoy)	23
Grafik 3.2	Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan III 2024 (% yoy)	23
Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, dan Karimun (% yoy)	24
Grafik 4.1	Perkembangan Aset Perbankan	30
Grafik 4.2	Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank	30
Grafik 4.3	Perkembangan DPK Perbankan	30
Grafik 4.4	DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	30
Grafik 4.5	Perkembangan Kredit Perbankan	30
Grafik 4.6	Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	31
Grafik 4.7	Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan	31
Grafik 4.8	Perkembangan Suku Bunga Kredit	31
Grafik 4.9	Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian	31
Grafik 4.10	Kredit Sektor Industri Pengolahan	31
Grafik 4.11	Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri	32
Grafik 4.12	Perkembangan Kredit Korporasi	32
Grafik 4.13	Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)	33
Grafik 4.14	Survei Ekspektasi Konsumen	33
Grafik 4.15	Survei Indeks Penghasilan Konsumen	33
Grafik 4.16	Kredit Rumah Tangga	33
Grafik 4.17	Kredit Konsumsi	33
Grafik 4.18	DPK Perseorangan	34
Grafik 4.19	Pangsa DPK Perseorangan	34
Grafik 4.20	Perkembangan Kredit UMKM	35

Daftar Grafik

Grafik 5.1	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> Kepri	41
Grafik 5.2	Perkembangan Pertumbuhan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i>	41
Grafik 5.3	Perkembangan Pemusnahan UTLE	42
Grafik 5.4	Perkembangan Temuan Uang Palsu	42
Grafik 5.5	Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri	42
Grafik 5.6	Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri	43
Grafik 5.7	Perkembangan Transaksi Kartu Debit	43
Grafik 5.8	Perkembangan Transaksi Kartu Kredit	43
Grafik 5.9	Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri	43
Grafik 5.10	Perkembangan QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri Triwulan III 2024	44
Grafik 5.11	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS berdasarkan Kelompok Usaha	44
Grafik 5.12	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri	44
Grafik 5.13	Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri	44
Grafik 5.14	Perkembangan Transaksi KUPVA	46
Grafik 5.15	Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah	46
Grafik 5.16	Perkembangan Transaksi Pada PJP LR	47
Grafik 6.1	Perkembangan NTP	54
Grafik 6.2	NTP Berdasarkan Subsektor	54
Grafik 6.3	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Provinsi Kepri	55
Grafik 6.4	<i>Gini Ratio</i> Provinsi di Wilayah Sumatera	55
Grafik 6.5	Perkembangan IPM Provinsi Kepri	56
Grafik 7.1	Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% yoy)	59
Grafik 7.2	Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% yoy)	59
Grafik 7.3	<i>Likert Scale</i> Perkiraan Penjualan Ekspor	59
Grafik 7.4	<i>Likert Scale</i> Perkiraan Investasi	60

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Kepri pada triwulan III 2024 tumbuh 5,02% (yoy), lebih baik triwulan sebelumnya yakni 4,90% (yoy)

Ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 5,02% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,90% (yoy), serta tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,48% (yoy). Secara kumulatif, perekonomian Kepri hingga triwulan III 2024 tercatat tumbuh 4,98% (ctc), atau merupakan yang tertinggi ketiga se-Sumatera.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh komponen Net Ekspor dan Konsumsi Pemerintah yang tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya

Pertumbuhan yang lebih tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan positif pada komponen Net Ekspor dan konsumsi pemerintah. Konsumsi RT dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pertumbuhannya melandai jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, namun tetap tumbuh positif.

Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan, di tengah moderasi pada LU Pertambangan dan Penggalan.

Pertumbuhan LU Industri Pengolahan didorong oleh peningkatan produksi industri elektronik sejalan dengan masih kuatnya permintaan khususnya dari Amerika Serikat (AS). LU Konstruksi juga masih tumbuh seiring dengan terus berlanjutnya pengerjaan sejumlah proyek prioritas. Lebih lanjut, pertumbuhan LU Perdagangan didukung oleh peningkatan aktivitas pariwisata serta belanja masyarakat pada momen tahun ajaran baru. Sementara itu, pertumbuhan tertahan oleh kinerja LU Pertambangan dan Penggalan yang masih mengalami kontraksi sejalan dengan berlanjutnya dampak konflik geopolitik global serta kurang optimalnya operasional produksi akibat kondisi sumur minyak yang sudah tua.

Realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai triwulan III 2024 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu.

Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepri hingga triwulan III 2024 terhadap pagu anggaran tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yang disebabkan oleh peningkatan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah juga mengalami peningkatan terutama pada pos Belanja Operasi dan Belanja Transfer.

Ringkasan Eksekutif

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,53 % (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,54% (yoy). Tekanan inflasi yang menurun disebabkan oleh berasal dari penurunan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Pendidikan, Kelompok Transportasi, dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki. Dengan demikian, inflasi pada triwulan III 2024 berada pada sekitar titik tengah target inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

Intermediasi perbankan pada triwulan III 2024 tetap terjaga meskipun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Deselerasi tersebut tercermin dari penurunan laju penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK), namun tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit yang tercermin dari risiko kredit pada segmen korporasi dan segmen kredit sektor rumah tangga, sementara risiko kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meningkat. Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tetap baik, tercermin dari rasio LDR pada triwulan III 2024 menurun dari 58,94% menjadi 51,59%. Akselerasi penyaluran kredit turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio NPL gross yang tercatat sedikit meningkat menjadi sebesar 3,29%.

Aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri mengalami penurunan pada triwulan III 2024. Hal tersebut tercermin dari *net outflow* yang mengalami penurunan pada triwulan III 2024. Namun di sisi lain, aktivitas pembayaran nontunai secara tahunan meningkat. Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS, RTGS, dan SKNIBI yang didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.

Tekanan Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 menurun disebabkan oleh penurunan harga pada komoditas pangan, pendidikan dan transportasi.

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) di Kepri pada triwulan III 2024 masih terjaga meskipun menghadapi perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit dan DPK.

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepri mengalami penurunan pada triwulan III 2024. Namun, transaksi non tunai tercatat mengalami akselerasi.

Ringkasan Eksekutif

Tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami perbaikan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepri menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Namun, kesejahteraan petani mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan seiring terjadinya kenaikan indeks yang diterima petani.

Perekonomian global pada 2024 dan 2025, diperkirakan tetap stabil. Sejalan dengan pertumbuhan global, Indonesia masih tetap tumbuh kuat diperkirakan tetap tumbuh meskipun berpotensi tertahan sejalan dengan baseline realisasi yang tinggi pada tahun sebelumnya.

Perekonomian global diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% (yoy) pada 2024 atau melambat dibandingkan tahun 2023, kemudian diproyeksikan stabil pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 masih on track terhadap estimasi sebelumnya, di tengah revisi ke atas pada ekonomi Amerika Serikat (AS) yang disertai dengan revisi ke bawah bagi sejumlah negara maju lainnya. Sejalan dengan ekonomi global, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh kuat dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang masih kuat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri secara keseluruhan tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh meskipun berpotensi tertahan sejalan dengan *baseline* realisasi yang tinggi pada tahun sebelumnya.

Tekanan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 tetap terjaga yang didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan sinergi TPID dan GNPIP.

Tekanan inflasi domestik termasuk Provinsi Kepri pada tahun 2024 dan 2025 diperkirakan dapat dijaga dalam rentang sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Hal tersebut didukung oleh perbaikan rantai pasokan, normalisasi harga pangan dan energi global, serta upaya pengendalian inflasi di daerah yang terus diperkuat melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) khususnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



BAB I

Perkembangan Makro Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi



5,02%

Tw III 2024

4,90%

Tw II 2024

Konsumsi RT



5,10%

Tw III 2024

5,19%

Tw II 2024

Investasi



3,47%

Tw III 2024

8,56%

Tw II 2024

Net Ekspor



15,82%

Tw III 2024

-20,72%

Tw II 2024

Konsumsi Pemerintah



6,80%

Tw III 2024

4,28%

Tw II 2024

Industri Pengolahan



8,13%

Tw III 2024

13,35%

Tw II 2024

Perdagangan



4,82%

Tw III 2024

2,22%

Tw II 2024

Pertambangan



-5,01%

Tw III 2024

-25,84%

Tw II 2024

Konstruksi



2,99%

Tw III 2024

7,61%

Tw II 2024

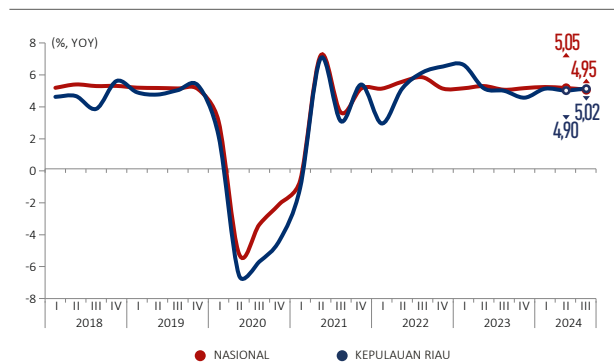
Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2024 tumbuh positif sebesar 5,02% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,90% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,48% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2024 terutama ditopang oleh pertumbuhan Net Ekspor, Konsumsi Rumah Tangga, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Di sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi didukung oleh pertumbuhan LU Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan, di tengah moderasi pada LU Pertambangan dan Penggalian.



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp51.840,28 miliar atau tumbuh 5,02% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,90% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU yakni Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan. Namun, pertumbuhan lebih tinggi tertahan oleh kinerja LU Pertambangan dan Penggalan yang mengalami kontraksi. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tetap tinggi terutama didorong oleh tumbuhnya komponen Net Ekspor, Konsumsi Rumah Tangga, dan PMTB.

Secara spasial di wilayah Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan III 2024 lebih tinggi dari wilayah Sumatera yang tercatat sebesar 4,48% (yoy) maupun capaian Nasional yang tumbuh sebesar 4,95% (yoy). Pertumbuhan tertinggi di wilayah Sumatera dicapai oleh Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, dan Kepri masing-masing sebesar 5,20% (yoy), 5,17% (yoy), 5,04% (yoy), dan 5,02% (yoy). Adapun pangsa/distribusi PDRB Provinsi Kepri triwulan III 2024 terhadap wilayah Sumatera tercatat sebesar 7,00% dan merupakan terbesar ke-5 setelah Sumatera Utara (23,54%), Riau (22,94%), Sumatera Selatan (13,82%) dan Lampung (10,11%).



Sumber : BPS (data diolah)

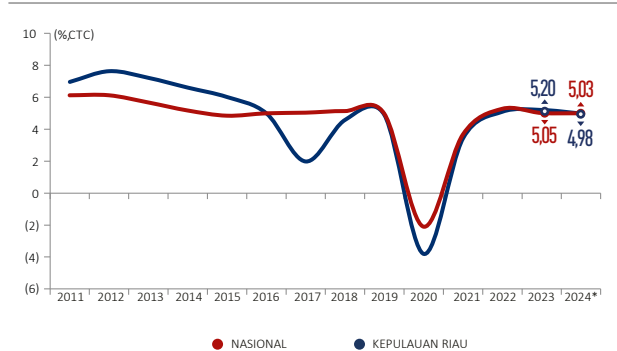
Grafik 1.1 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Triwulanan)

Tabel 1.1 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera

No	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2024 (% yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024 (% yoy)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2024 (% qoq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024 (% qoq)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2024 (% ctc)	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024 (% ctc)	Kontribusi terhadap Pulau Sumatera (%)
1	Aceh	4,54	5,17	2,79	2,06	4,68	4,85	4,91
2	Sumatera Utara	4,95	5,20	2,94	2,25	4,91	5,01	23,54
3	Sumatera Barat	4,71	4,33	2,12	0,46	4,55	4,48	6,72
4	Riau	3,70	3,46	1,54	3,17	3,56	3,53	22,94
5	Jambi	4,15	4,01	5,16	2,36	4,00	4,00	6,69
6	Sumatera Selatan	4,96	5,04	4,47	2,47	5,01	5,02	13,82
7	Bengkulu	4,70	4,57	6,79	-2,56	4,67	4,64	2,08
8	Lampung	4,80	4,81	9,71	0,75	4,08	4,33	10,11
9	Kep. Bangka Belitung	1,03	0,13	6,07	-0,86	1,02	0,71	2,18
10	Kepulauan Riau	4,90	5,02	0,62	0,53	4,96	4,98	7,00
SUMATERA		4,48	4,48	3,58	1,88	4,36	4,40	100,00

▲ Menguat dibandingkan triwulan sebelumnya
▼ Melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

Sumber: BPS (data diolah)

Sumber : BPS (data diolah)
data kumulatif s.d Triwulan III 2024

Grafik 1.2 Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional (Tahunan)

1.1 PERTUMBUHAN EKONOMI SISI PENGELUARAN

Distribusi perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 didominasi oleh PMTB/investasi dengan pangsa sebesar 45,11%, diikuti Konsumsi Rumah Tangga sebesar 42,55% dari total PDRB.

Pangsa komponen investasi yang cukup tinggi dipengaruhi oleh upaya pelaku usaha pada sektor industri dalam meningkatkan kapasitas produksi dengan menambah barang modal maupun investasi aset bangunan untuk ekspansi usaha. Selain itu, belanja modal pemerintah juga cukup besar terutama untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga memiliki pangsa tertinggi kedua dan mengalami pertumbuhan yang masih tinggi sejalan dengan momen libur tahun ajaran baru serta sejumlah cuti bersama.

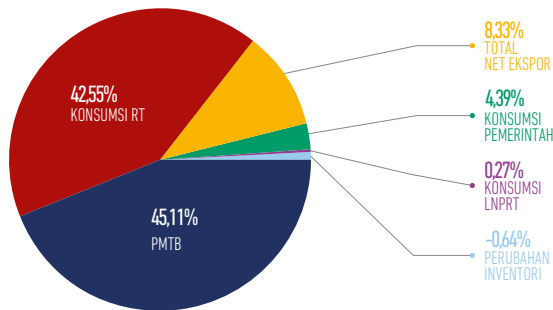
Sementara itu, komponen net ekspor memiliki pangsa terbesar ketiga sebesar 8,33%, sejalan dengan peningkatan jumlah ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Selanjutnya, komponen konsumsi pemerintah memiliki pangsa terbesar keempat yaitu sebesar 4,39% didorong pengeluaran pemerintah dalam rangka pemilu dan pilkada.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Pengeluaran (%yoy)

PDRB Sisi Pengeluaran	2021					2022					2023					2024			ARAH TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	
1. Konsumsi RT	-0,98	4,10	-1,05	0,19	0,54	1,15	3,66	7,44	6,43	4,65	5,52	3,46	2,77	4,98	4,17	4,83	5,19	5,10	▼
2. Konsumsi LNPRT	1,87	5,90	4,73	0,31	3,14	3,09	4,20	5,93	-2,11	2,75	0,65	5,77	5,85	15,82	6,77	17,76	7,02	10,20	▲
3. Konsumsi Pemerintah	-4,91	10,20	-9,28	0,75	-0,60	-1,53	-1,77	-1,29	0,67	-0,67	5,29	10,35	1,18	8,58	6,84	8,09	4,28	6,80	▲
4. PMTB (Investasi)	0,09	6,98	4,32	1,81	3,22	1,18	1,89	4,96	7,46	3,89	7,71	7,81	10,12	9,16	9,12	8,36	8,56	3,47	▼
5. Perubahan Inventori	-323,44	-198,31	1,14	-68,81	285,74	-47,94	-39,53	35,05	-1.316,70	430,88	269,72	607,31	-52,23	54,70	5,62	-195,95	-225,69	-308,33	▼
6. Total Net Ekspor	-7,91	20,04	16,97	30,82	13,30	13,64	18,59	6,33	-5,04	7,83	2,91	7,56	-0,36	-17,85	-2,57	6,11	-20,72	15,82	▲
a. Total Ekspor	0,67	12,85	10,19	10,94	8,56	9,90	12,88	13,34	3,45	9,80	3,15	-6,14	-1,96	-3,20	-1,35	-2,64	2,75	0,16	▼
b. Total Impor	1,72	12,19	9,60	9,05	8,09	9,48	12,32	13,99	4,41	10,01	3,17	-7,57	-2,10	-1,78	-1,23	-3,65	5,60	-1,22	▼
PERTUMBUHAN PDRB	-1,19	6,90	2,97	5,27	3,43	2,83	5,01	6,03	6,40	5,09	6,51	5,04	4,88	4,45	5,20	5,01	4,90	5,02	▲

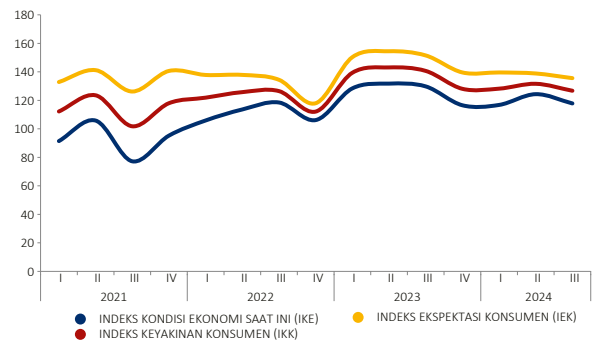
▲ Menguat
▼ Melambat

Sumber: BPS (data diolah)



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.3 Struktur Ekonomi Sisi Pengeluaran

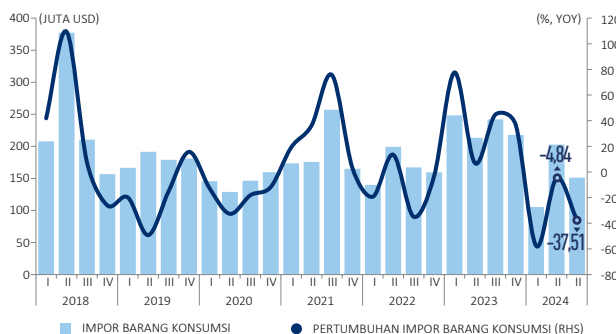


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 1.5 Survei Konsumen

1.1.1 Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan III 2024 tetap tumbuh sebesar 5,10% (yoy), meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,19% (yoy). Melambatnya konsumsi rumah tangga tercermin dari impor barang konsumsi yang berkontraksi sebesar 37,51% (yoy), melambat dibanding periode sebelumnya yang berkontraksi sebesar 4,84% (yoy). Penurunan konsumsi RT ini juga sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menurun menjadi 126,72 di triwulan III 2024, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 131,61. Menurunnya IKK menunjukkan masyarakat cenderung menahan konsumsi, meskipun masih berada di atas 100 yang artinya tetap optimis terhadap kondisi perekonomian terkini.



Sumber: Bea Cukai (data diolah)

Grafik 1.4 Impor Barang Konsumsi

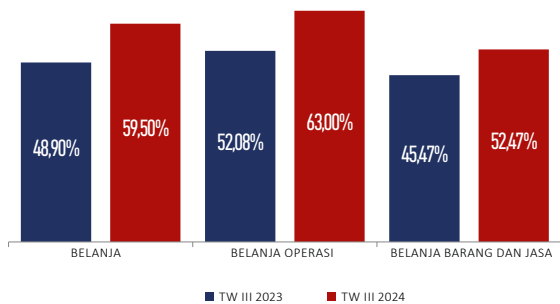
1.1.2 Konsumsi Pemerintah

Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan III 2024 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2024, konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 6,80% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,28% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah menjelang akhir tahun. Total realisasi belanja APBD pemda seluruh Kepri hingga triwulan III 2024 mencapai 59,50% dari pagu anggaran, meningkat dibandingkan triwulan III 2023 yang hanya sebesar 48,90%.

Berdasarkan struktur PDRB Provinsi Kepri pada triwulan III 2024, konsumsi pemerintah memiliki pangsa sebesar 4,39% atau sedikit menurun dibandingkan pangsa pada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,68%. Penurunan pangsa belanja pemerintah tersebut sejalan dengan normalisasi pasca berakhirnya periode pemilihan umum di awal tahun.

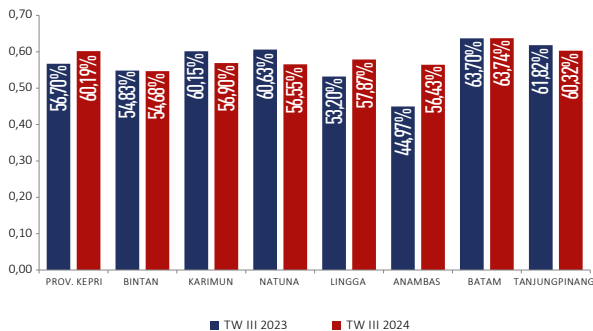
Secara spasial, empat Pemda (Provinsi Kepri, Kab. Lingga, Kab. Anambas, dan Kota Batam) mencatat peningkatan realisasi belanja pada triwulan III 2024. Realisasi belanja keempat Pemda tersebut meningkat masing-masing Provinsi Kepri dari 56,70% menjadi sebesar 60,19%, Kab. Lingga dari 53,20% menjadi 57,87%, Kab. Anambas dari 44,97% menjadi 56,43%, serta Kota Batam dari 63,70% menjadi 63,74%. Sementara itu, empat Pemda lainnya mengalami penurunan realisasi belanja yakni Kab. Bintan dari 54,83% menjadi 54,68%, Kab.

Karimun dari 60,15% menjadi 56,90%, Kab. Natuna dari 60,63% menjadi 56,55%, serta Kota Tanjungpinang dari 61,82% menjadi 60,32%. Dari sisi keuangan, peningkatan konsumsi pemerintah juga tercermin pada menurunnya jumlah simpanan pemerintah di perbankan pada triwulan III 2024, yang mengalami kontraksi sebesar 20,78% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang kontraksi sebesar 16,03% (yoy).



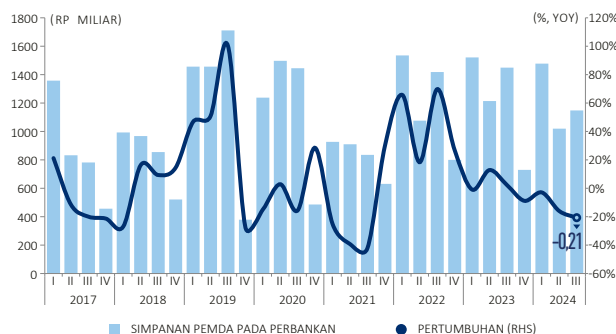
Sumber: BPKAD Prov & Kab/Kota di wilayah Kepri (data diolah)

Grafik 1.6 Realisasi Belanja APBD



Sumber: BPKAD Prov & Kab/Kota di wilayah Kepri (data diolah)

Grafik 1.7 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Wilayah Kepri



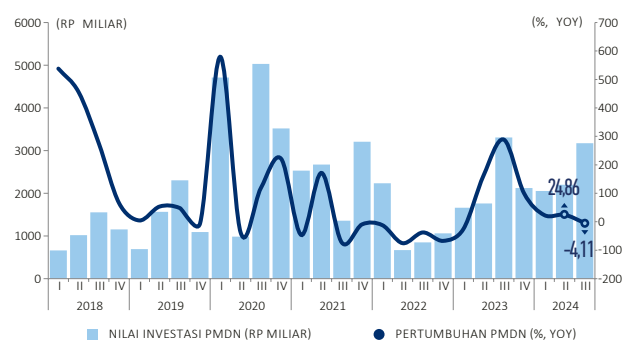
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.8 Simpanan Pemerintah Daerah pada Perbankan

1.1.3 Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB

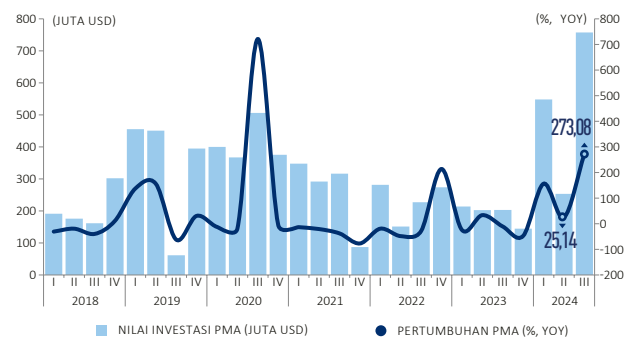
PMTB atau investasi di Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 3,47% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tumbuh 8,56% (yoy). Perlambatan tersebut terkonfirmasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kepri yang berkontraksi sebesar 4,11% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 24,86% (yoy). Perlambatan investasi juga tercermin dari menurunnya Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Investasi dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), dari 1,88% menjadi -0,59%. Di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) tumbuh sebesar 273,08% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 25,14% (yoy) sehingga menjadi penahan laju perlambatan investasi yang lebih dalam, sejalan dengan masuknya investasi asing khususnya pada sejumlah kawasan industri di Kepri, salah satunya di Kawasan Industri Wiraraja Batam.



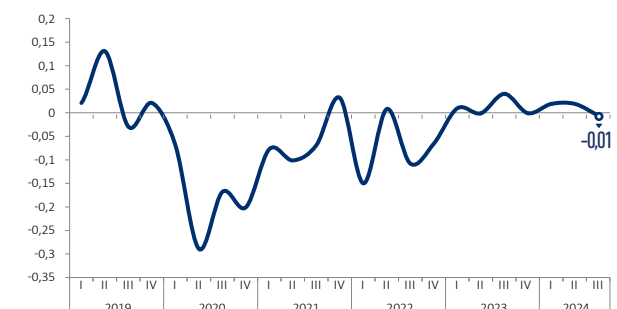
Sumber: BKPM (data diolah)

Grafik 1.9 Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)



Sumber: BKPM (data diolah)

Grafik 1.10 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA)



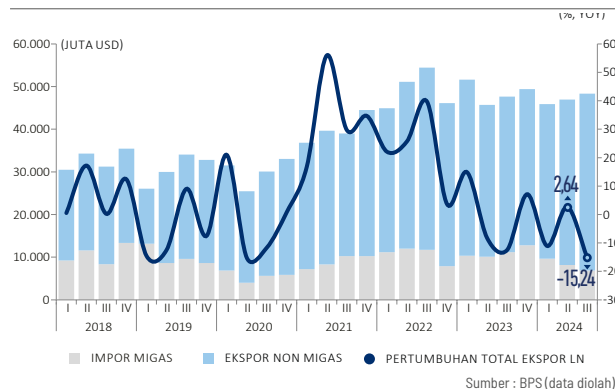
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.11 SBT Investasi

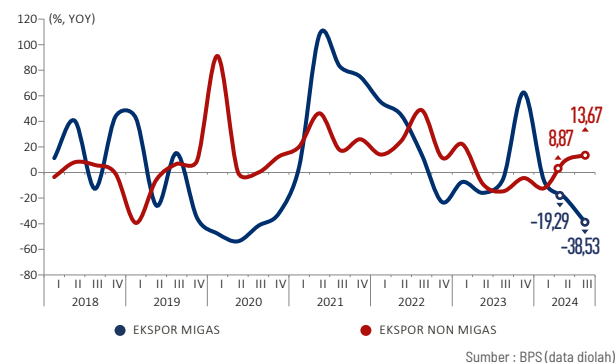
1.1.4 Kegiatan Ekspor-Import

PDRB net ekspor Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 15,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 20,72% (yoy). Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Ekspor tumbuh sebesar 0,16% (yoy), atau melambat setelah triwulan sebelumnya tumbuh 2,75% (yoy). Sementara itu, impor mengalami kontraksi sebesar 1,22% (yoy), berbanding terbalik dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,60% (yoy). Ekspor yang melambat sejalan dengan nilai total ekspor ke luar negeri dari Provinsi Kepri (migas dan nonmigas) pada triwulan III 2024 yang berkontraksi sebesar 15,24% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,64% (yoy). Kontraksi tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan ekspor migas sejalan dengan adanya kendala operasional pada pengoperasian sumur produksi migas pada beberapa perusahaan tambang.

Kinerja ekspor Provinsi Kepri yang melambat sejalan dengan menurunnya ekspor produk mesin. Nominal ekspor produk mesin pada triwulan III 2024 tercatat berkontraksi sebesar 10,04% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 4,05% (yoy). Di sisi lain, penurunan ekspor yang lebih dalam tertahan oleh nominal ekspor elektronik yang membaik, dari berkontraksi sebesar -12,87% (yoy) menjadi -0,97% (yoy). Kondisi tersebut sejalan dengan perubahan *Index of Industrial Production (IIP)* Singapura untuk peralatan elektronik yang pada triwulan III 2024 yang tumbuh sebesar 12,77% (yoy), meningkat dari sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,10% (yoy).

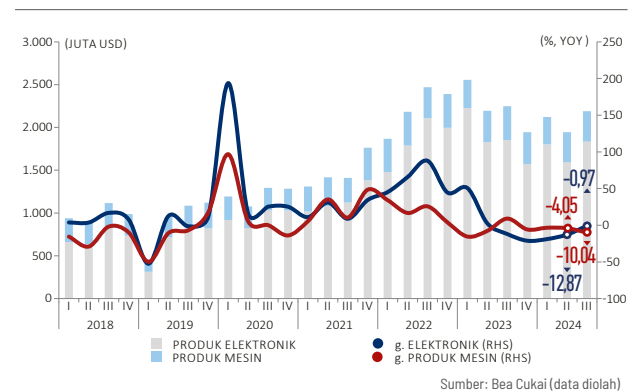


Grafik 1.12 Perkembangan Ekspor Total Luar Negeri

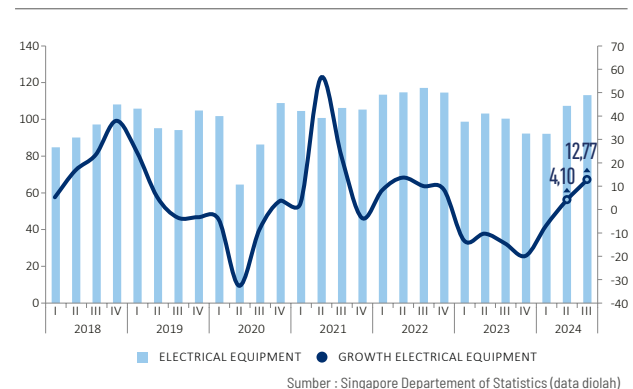


Grafik 1.13 Perkembangan Ekspor Komoditas Nonmigas dan Migas

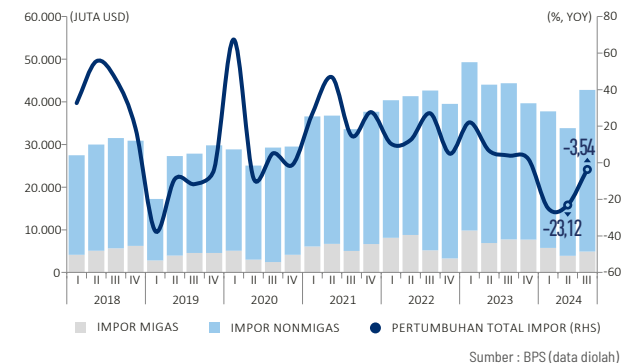
Sejalan dengan arah pertumbuhan ekspor secara total yang melambat, PDRB impor juga tercatat mengalami penurunan. Total impor Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 berkontraksi sebesar 1,22% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,60% (yoy). Selanjutnya, total nilai impor luar negeri berkontraksi sebesar 3,54% (yoy) pada triwulan III, tercatat lebih baik dari sebelumnya yang berkontraksi sebesar 23,12% (yoy). Meningkatnya impor luar negeri terutama disebabkan oleh peningkatan impor bahan baku. Nilai impor bahan baku dari luar negeri pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 15,90% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,53% (yoy). Di sisi lain, impor barang konsumsi dan barang modal mengalami perlambatan, masing-masing berkontraksi sebesar 37,51% (yoy) dan 28,70% (yoy).



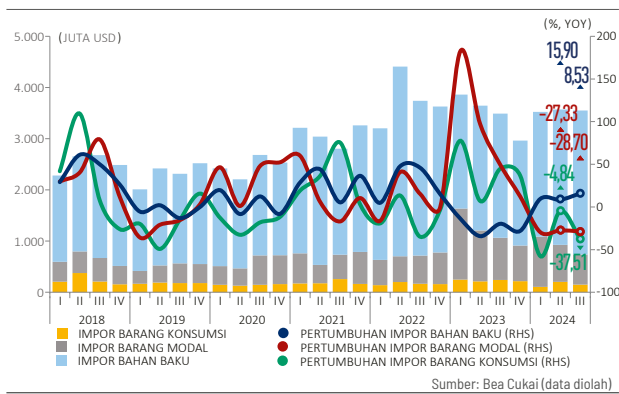
Grafik 1.14 Perkembangan Ekspor Produk Elektronik dan Produk Mesin



Grafik 1.15 Index of Industrial Production (IIP) Singapura untuk Peralatan Elektronik



Grafik 1.16 Perkembangan Impor



Grafik 1.17 Perkembangan Impor Nonmigas - BEC



Sumber : BPS (data diolah)

Grafik 1.18 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB (%)

1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja industri yang baik serta pembangunan masif yang terus berlanjut pada triwulan III 2024 mampu mendorong kinerja sektor terkait. Kinerja positif ekonomi Kepri tetap ditopang oleh tumbuhnya LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Sementara itu, pertumbuhan tertahan oleh kinerja LU Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi.

Secara struktur, perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 masih didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa

40,80%. Pangsa terbesar kedua yakni LU Konstruksi sebesar 20,49%, diikuti LU Pertambangan dan Penggalian serta LU Perdagangan Besar dan Eceran masing-masing sebesar 9,99% dan 9,46%. Pertumbuhan LU Industri Pengolahan tetap baik sejalan dengan masih tingginya permintaan global terhadap produk elektronik. Pertumbuhan LU Konstruksi juga masih tumbuh sejalan dengan masih berlanjutnya sejumlah pembangunan infrastruktur. Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran terakselerasi sejalan dengan peningkatan aktivitas pariwisata serta belanja masyarakat di momen tahun ajaran baru. Sementara itu, terkontraksinya kinerja pada LU Pertambangan dan Penggalian tercermin dari menurunnya ekspor migas pada triwulan III.

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Sisi Lapangan Usaha

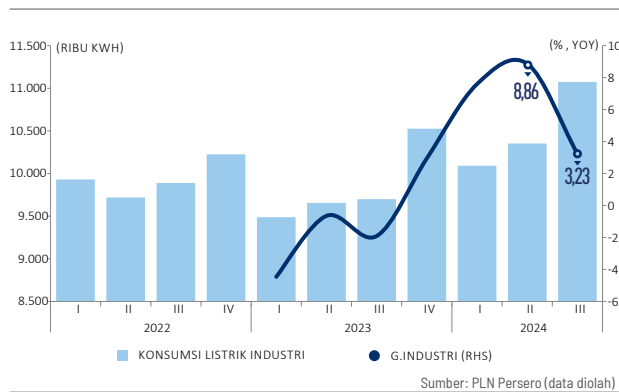
PDRB Sisi Lapangan Usaha	2022					2023					2024			Arah TW
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II	III	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,00	3,53	2,41	5,19	3,55	5,44	-2,44	-6,20	6,90	0,90	4,86	3,09	-6,06	▼
Pertambangan dan Penggalian	-7,05	8,37	-4,06	-22,89	-7,00	-15,04	-0,51	3,69	2,61	-2,65	-4,69	-25,84	-5,01	▲
Industri Pengolahan	4,16	2,28	4,87	6,73	4,55	7,77	-0,27	0,62	1,83	2,48	3,87	13,35	8,13	▼
Pengadaan Listrik, Gas	10,93	18,53	17,62	18,35	16,38	12,08	11,03	7,05	2,67	8,03	5,13	7,74	6,85	▼
Pengadaan Air	-0,71	3,27	24,05	9,31	8,82	11,53	-3,28	0,07	10,42	4,45	8,55	7,89	-5,50	▼
Konstruksi	0,69	-0,01	2,89	17,95	5,45	7,53	10,48	13,89	11,07	10,80	13,89	7,61	2,99	▼
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,19	21,77	7,38	6,97	13,59	5,11	2,19	10,03	6,08	5,76	4,80	2,22	4,82	▲
Transportasi dan Pergudangan	19,06	32,43	81,05	31,11	38,37	33,07	21,77	9,94	-0,22	14,92	0,86	2,49	0,79	▼
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,02	45,32	98,36	60,29	49,71	82,70	44,71	13,28	-4,58	27,31	-5,98	2,74	13,16	▲
Informasi dan Komunikasi	6,04	-12,43	16,53	23,58	8,66	24,53	51,60	13,91	0,43	19,96	2,30	4,18	1,68	▼
Jasa Keuangan	4,96	-3,68	5,13	10,49	4,17	4,94	12,83	7,99	9,10	8,65	8,22	10,22	9,83	▼
Real Estate	1,01	2,55	5,67	9,25	4,64	11,35	7,51	2,63	0,12	5,25	2,85	4,50	8,53	▲
Jasa Perusahaan	0,73	3,86	18,47	18,73	10,65	34,00	27,36	9,84	0,79	16,55	-6,63	-3,60	5,08	▲
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-9,65	13,54	8,62	-1,06	3,36	8,03	3,39	-3,21	12,20	5,13	25,50	15,75	18,28	▲
Jasa Pendidikan	-1,00	2,44	6,01	5,85	3,32	8,82	7,44	-0,54	0,15	3,87	-1,74	-3,46	2,98	▲
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,39	-11,55	4,94	6,15	-0,02	6,21	-7,37	-23,87	7,06	-4,82	7,07	30,72	31,53	▲
Jasa lainnya	6,73	140,12	94,80	58,95	69,97	37,38	8,79	27,56	21,09	21,51	9,99	1,80	26,93	▲
PERTUMBUHAN PDRB	2,83	5,01	6,03	6,40	5,09	6,51	5,04	4,88	4,45	5,20	5,01	4,90	5,02	▲

▲ Menguat
▼ Melambat

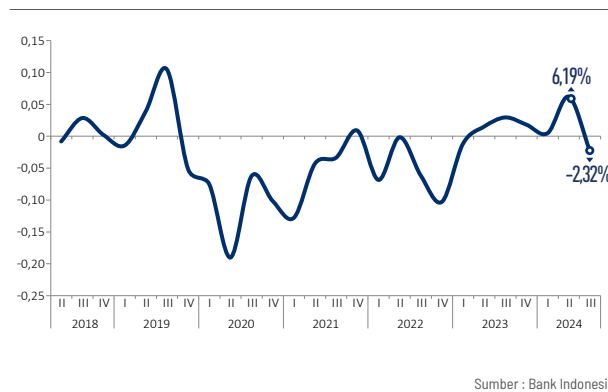
Sumber: BPS (data diolah)

1.2.1 Lapangan Usaha Industri Pengolahan

LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2024 tetap tumbuh tinggi sebesar 8,13% (yoy), meskipun melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,35% (yoy) dan memberikan andil 3,26% terhadap pertumbuhan Provinsi Kepri atau yang terbesar dibandingkan LU lainnya. Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan tersebut tercermin dari data konsumsi listrik pada sektor industri yang tumbuh sebesar 3,23% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,86% (yoy). Selain itu, penurunan kinerja LU Industri Pengolahan juga terkonfirmasi dari hasil SKDU Bank Indonesia tercermin dari SBT Industri Pengolahan yang menurun dari 6,19% pada triwulan II menjadi -2,32% pada triwulan III.



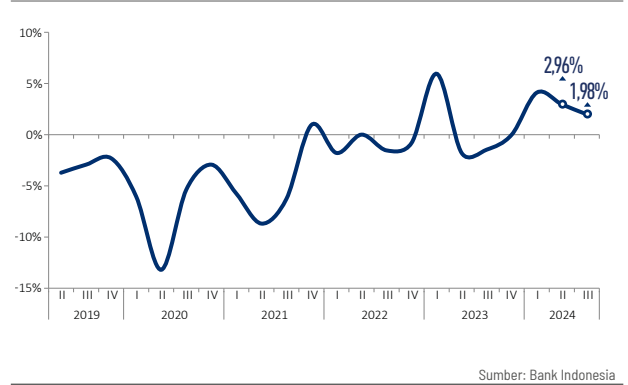
Grafik 1.19 Konsumsi Listrik Industri



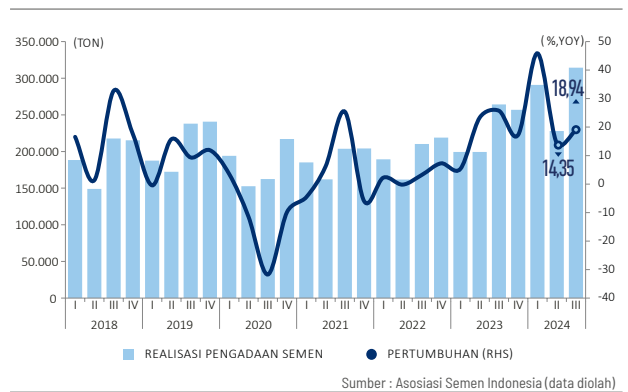
Grafik 1.20 SBT Industri Pengolahan

1.2.2 Lapangan Usaha Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan III 2024 tetap tumbuh dan mencatatkan andil pertumbuhan tertinggi kedua terhadap PDRB Provinsi Kepri. LU Konstruksi pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 2,99% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,61% (yoy). Perlambatan kinerja LU Konstruksi terkonfirmasi dari hasil SKDU untuk LU Konstruksi di Provinsi Kepri yang mengalami



Grafik 1.21 SBT Konstruksi

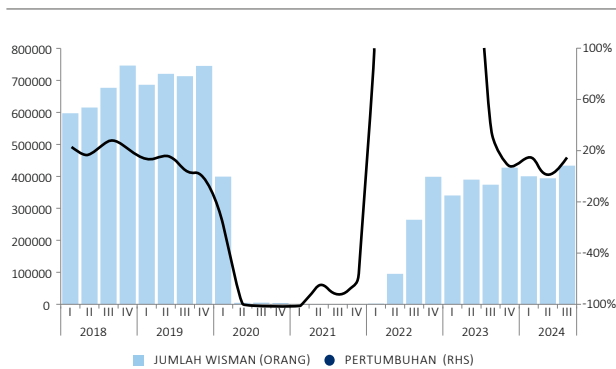


Grafik 1.22 Perkembangan Pengadaan/Penjualan Semen

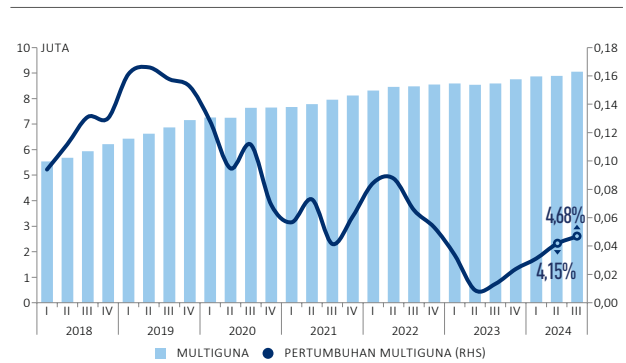
perlambatan, dengan SBT sebesar 1,98% atau lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,96%. Di sisi lain, perlambatan yang lebih dalam masih tertahan yang diindikasikan oleh realisasi pengadaan/penjualan semen yang masih tumbuh sebesar 18,94% (yoy). Meskipun melambat, pertumbuhan LU Konstruksi tersebut tetap memberikan andil tertinggi kedua terhadap PDRB Kepri yaitu sebesar 0,60%. Hal tersebut sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur yang cukup masif dan masih tingginya aktivitas investasi perusahaan di Provinsi Kepri.

1.2.3 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

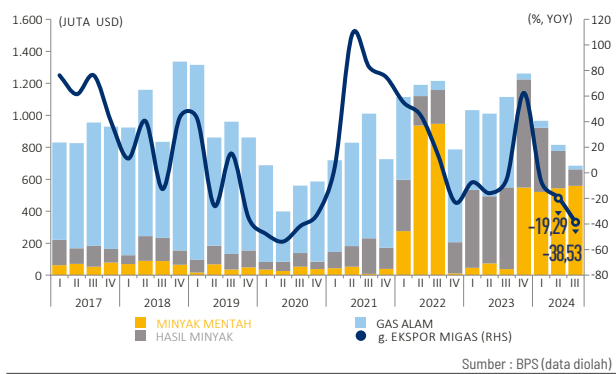
Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 4,82% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,22% (yoy). Akselerasi tersebut didukung oleh meningkatnya kunjungan wisman ke Kepri yang pada triwulan III 2024 tercatat tumbuh sebesar 15,76% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,17% (yoy). Kinerja LU Perdagangan juga didukung oleh pertumbuhan kredit perseorangan terutama kredit multiguna yang tumbuh sebesar 4,68% (yoy), lebih baik dari sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,15% (yoy).



Grafik 1.23 Kunjungan Wisman



Grafik 1.24 Kredit Multiguna



Grafik 1.25 Perkembangan Ekspor Migas

1.2.4 Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan

Pada triwulan III 2024 kinerja LU Pertambangan dan Penggalan terkontraksi sebesar 5,01% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 25,84% (yoy). Kinerja LU Pertambangan masih terkontraksi sejalan dengan adanya kendala operasional pada pengoperasian sumur produksi migas pada beberapa perusahaan tambang. Hal ini tercermin dari ekspor migas yang masih mengalami kontraksi sebesar 38,53% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya juga terkontraksi sebesar 19,29% (yoy).



BOKS 1

Laporan *Liaison* Triwulan III 2024 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau melakukan wawancara kegiatan dunia usaha atau *liaison* kepada sejumlah responden dari berbagai sektor ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk mendapatkan gambaran terkait perkembangan perekonomian Provinsi Kepri. Sektor ekonomi yang menjadi fokus *liaison* pada triwulan III tahun 2024 terdiri dari Industri Pengolahan (38,5%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (15,4%), Real Estate (15,4%), Pengadaan Listrik dan Gas (7,7%), Perdagangan Besar dan Eceran (7,7%), Pertambangan dan Penggalian (7,7%), serta Pertanian, Kehutanan, Perikanan (7,7%). Ruang lingkup analisa laporan *liaison* mencakup permintaan domestik dan ekspor, kapasitas utilitas, persediaan, investasi, biaya, harga jual dan margin, tenaga kerja, pembiayaan serta prakiraan kondisi bisnis dimasa yang akan datang dengan ringkasan nilai *likert* sebagaimana terlihat pada Tabel B1.1.

Penjualan domestik tercatat mengalami penurunan tercermin dari nilai *likert* sebesar 0,20, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya

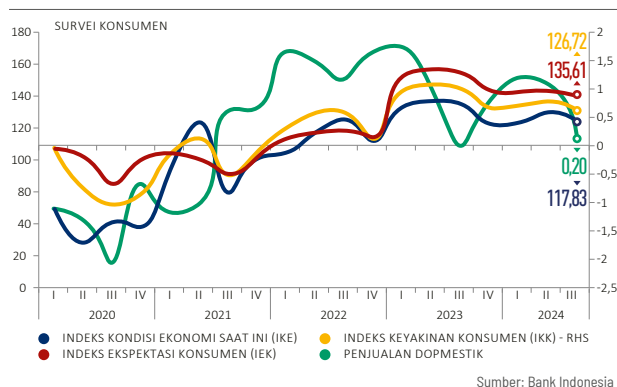
sebesar 1,10. Secara umum, kinerja penjualan/produksi domestik di wilayah Kepri melemah pada sektor Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Penjualan/produksi pada sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan disebabkan oleh berkurangnya permintaan dari dalam negeri terutama untuk produk komponen elektronik serta pergeseran pola konsumsi masyarakat yang berpengaruh pada kinerja produksi film animasi. Penurunan permintaan yang cukup signifikan terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum karena gedung yang sedang dalam proses renovasi yang berdampak pada berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan dan berkurangnya event pemerintahan karena bertepatan dengan periode Pemilu dan Pilkada. Penurunan kinerja penjualan domestik searah dengan pelemahan pertumbuhan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang berkontraksi lebih dalam dibandingkan periode sebelumnya. IKK menurun pada triwulan III 2024 sebesar -9,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 sebesar -8,04% (yoy). Sejalan dengan IKK, nilai pertumbuhan IKE dan IEK pada triwulan III 2024 juga mengalami penurunan secara berturut-turut menjadi -9,20% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -5,61% (yoy) dan menjadi -10,52% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -10,10% (yoy) (Grafik 1).

Sejalan dengan permintaan domestik, permintaan ekspor mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh kinerja sektor Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Seperti kondisi penjualan domestik, penurunan kinerja ekspor pada Industri Pengolahan disebabkan oleh penurunan *demand* global. Penurunan penjualan ekspor sektor Pertambangan dan Penggalian disebabkan oleh perhentian operasional dan produksi pada perusahaan akibat proses pembaharuan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penurunan penjualan secara keseluruhan juga disebabkan oleh tingginya produksi pada tahun 2023 (*high-based effect*) yang sengaja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penjualan sebelum operasional diberhentikan.

Tingkat kapasitas utilisasi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efisiensi operasi. Rata-rata tingkat kapasitas utilisasi dari perusahaan yang menjadi kontak pada periode laporan tercatat sebesar 66,11%, mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 70,58%. Hal ini sejalan dengan melemahnya permintaan

Tabel B1.1 Likert Scale Tahun 2023 s.d Triwulan II 2024 di Kepri

INDIKATOR	2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III
KONDISI SAAT INI							
Penjualan Domestik	1,78	1,00	0,00	0,80	1,22	1,10	0,20
Penjualan Ekspor	0,38	-0,30	0,20	1,00	-0,57	0,11	-0,60
LS Kapasitas Utilisasi	1,00	0,00	0,08	1,00	0,17	0,08	-0,45
Persediaan	0,33	-0,08	0,42	0,33	0,33	-0,09	-0,33
Investasi	1,00	1,00	1,08	0,17	0,75	0,67	0,58
Biaya Bahan Baku	0,67	-0,15	0,70	0,88	0,92	0,18	0,46
Biaya Energi	0,50	0,38	0,00	1,00	0,08	0,08	0,15
Biaya Tenaga Kerja	1,08	1,23	2,00	1,25	2,00	1,75	2,00
Harga Jual	0,67	0,62	0,83	0,25	0,33	0,33	0,31
Margin Per Unit Output	0,50	0,54	0,17	0,08	0,00	0,50	-0,58
Jumlah Tenaga Kerja	0,83	0,23	0,17	0,58	0,17	0,00	0,23
PERKIRAAN KE DEPAN							
Perkiraan Penjualan ke Depan	0,67	0,54	0,75	0,25	0,08	1,00	1,08
Perkiraan Tingkat Upah	1,00	0,92	2,00	1,25	2,00	2,00	2,00
Perkiraan Harga Jual	0,58	0,15	0,42	0,58	0,42	0,58	0,50
Perkiraan jumlah Tenaga Kerja	0,92	0,38	0,42	0,00	0,33	0,42	0,46
Perkiraan Investasi	0,50	0,69	0,25	0,67	0,58	0,58	0,82
Tingkat Kapasitas Utilisasi	86,21	79,23	72,75	76,36	85,17	70,58	66,11



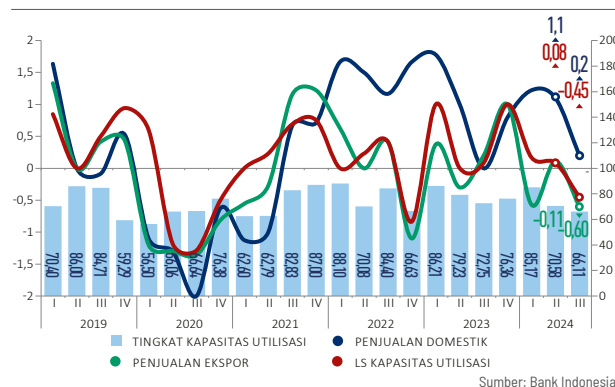
Grafik B1.1 LS Penjualan Domestik dan Pertumbuhan IKK & IEK Survei Konsumen

domestik dan ekspor pada triwulan III 2024 tercermin dari *likert scale* yang mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 2). Penurunan kapasitas utilisasi terjadi pada beberapa perusahaan khususnya di sektor industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta *real estate*.

Tingkat persediaan mengalami penurunan sejalan dengan pelemahan kinerja penjualan domestik khususnya sektor Industri Pengolahan, *Real Estate*, serta Pertambangan dan Penggalian. Penurunan ini didorong oleh target perusahaan terhadap pengurangan biaya penyimpanan sehingga perusahaan tidak melakukan *buffering* bahan baku dalam jumlah besar. Pada sektor Pertambangan dan Penggalian, persediaan berada pada level yang tidak lebih tinggi dibanding periode sebelumnya karena perusahaan langsung menjual batu granit setiap selesai diproduksi.

Secara umum, investasi perusahaan kontak pada periode ini mengalami penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Investasi yang menurun pada periode triwulan III 2024 terutama terjadi pada sektor Industri Pengolahan seiring dengan kinerja penjualan yang melemah. Beberapa kontak hanya melakukan *maintenance* rutin dan melanjutkan investasi dari periode sebelumnya. Penurunan investasi juga sejalan dengan penurunan kapasitas utilisasi yang menyebabkan perusahaan tidak melakukan penambahan sarana dan prasarana seperti mesin ataupun lahan.

Harga jual pada triwulan III 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan harga jual/tarif terjadi pada sektor Industri Pengolahan serta Pertambangan dan Penggalian. Melemahnya harga jual pada sektor-sektor tersebut terutama disebabkan oleh penentuan harga jual yang dilakukan oleh kantor pusat atau induk perusahaan (*headquarter*) dan *base effect* harga jual pada periode sebelumnya yang tinggi karena perusahaan sengaja menaikkan harga jual untuk mengejar capaian target dari perusahaan. Di sisi lain, beberapa perusahaan tidak bisa menaikkan harga jual karena mempertimbangkan kondisi persaingan dengan kompetitor yang semakin tinggi di Batam.



Grafik B1.2 Kapasitas Utilisasi dan LS Penjualan Domestik

Penetapan harga jual pada umumnya dilakukan dengan menerapkan *cost plus margin* bagi beberapa perusahaan di sektor industri pengolahan, yang berarti margin yang diperoleh dihitung berdasarkan biaya produksi yang timbul. Margin turut mengalami penurunan dipengaruhi oleh penurunan kinerja penjualan dan kebijakan perusahaan mempertahankan harga jual yang rendah meski di sisi lain terjadi peningkatan harga bahan baku dan biaya lainnya. Secara umum, variabel biaya mengalami kenaikan baik pada komponen biaya energi, biaya bahan baku, maupun biaya tenaga kerja. Komponen biaya energi mengalami kenaikan terutama pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, *Real Estate*, serta Penyediaan Listrik dan Gas dikarenakan kenaikan tarif listrik dan bertambahnya *event* serta program digitalisasi yang mengakibatkan biaya energi untuk operasional meningkat. Komponen biaya bahan baku turut mengalami peningkatan terutama pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Pengadaan Listrik dan Gas, serta *Real Estate*. Harga bahan baku seperti pasir, besi, semen, bahan kimia, *sparepart* kendaraan bermotor, dan lisensi *software* meningkat cukup drastis seiring dengan kenaikan harga global serta dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Di sisi lain, kenaikan juga terjadi pada biaya tenaga kerja seiring dengan kenaikan tingkat Upah Minimum Kota (UMK) dan penambahan jumlah tenaga kerja di beberapa perusahaan.

Berbeda dengan kondisi kinerja penjualan domestik dan ekspor, jumlah tenaga kerja meningkat khususnya terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta *Real Estate* yang melakukan penambahan tenaga kerja pemasaran seiring dengan penambahan *event* seperti pameran. Di sisi lain, meski terdapat penambahan tenaga kerja pada sektor Pertambangan dan Penggalian, perusahaan justru kesulitan mencari tenaga kerja teknis terampil di lapangan dikarenakan minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kriteria. Peningkatan jumlah pekerja ini berpengaruh pada tingkat biaya upah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan yang semakin meningkat seiring dengan kenaikan UMP dan UMK.

BAB II

Perkembangan Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan Pemda Wilayah Kepri



Tw III
2024

68,19%
Rp10,31 T



Tw III
2023

67,33%
Rp9,27 T

Realisasi Belanja Pemda Wilayah Kepri



Tw III
2024

58,92%
Rp9,46 T



Tw III
2023

57,92%
Rp8,38 T

Realisasi Belanja APBN



Tw III
2024

64,20%
Rp11,13T



Tw III
2023

57,08%
Rp10,96T

Realisasi Belanja Infrastruktur APBN



Tw III
2024

50,67%
Rp922,90 M



Tw III
2023

39,34%
Rp978,00 M

Capaian persentase realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga triwulan III 2024 terhadap pagu anggaran tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yang disebabkan oleh peningkatan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Sementara itu, realisasi belanja pemerintah juga mengalami peningkatan terutama pada pos Belanja Operasi dan Belanja Transfer.



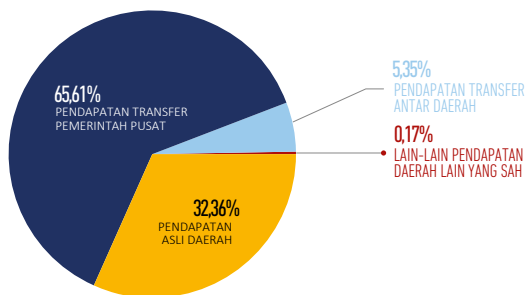
Realisasi total pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan III 2024 tercatat sebesar 68,19%, sementara realisasi belanja mencapai 58,92% dari total anggaran. Realisasi pendapatan tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 67,27%. Peningkatan realisasi pendapatan terutama terjadi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk sub anggaran Dana Perimbangan dan Dana Desa. Di samping itu, realisasi belanja juga mengalami peningkatan dari sebesar 57,93% menjadi sebesar 58,92% yang terjadi pada Belanja Operasi untuk pos Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Selain itu, pos Belanja Transfer juga mengalami peningkatan didukung oleh peningkatan realisasi pos Belanja Bantuan Keuangan.

2.1 REALISASI PENDAPATAN

Realisasi pendapatan seluruh Pemda di wilayah Kepri pada triwulan III 2024 mencapai 68,19% dari total anggaran atau sebesar Rp10,31 triliun. Persentase realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode

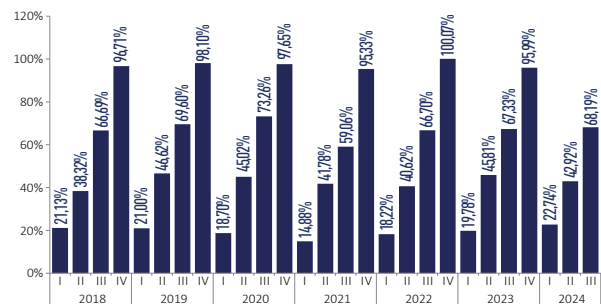
yang sama tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp9,27 triliun atau 67,27% dari total anggaran. Peningkatan tersebut didorong oleh tingginya realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada triwulan III 2024 mencapai Rp6,41 triliun atau sebesar 69,31% dari pagu anggaran dan memiliki pangsa anggaran pendapatan sebesar 62,12% dari pagu anggaran. Capaian tersebut secara persentase lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang hanya mencapai 64,48% dari pagu. Peningkatan tersebut terjadi pada semua pos sub anggaran pendapatan yaitu pos Dana Perimbangan dan Dana Desa. Realisasi dana perimbangan sampai triwulan III 2024 mencapai 68,73% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 64,38%, didorong oleh realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Non Fisik. Dana Desa mengalami peningkatan dari sebesar 62,90% menjadi sebesar 89,73% pada triwulan III 2024. Sementara itu, pos Dana Insentif Daerah (DID) pada tahun 2024 tidak ada dan digantikan oleh pos Dana Insentif



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.1 Komposisi Realisasi Pendapatan Triwulan III 2024



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Triwulan III 2024

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2024

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	Porsi (%)
Pendapatan Asli Daerah	4.874,19	32,23%	3.337,11	68,46%	32,36%
Pajak Daerah	3.706,24	24,51%	2.744,83	74,06%	
Retribusi Daerah	459,06	3,04%	252,68	55,04%	
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	56,78	0,38%	28,16	49,59%	
Lain-lain PAD yang Sah	652,11	4,31%	311,44	47,76%	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.242,41	61,12%	6.405,51	69,31%	62,12%
Dana Perimbangan	8.959,05	59,24%	6.157,19	68,73%	
Dana Insentif Daerah (DID)	63,07	0,42%	50,64	80,29%	
Dana Desa	220,30	1,46%	197,68	89,73%	
Pendapatan Transfer Antar Daerah	900,09	5,95%	551,21	61,24%	5,35%
Pendapatan Bagi Hasil	884,55	5,85%	543,31	61,42%	
Bantuan Keuangan	15,54	0,10%	7,90	-	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	105,60	0,70%	17,26	16,34%	0,17%
Hibah	72,94	0,48%	0,86	1,18%	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	32,66	0,22%	16,40	50,21%	
TOTAL PENDAPATAN	15.122,29	100,00%	10.311,09	68,19%	

Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

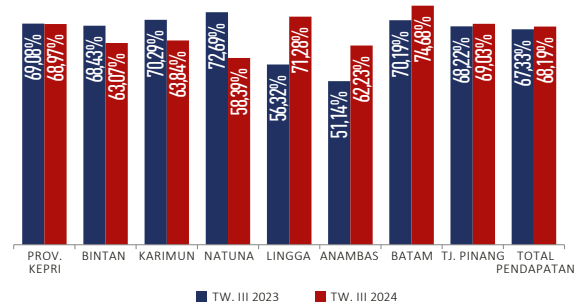
* Pada tahun 2023, merupakan Dana Insentif Daerah yang pada tahun 2024 berganti menjadi Dana Insentif Fiskal

**Bantuan Keuangan pada tahun 2024 tidak dianggarkan

Fiskal yang pada triwulan III 2024 terealisasi sebesar 80,29% atau Rp50,64 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp63,07 miliar. Dengan demikian, dari sisi nominal realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat secara keseluruhan mengalami peningkatan dari Rp5,65 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp6,41 triliun pada triwulan III 2024.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada seluruh Pemda di Kepri hingga triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp3,34 triliun atau 68,46% dari pagu anggaran, lebih rendah secara persentase dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 72,65% dari pagu anggaran. Namun, secara nominal realisasi PAD meningkat menjadi Rp3,34 triliun dari Rp3,12 triliun pada tahun 2023. Penurunan capaian PAD berasal hampir di semua pos PAD kecuali Retribusi Daerah yang meningkat mencapai 55,04% dari pagu anggaran, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 53,30%. Pencapaian ini cukup menahan pertumbuhan PAD menurun lebih dalam. Peningkatan realisasi Retribusi Daerah tersebut sejalan dampak rambatan dengan adanya kenaikan tarif parkir pada awal tahun 2024 sehingga terjadi peningkatan pendapatan daerah dari retribusi parkir. Sementara, secara persentase pajak daerah menurun, dari 75,98% triliun pada triwulan III 2023 menjadi 74,06% pada triwulan III 2024. Meskipun demikian, secara nominal realisasi pada triwulan III 2024 meningkat menjadi sebesar Rp2,74 triliun dari sebesar Rp2,60 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan wilayah kewenangan, realisasi pendapatan tertinggi pada triwulan III 2024 dicapai Pemerintah Kota Batam dengan jumlah pendapatan sebesar Rp2,78 triliun atau 74,68% dari total



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.3 Realisasi Pendapatan Pada Masing-masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

anggaran. Realisasi pendapatan Kota Batam memiliki pangsa sebesar 27,00% dari total realisasi pendapatan sehingga turut meningkatkan realisasi pendapatan untuk seluruh wilayah Kepri. Capaian realisasi tertinggi berikutnya yakni Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang yang masing-masing mencapai sebesar 71,28% dan 69,03% dari pagu anggaran tahun ini.

2.2 REALISASI BELANJA

Realisasi belanja Pemda di wilayah Kepri sampai dengan triwulan III 2024 juga tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi belanja Pemda hingga triwulan III 2024 mencapai 58,92% dari pagu anggaran atau sebesar Rp9,46 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode tahun sebelumnya yang

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja di Wilayah Provinsi Kepri Triwulan III 2024 (dalam miliar Rupiah)

Jenis Anggaran	Anggaran		Realisasi		Porsi (%)
	Rp	Struktur (%)	Rp	Realisasi (%)	
Belanja Operasi	12.314,18	76,68%	7.674,81	62,32%	81,11%
Belanja Pegawai	5.851,80	36,44%	4.164,03	71,16%	
Belanja Barang dan Jasa	5.447,80	33,92%	2.858,64	52,47%	
Belanja Bunga	4,68	0,03%	3,44	73,43%	
Belanja Subsidi	4,87	0,03%	1,99	40,92%	
Belanja Hibah	978,36	6,09%	631,61	64,56%	
Belanja Bantuan Sosial	26,67	0,17%	15,10	56,61%	
Belanja Modal	2.363,67	14,72%	811,91	34,35%	8,58%
Belanja Modal Tanah	12,28	0,08%	1,38	11,22%	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	496,61	3,09%	150,67	30,34%	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	772,60	4,81%	241,18	31,22%	
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.016,10	6,33%	390,37	38,42%	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	61,15	0,38%	26,77	43,79%	
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4,94	0,03%	1,53	30,96%	
Belanja Tidak Terduga	42,82	0,27%	3,52	8,23%	0,04%
Belanja Transfer	1.338,07	8,33%	972,14	72,65%	10,27%
Belanja Bagi Hasil	891,13	5,55%	660,36	74,10%	
Belanja Bantuan Keuangan	446,94	2,78%	311,78	69,76%	
TOTAL BELANJA	16.058,74	100,00%	9.462,38	58,92%	
SURPLUS/DEFISIT	-936,44		848,71		
Pembiayaan Neto	711,17		253,10	35,59%	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	806,72		276,09	34,22%	
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	95,55		22,99	24,06%	
SILPA TAHUN BERKENAAN	-225,27		1.101,82		

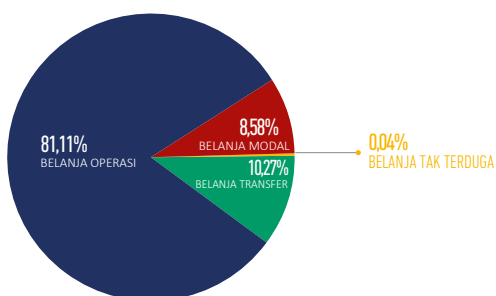
Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (diolah)

mampu mencapai 57,93% atau sebesar Rp8,38 triliun. Peningkatan capaian realisasi belanja terjadi pada pos Belanja Operasi dan Belanja Transfer. Sementara itu, realisasi Belanja Tidak Terduga tercatat mengalami penurunan dari 16,04% pada tahun 2023 menjadi 8,23% dari total anggaran pada tahun 2024. Realisasi belanja Pemda berdasarkan pos pengeluaran didominasi oleh Belanja Operasi dengan porsi 81,11%, diikuti Belanja Transfer sebesar 10,27%, Belanja Modal sebesar 5,82%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,04%.

Realisasi Belanja Operasi tercapai sebesar 62,32% dari pagu anggaran atau tercatat sebesar Rp7,67 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 60,97% dari pagu anggaran. Secara lebih rinci, realisasi Belanja Pegawai yang merupakan penyumbang terbesar Belanja Operasi mencapai 71,16% dari pagu anggaran atau sebesar Rp4,16 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 68,14% atau sebesar Rp3,44 triliun. Selain itu, Belanja Hibah terealisasi 64,56% atau sebesar Rp631,61 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 53,75%. Sementara itu, realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan triwulan III 2024 tercapai 52,47%, realisasi tersebut lebih rendah dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 54,81%.

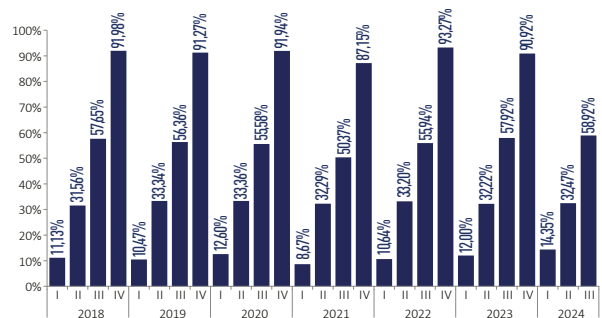
Peningkatan realisasi belanja juga dipengaruhi oleh meningkatnya realisasi Belanja Transfer yaitu Belanja Bantuan Keuangan kepada desa. Realisasi Belanja Transfer tercapai 72,65% dari pagu anggaran atau sebesar Rp972,14 miliar, meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 70,10% atau sebesar Rp849,36 miliar. Hal ini didorong dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada desa yang meningkat mencapai 69,76%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tercapai 61,08%. Sementara itu, realisasi Belanja Bagi Hasil mengalami penurunan dari 77,07% menjadi 74,10% pada triwulan III 2024.

Pertumbuhan realisasi belanja tertahan oleh penyerapan pos Belanja Modal pada triwulan III 2024 mencapai Rp811,91 miliar atau mencapai 34,35% dari pagu anggaran dengan pangsa sebesar



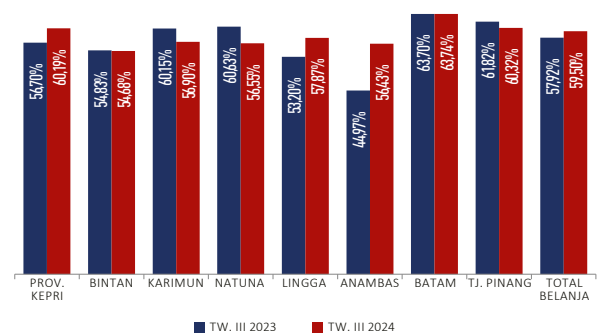
Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.4 Komposisi Realisasi Belanja Triwulan III 2024



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.5 Perkembangan Realisasi Belanja Triwulan III 2024



Sumber : BPKAD Kab/Kota dan Provinsi di Wilayah Kepulauan Riau (data diolah)

Grafik 2.6 Realisasi Belanja pada Masing-Masing Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepri

8,58%, lebih rendah dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 39,49% dengan pangsa 11,58% dari pagu anggaran. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan pagu anggaran Belanja Modal secara keseluruhan meliputi pos anggaran Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gebung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, serta Belanja Modal Aset Tidak Berwujud yang menurun jika dibandingkan realisasi pada triwulan III tahun sebelumnya.

Berdasarkan wilayah administrasi, Pemda dengan tingkat realisasi belanja tertinggi sampai dengan triwulan III 2024 yakni Kota Batam yang mencapai 63,74% dari total anggaran atau sebesar R2,44 triliun, diikuti Kota Tanjungpinang yang mencapai 60,32% dari total anggaran atau sebesar Rp689,82 miliar, dan Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 60,19% atau sebesar Rp2,91 triliun.

2.3 ANGGARAN DAN REALISASI APBN DI WILAYAH KEPRI

Secara keseluruhan, pagu belanja APBN di Kepri pada 2024 tercatat mengalami penurunan dari Rp19,20 triliun pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp17,34 triliun. Penurunan pagu anggaran terjadi pada pos anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) dari Rp9,30 triliun menjadi Rp7,02 triliun pada triwulan III 2024. Sementara, target pagu anggaran Belanja

Pemerintah Pusat meningkat dari Rp9,99 triliun menjadi Rp10,33 triliun. Peningkatan pagu anggaran pada pos Belanja Pemerintah Pusat utamanya terjadi pada seluruh pos belanja kecuali Belanja Lainnya. Selain itu, pagu pendapatan meningkat dari Rp12,53 triliun menjadi Rp15,13 triliun dengan realisasi dari Rp8,70 triliun pada triwulan III tahun 2023 menjadi sebesar Rp10,05 triliun periode yang sama tahun 2024.

Realisasi pendapatan APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan III 2024 mencapai 66,43% dari pagu atau sebesar Rp10,05 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2023 yang mencapai Rp8,70 triliun. Meskipun demikian, secara nominal pendapatan APBN tumbuh sebesar 15,46% (yoy) seiring dengan kenaikan target pendapatan pada

pagu anggaran. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan nominal pendapatan pajak dalam negeri sebesar tumbuh sebesar 11,55% (yoy) dengan nilai mencapai Rp7,25 triliun atau 61,45% dari pagu anggaran. Selain itu, pendapatan APBN turut didukung oleh pertumbuhan pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya yang realisasinya telah melampaui target mencapai Rp563,63 miliar atau 135,63% dari target. Selain itu, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang tumbuh 114,06% (yoy), mencapai Rp1,91 triliun atau 84,57% dari pagu anggaran.

Realisasi belanja APBN di wilayah Kepri sampai dengan triwulan III 2024 mencapai 64,20% dari pagu atau sebesar Rp11,13 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2023 yang mencapai 57,08% dari pagu. Peningkatan persentase realisasi terjadi pada pos Belanja

Tabel 2.3 Akumulasi Anggaran dan Realisasi Belanja APBN Wilayah Provinsi Kepri

Uraian	2023 (Miliar Rp)			2024 (Miliar Rp)			Pertumbuhan %
	Pagu	Realisasi Maret 2023	% Realisasi	Target	Realisasi Maret 2024	% Realisasi	
A. Pendapatan Negara	11.510.131.900.000	5.858.631.941.303	50,90%	14.049.517.281.490	6.905.651.897.288	49,15%	17,87%
I. Pajak Dalam Negeri	9.209.341.900.000	4.932.794.725.454	53,56%	11.384.177.288.490	5.322.429.198.352	46,75%	7,90%
1 Pajak Penghasilan	8.528.784.900.000,00	4.392.297.584.454,00	51,50%	10.731.722.018.496	5.106.112.470.540	47,58%	16,25%
2 Pajak Pertambahan Nilai	7.345.276.580.876,00	3.923.584.147.045,00	53,42%	9.413.429.739.496,00	4.629.197.374.188,00	49,18%	17,98%
3 Pajak Bumi dan Bangunan	1.067.442.907.000,00	415.211.519.480,00	38,90%	1.294.615.836.000,00	457.218.466.445,00	35,32%	10,12%
4 Cukai	2.008.551.000,00	726.481.221,00	36,17%	1.543.693.000,00	116.213.907,00	7,53%	-84,00%
5 Pajak Perdagangan Internasional	22.587.295.124,00	9.358.740.000,00	41,43%	22.132.750.000,00	19.580.416.000,00	88,47%	109,22%
6 2 Pajak Perdagangan Internasional	680.557.000.000,00	540.497.141.000,00	79,42%	652.455.269.994,00	216.316.727.812,00	33,15%	-59,98%
II. PNBP	2.300.790.000.000	925.837.215.849	40,24%	2.665.339.993.000	1.583.222.698.936	59,40%	71,00%
1 Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-
2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	-	-	-	-	-	-	-
3 Pendapatan BLU	1.900.391.938.000,00	403.547.502.438,00	21,23%	2.262.275.827.000,00	1.200.921.678.588,00	53,08%	197,59%
4 PNBP Lainnya	400.398.062.000,00	522.289.713.411,00	130,44%	403.064.166.000,00	382.301.020.348,00	94,85%	-26,80%
III. Hibah	-	-	-	-	-	-	-
B. Belanja Negara	19.198.558.600.000	6.530.252.404.781	34,01%	17.646.593.430.000	7.248.331.913.424	41,07%	11,00%
I. Belanja Pemerintah Pusat	9.898.104.898.000	2.939.513.743.540	29,70%	9.603.429.119.000	3.469.657.133.495	36,13%	18,04%
1 Belanja Pegawai	2.072.023.245.000,00	1.046.417.048.992,00	50,50%	2.152.525.871.000,00	1.192.894.293.019	55,42%	14,00%
2 Belanja Barang	4.944.823.485.000,00	1.327.402.573.855,00	26,84%	4.325.793.759.000,00	1.561.282.501.256	36,09%	17,62%
3 Belanja Modal	2.630.221.045.000,00	510.636.999.935,00	19,41%	2.864.361.135.000,00	712.455.589.220	24,87%	39,52%
4 Belanja Bansos	4.594.500.000,00	1.512.600.000,00	32,92%	5.838.300.000,00	3.024.750.000	51,81%	99,97%
5 Belanja Lainnya	246.442.623.000,00	53.544.520.758,00	21,73%	254.910.054.000,00	-	0,00%	-100,00%
II. Transfer ke Daerah (TKD)	9.300.453.702.000	3.590.738.661.241	38,71%	8.043.164.311.000	3.778.674.779.929	46,98%	5,23%
1 Dana Bagi Hasil	2.447.330.067.000,00	497.545.979.840,00	20,33%	1.066.147.627.000,00	378.611.585.790,00	35,51%	-23,90%
2 DAU	4.474.840.183.000,00	2.241.570.898.872,00	50,09%	4.817.396.346.000,00	2.541.631.636.227,00	52,76%	13,39%
3 DAK Fisik	805.939.570.000,00	110.672.450.944,00	13,73%	648.360.942.000,00	51.130.650.389,00	7,89%	-53,80%
4 DAK Non Fisik	1.173.840.361.000,00	569.557.783.869,00	48,52%	1.239.240.345.000,00	624.378.124.923,00	50,38%	9,63%
5 Dana Desa	225.936.058.000,00	139.827.338.216	61,89%	218.840.471.000,00	156.333.492.600,00	71,44%	11,80%
6 Transfer Hibah	5.798.000.000,00	-	0,00%	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Dana Insentif Fiskal	166.769.463.000,00	31.564.209.500	18,93%	53.178.580.000,00	26.589.290.000,00	50,00%	-15,76%
C. SURPLUS/(DEFISIT)	-7.688.426.700.000	-671.620.463.478	8,74%	-3.597.076.148.510	-342.680.016.136	9,53%	-48,98%

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Pemerintah Pusat, yaitu belanja pegawai, barang, modal, dan bansos, yang mencapai 55,51% pada triwulan III 2024, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 51,83%. Selain itu, realisasi belanja yang lebih tinggi juga didorong oleh TKD yang terealisasi sebesar 76,99% dari pagu anggaran, lebih tinggi dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 62,66%. Hal tersebut didorong oleh pertumbuhan realisasi penyaluran dana bagi hasil, DAU, dana alokasi khusus non fisik, dan dana insentif fiskal.

Realisasi anggaran belanja infrastruktur APBN di Kepri telah terserap 50,67% atau Rp922,90 miliar. Belanja untuk proyek pengembangan konektivitas udara terealisasi 75,98% dari total anggaran atau sebesar Rp48,22 miliar, antara lain untuk pekerjaan lanjutan pembangunan terminal kargo armada udara di Kota Batam. Selain itu, realisasi untuk proyek peningkatan konektivitas darat mencapai 57,75% atau Rp644,03 miliar untuk lanjutan kegiatan pelaksanaan pembebasan lahan, pemeliharaan Jalan Toapaya Km. 46, Kab. Bintan,

pembangunan dan reservasi jalan dan jembatan pada kawasan Bintan serta penangan jalan dan jembatan Sp. Sekunyam – Desa Cemaga di Kab. Natuna. Sementara itu, belanja proyek untuk pengembangan konektivitas laut mencapai 33,86% atau Rp135,48 miliar, salah satunya untuk peningkatan Jalan Pelabuhan Parit I di Kab. Karimun. Belanja proyek untuk pembuatan dan pemeliharaan bendungan dan SDA telah terealisasi sebesar Rp95,17 miliar atau 39,25% dari total anggaran.

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Infrastruktur APBN Wilayah Provinsi Kepri

No	Jenis Proyek	Triwulan III 2023			Triwulan III 2024		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Konektivitas Udara	156,19	99,98	64,01%	63,47	48,22	75,98%
2	Konektivitas Laut	352,69	173,91	49,31%	400,10	135,48	33,86%
3	Konektivitas Darat	1.859,35	637,97	34,31%	1.115,22	644,03	57,75%
4	Program Ketahanan Sumber Daya Air	118,03	66,14	56,04%	242,50	95,17	39,25%
Total		2.486,26	978,00	39,34%	1.821,28	922,90	50,67%

Sumber: KFR Triwulan III Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri



BAB III

Perkembangan Inflasi

Provinsi Kepri (yoy)



Tw III
2024

2,53%

Tw II
2024

3,54%

Kota Tanjungpinang (yoy)



Tw III
2024

1,36%

Tw II
2024

2,97%

Kota Batam (yoy)



Tw III
2024

2,76%

Tw II
2024

3,71%

Kab. Karimun (yoy)



Tw III
2024

2,04%

Tw II
2024

2,79%

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2024 menunjukkan terjadinya inflasi sebesar 2,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,54% (yoy). Penurunan tekanan inflasi didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, Kelompok Pendidikan, Kelompok Transportasi, dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki. Dengan demikian, inflasi pada triwulan III 2024 berada pada sekitar titik tengah target inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).



Inflasi Provinsi Kepri tercatat 2,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,54% (yoy). Inflasi yang tercatat lebih rendah tersebut disebabkan oleh penurunan harga pada: (1) Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; (2) Kelompok Pendidikan; (3) Kelompok Transportasi; dan (4) Kelompok Pakaian dan Alas Kaki. Secara spasial, inflasi di Kota Batam mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya dari 3,71% (yoy) menjadi 2,76% (yoy) pada triwulan III 2024. Kondisi yang sama juga terjadi di Kota Tanjungpinang yang mengalami penurunan inflasi dari 2,97% (yoy) menjadi 1,36% (yoy). Selain itu, Kabupaten Karimun juga mencatatkan penurunan inflasi dari 2,79% (yoy) menjadi 2,04% (yoy) pada triwulan III 2024. Pada saat yang sama, inflasi Nasional mengalami penurunan dari 2,51% (yoy) menjadi sebesar 1,84% (yoy) pada triwulan III 2024.

Pada bulan September 2024, secara bulanan IHK Provinsi Kepri tercatat mengalami inflasi sebesar 0,14% (mtm), lebih rendah dibandingkan pada Juni 2024 yang mengalami inflasi sebesar 0,28% (mtm). Inflasi pada September 2024 terutama didorong oleh Kelompok Pendidikan dengan andil sebesar 0,06% (mtm), sejalan dengan kenaikan biaya akademi/ perguruan tinggi yang mengalami penyesuaian seiring dengan tahun ajaran yang baru. Pendorong inflasi juga berasal dari Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,03% (mtm) disebabkan oleh kenaikan harga sewa rumah yang mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan tarif listrik di periode sebelumnya. Inflasi Kelompok Transportasi dengan andil 0,02% (mtm) disebabkan oleh adanya kenaikan peningkatan tarif angkutan udara seiring dengan periode liburan dan peningkatan biaya pengiriman barang.

Tabel 3.1 Inflasi Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kab. Karimun (% yoy)

Kelompok	2022				2023				2024			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Inflasi Nasional	2,64	4,35	5,95	5,51	4,97	3,52	2,28	2,61	3,05	2,51	1,84	
Inflasi Kepri	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53	
Inflasi Tanjungpinang	2,15	5,27	6,12	4,96	4,28	1,78	1,53	2,14	2,68	2,97	1,36	
Inflasi Batam	3,39	5,98	6,87	5,95	4,83	2,75	2,12	2,85	3,56	3,71	2,76	
Inflasi Karimun									2,57	2,79	2,04	

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.2 Penyumbang Inflasi Provinsi Kepri September 2024

No	Komoditas	Kelompok	Andil Inflasi (% mtm)
1	Akademi/ Perguruan Tinggi	Pendidikan	0,06
2	Bayam	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,06
3	Kangkung	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,04
4	Sawi Hijau	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,04
5	Sewa Rumah	Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,02
6	Angkutan Udara	Transportasi	0,02
7	Sigaret Kretek Mesin	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,02
8	Kacang Panjang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,02
9	Buncis	Makanan, Minuman Dan Tembakau	0,02
10	Biaya Pengiriman Barang	Transportasi	0,02

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3.3 Penyumbang Deflasi Provinsi Kepri September 2024

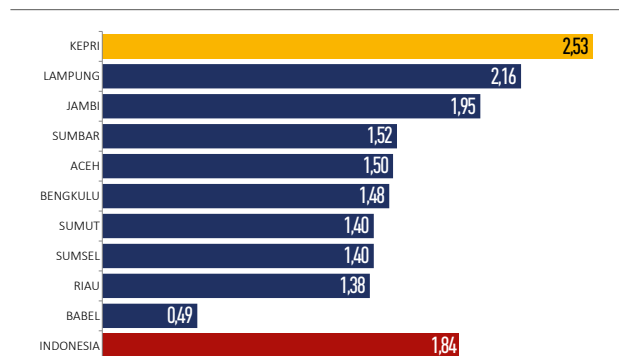
No	Komoditas	Kelompok	Andil Deflasi (% mtm)
1	Cabai Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,13
2	Cabai Rawit	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,05
3	Daging Ayam Ras	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,03
4	Bensin	Transportasi	-0,02
5	Bawang Merah	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,02
6	Kentang	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
7	Ikan Asin Teri	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
8	Cabai Hijau	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
9	Ikan Tongkol/ Ikan Ambu-Ambu	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01
10	Semangka	Makanan, Minuman Dan Tembakau	-0,01

Sumber: BPS (data diolah)

3.1 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

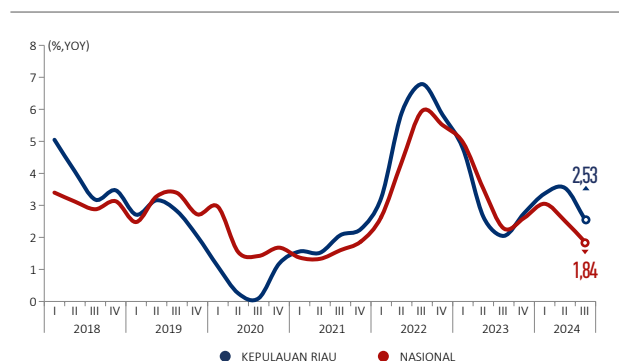
Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 tercatat 2,53% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,54% (yoy). Inflasi Provinsi Kepri tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan lebih dengan inflasi Nasional sebesar 1,84% (yoy). Inflasi Provinsi Kepri tetap terkendali dan berada di sekitar kisaran sasaran inflasi tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 2,5±1% (yoy).

Berdasarkan perkembangan inflasi kelompok barang dan jasa, penurunan tekanan inflasi Provinsi Kepri pada triwulan III 2024



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 3.1 Inflasi Triwulan III 2024 Regional Sumatera (% yoy)



Sumber: BPS (data diolah)

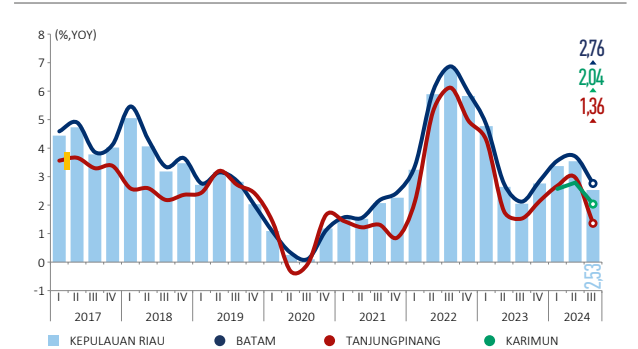
Grafik 3.2 Perkembangan Inflasi Kepulauan Riau, Nasional dan Sumatera Triwulan III 2024 (% yoy)

disebabkan oleh penurunan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil dari sebesar 1,87% (yoy) menjadi 1,00% (yoy). Selanjutnya disusul Kelompok Pendidikan, Kelompok Transportasi, dan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki dengan penurunan andil masing-masing sebesar -0,31%, -0,09%, -0,03%.

Tekanan inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menurun disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas pangan antara lain tomat, ikan selar/ikan tude, udang basah, daun bawang dan daun seledri sejalan dengan membaiknya pasokan untuk komoditas dimaksud. Inflasi yang lebih rendah juga disebabkan oleh penurunan biaya sekolah menengah atas dan pendidikan menengah sejalan dengan program penggratisan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa SMA/SMK dan SLB dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tekanan inflasi juga menurun dari kelompok transportasi yang disebabkan oleh penurunan harga bensin khususnya untuk bensin non subsidi.

3.2 PERKEMBANGAN INFLASI MENURUT KOTA

Secara spasial, tiga Kota/Kabupaten IHK di Provinsi Kepri yakni Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun pada triwulan III 2024 mencatatkan inflasi dengan tren yang menurun. Inflasi Kota Batam tercatat sebesar 2,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,71% (yoy). Begitu pula inflasi Kota Tanjungpinang yang mengalami penurunan dari 2,97% (yoy) menjadi sebesar 1,36% (yoy). Sementara itu, Kab. Karimun mencatat inflasi yang lebih rendah sebesar 2,04% (yoy), dibandingkan inflasi pada triwulan II 2024 sebesar 2,79% (yoy). Dengan demikian, inflasi di Provinsi Kepri tercatat sebesar 2,53% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 3,54% (yoy).



Grafik 3.3 Perkembangan Inflasi Tahunan Kepulauan Riau, Batam, Tanjungpinang, dan Karimun (% yoy)

3.2.1 Inflasi Kota Batam

Kota Batam pada triwulan III 2024 mengalami inflasi sebesar 2,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,71% (yoy). Inflasi di Kota Batam pada triwulan III 2024 yang lebih rendah tersebut disebabkan oleh andil inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat memiliki andil yang menurun sebesar -0,92%. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan harga cabai merah, tomat, dan udang basah. Selain itu, tekanan inflasi menurun pada Kelompok Pendidikan dengan penurunan andil sebesar -0,30% seiring program penggratisan biaya SPP untuk SMA/SMK dan SLB. Selanjutnya, penurunan andil inflasi pada Kelompok Transportasi sebesar -0,08% seiring dengan menurunnya harga bahan bakar bensin dan solar.

3.2.2 Inflasi Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang pada triwulan III 2024 mengalami inflasi sebesar 1,36% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,97% (yoy). Tekanan inflasi yang lebih rendah tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan andil inflasi pada Kelompok Makanan,

Tabel 3.4 Inflasi Tahunan Kepulauan Riau Menurut Kelompok Barang dan Jasa (% , yoy)

No	Kelompok	2022								2023								2024					
		I		II		III		IV		I		II		III		IV		I		II		III	
		Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi	Andil	Inflasi
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1,45	5,02	3,54	12,31	2,88	9,95	2,17	7,39	1,91	6,49	0,37	1,20	0,93	3,12	1,61	5,40	1,87	6,38	1,87	6,48	1,00	3,46
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,16	2,88	0,13	2,44	0,08	1,36	0,08	1,43	0,12	2,18	0,14	2,70	0,21	3,92	0,20	3,87	0,16	3,35	0,15	3,26	0,12	2,51
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,17	0,93	0,20	1,10	0,27	1,52	0,36	2,04	0,41	2,37	0,38	2,26	0,35	2,08	0,25	1,50	0,16	0,98	0,14	0,90	0,39	2,42
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,23	4,70	0,25	5,05	0,27	5,36	0,24	4,94	0,13	2,64	0,09	1,75	0,04	0,77	0,03	0,69	0,01	0,23	-0,02	-0,41	0,00	0,10
5	Kesehatan	0,02	1,03	0,02	0,77	0,01	0,56	0,01	0,31	0,00	0,25	0,01	0,54	0,01	0,45	0,01	0,35	0,09	3,53	0,09	3,45	0,09	3,62
6	Transportasi	0,41	3,42	0,87	7,24	2,33	19,69	2,05	16,93	1,47	12,24	1,16	9,49	-0,02	-0,18	0,12	0,87	0,60	4,33	0,56	4,04	0,47	3,39
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,22	-0,33	-0,02	-0,25	-0,02	-0,39	-0,02	-0,30	0,01	0,13	0,00	0,03	0,01	0,22	0,02	0,27	0,00	-0,02	0,00	-0,05	0,00	-0,04
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,02	1,03	0,04	1,90	0,05	2,15	0,05	2,21	0,05	2,28	0,01	0,61	0,02	0,75	0,01	0,73	-0,01	-0,35	0,00	-0,09	0,00	-0,14
9	Pendidikan	0,11	1,80	0,11	1,80	0,17	2,77	0,17	2,76	0,17	2,82	0,16	2,82	0,16	2,80	0,16	2,80	0,17	2,49	0,17	2,49	-0,13	-1,92
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,31	3,76	0,42	5,20	0,44	5,40	0,31	3,81	0,17	2,03	0,04	0,43	0,05	0,63	0,05	0,66	0,10	1,03	0,18	1,86	0,14	1,51
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,39	5,95	0,33	4,94	0,32	4,88	0,41	6,32	0,33	4,89	0,28	4,24	0,30	4,63	0,30	4,52	0,26	4,34	0,40	6,66	0,45	7,50
Umum		3,24		5,89		6,79		5,83		4,77		2,64		2,05		2,76		3,37		3,54		2,53	

Sumber: BPS (data diolah)

Minuman dan Tembakau yang tercatat sebesar -1,01% seiring penurunan harga cabai merah, ikan selar/ikan tude, tomat, daging ayam ras, dan cabai rawit. Selain itu, tekanan inflasi menurun pada Kelompok Pendidikan dengan penurunan andil sebesar -0,29% seiring dengan program penggratiskan biaya SPP untuk SMA/SMK dan SLB. Selanjutnya, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan penurunan andil -0,23% seiring dengan penurunan harga bahan makanan seperti es, mie, bakso siap santap, teh siap saji, dan lainnya.

3.2.3 Inflasi Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun pada triwulan III 2024 mengalami inflasi sebesar 2,04% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi pada triwulan sebelumnya sebesar 2,79% (yoy). Tekanan inflasi yang menurun tersebut disebabkan oleh penurunan andil inflasi Kelompok Pendidikan sebesar -0,34% seiring dengan program penggratiskan biaya SPP untuk SMA/SMK dan SLB. Selain itu, penurunan inflasi lebih lanjut disebabkan oleh menurunnya harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat mengalami penurunan andil sebesar -0,27% seiring dengan penurunan harga cabai merah, ikan mata besar, telur ayam ras, ikan layur, dan tomat. Selanjutnya, Kelompok Transportasi mengalami penurunan andil sebesar 0,25% seiring dengan penurunan harga bahan bakar bensin dan solar.

3.3 ARAH PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Provinsi Kepri pada triwulan IV 2024 diperkirakan masih berada pada rentang kisaran sasaran inflasi 2024 yakni $2,5 \pm 1\%$, mempertimbangkan perkembangan sejumlah indikator harga. Tekanan inflasi pada triwulan IV 2024 diperkirakan mengalami sedikit penurunan seiring dengan penurunan harga pada kelompok menurun pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau seiring dengan penurunan harga impor terutama komoditas pangan.

Berdasarkan realisasi inflasi pada bulan Oktober 2024, Provinsi Kepri mengalami inflasi 0,06% (mtm), menurun dibandingkan September 2024 yang mengalami inflasi 0,14% (mtm). Inflasi pada Oktober 2024 terutama disebabkan oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil sebesar 0,09% (mtm), sejalan dengan meningkatnya harga emas perhiasan seiring dengan kenaikan harga emas global. Penyebab inflasi juga berasal dari Kelompok Transportasi juga memberikan andil sebesar 0,05% (mtm) terutama disumbang oleh kenaikan tarif angkutan laut. Selain itu, Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar 0,03% (mtm) didorong oleh kenaikan harga sewa rumah.

3.4 UPAYA PENGENDALIAN INFLASI

Sinergi antar instansi dan lembaga dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus ditingkatkan dan diperkuat sebagai upaya pengendalian inflasi di tengah peningkatan tekanan inflasi global dan dinamika pasokan domestik. Berbagai upaya dilakukan dalam kerangka 4K yaitu, memastikan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian yang telah dilakukan pada triwulan III 2024 antara lain:

A. Keterjangkauan Harga

1. Mengoptimalkan Gerai Pangan dan Koperasi mitra TPID untuk penjualan hasil panen petani seperti cabai merah dan sayuran, serta hasil ikan.
2. Penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), digitalisasi dan data pangan melalui pengembangan aplikasi *dashboard* pemantauan indikator inflasi terintegrasi.
3. Melaksanakan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di berbagai titik di seluruh Kab/Kota di wilayah Kepri, penyelenggaraan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah sebanyak 144 kali pasar murah sejak awal tahun.

Tabel 3.5 Andil Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa di Kota Penghitungan IHK (% - yoy)

Periode	I-2023		II-2023		III-2023		IV-2023		I-2024			II-2024			III-2024		
Kelompok Komoditas	Batam	Tj. Pinang	Batam	Tj. Pinang	Batam	Tj. Pinang	Batam	Tj. Pinang	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun	Batam	Tj. Pinang	Karimun
Makanan, Minuman dan Tembakau	1,93	1,72	0,44	-0,15	0,98	0,53	2,74	1,19	1,98	1,56	1,47	1,88	1,79	1,86	0,97	0,77	1,59
Pakaian dan Alas Kaki	0,13	0,02	0,16	0,01	0,24	-0,03	0,16	0,02	0,18	-0,02	0,23	0,20	-0,18	0,23	0,16	-0,16	0,12
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan bakar	0,42	0,37	0,39	0,37	0,37	0,18	0,44	0,03	0,19	0,03	0,01	0,18	-0,01	0,01	0,51	-0,01	-0,14
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,15	0,04	0,10	0,02	0,04	0,04	0,19	0,04	0,00	0,04	0,01	-0,02	0,03	-0,04	0,00	0,04	-0,02
Kesehatan	0,00	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,07	0,14	0,17	0,07	0,14	0,15	0,07	0,15	0,19
Transportasi	1,46	1,52	1,16	1,12	-0,06	0,27	1,57	0,25	0,72	0,28	-0,01	0,65	0,36	0,01	0,57	0,16	0,04
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,01	-0,02	0,01	-0,02	0,02	-0,02	0,01	-0,01	0,00	-0,01	-0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	-0,01	-0,02
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,05	0,05	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,05	-0,01	-0,01	0,00	0,02	-0,01	0,00	0,03	-0,01	0,02	0,01
Pendidikan	0,17	0,15	0,17	0,15	0,17	0,15	0,17	0,15	0,19	0,15	0,00	0,19	0,15	0,00	-0,11	-0,14	-0,34
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,16	0,24	0,02	0,13	0,02	0,24	0,16	0,27	0,03	0,30	0,49	0,13	0,39	0,31	0,11	0,16	0,41
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,35	0,16	0,30	0,13	0,32	0,16	0,44	0,20	0,27	0,24	0,25	0,43	0,31	0,25	0,49	0,37	0,19
Umum	4,83	4,28	2,75	1,78	2,12	1,53	2,85	2,14	3,56	2,68	2,57	3,71	2,97	2,79	2,76	1,36	2,04

Sumber: BPS (data diolah)

B. Ketersediaan Pasokan

1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan dan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Kepri bersama Ombudsman RI, Bapanas RI, Bulog, dan OPD Kepri. Selain itu juga dilakukan FGD terkait dengan optimalisasi bantuan pangan serta pengaruh bantuan pangan terhadap pengendalian inflasi di Provinsi Kepri
2. Pelaksanaan Serentak Gerakan Sekolah Menanam (GSM) Cabai di 100 SMA/SMK se-Kepri sebanyak 25.000 bibit.
3. Pelaksanaan panen cabai merah keriting serentak 100 sekolah dalam rangka Gerakan Sekolah Menanam (GSM) dengan total lebih dari 500kg.
4. Penyaluran bantuan sarpras untuk Kedai Pangan TPID Kabupaten Karimun kepada BUMD Kabupaten Karimun.
5. Fasilitasi korporatisasi pembentukan Asosiasi Petani Cabai Kabupaten Bintan bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan.
6. Penyiapan lahan pada lokasi pembangunan *greenhouse* komoditas cabai merah seluas 500 m² dengan kapasitas 2.000 pohon di Koperasi Tata Reksa Tani Manunggal Kota Batam.
7. Pembuatan *demplot* cabai merah dengan *greenhouse* di Kota Batam, Kab. Bintan, dan Kab. Natuna dengan dukungan pupuk organik bekerja sama dengan pembudidaya magot, serta monitoring budidaya dan perluasan lahan cabai merah.

C. Kelancaran Distribusi

1. Mengoptimalkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara lain melalui penguatan peran BUMD dalam pengendalian inflasi dengan mendatangkan cabai dari Sulawesi Utara.
2. Memastikan kelancaran transportasi laut dan melakukan pemantauan agar tidak terjadi spekulasi harga angkutan laut
3. Dukungan prioritas bongkar muat kapal angkutan bahan pokok dan penjaminan sertifikasi komoditas pangan yang masuk ke wilayah Kepri.
4. Melaksanakan *business matching* antara distributor di Kepri dengan produsen di daerah lain

D. Komunikasi Efektif

1. Melaksanakan koordinasi dan sinergi melalui kegiatan data *High Level Meeting (HLM)* TPID Provinsi/Kota/Kab.
2. Melakukan pengendalian ekspektasi masyarakat dengan mendiseminasikan kecukupan pasokan, kewajaran harga serta mengampanyekan Himbauan Belanja Bijak melalui TV, radio, media sosial, dan *flyer* selama periode Ramadan dan HBKN Idulfitri.
3. *Launching* Buku Resep Olahan Cabai Kering Pada Khazanah Masakan Melayu oleh Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dalam rangka program unggulan GNPIP meningkatkan konsumsi produk olahan dan diversifikasi pangan.
4. Melaksanakan *Capacity Building* TPID Kab. Karimun dengan mengundang Kemenko Perekonomian sebagai narasumber serta melakukan kunjungan lapangan ke sentra cabai Kundur dan lokasi yang berpengaruh dalam pengendalian inflasi Kab. Karimun.
5. Melaksanakan *Capacity Building* Klaster Pertanian di Kepri untuk budidaya cabai dan perluasan potensi jaringan Kerjasama Antar Daerah (KAD).

Sejumlah strategi telah dan akan dilakukan oleh TPID sesuai arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dalam menghadapi berbagai tantangan inflasi ke depan. Pengendalian inflasi pangan dengan implementasi 7 (tujuh) program unggulan GNPIP dengan menghasilkan inovasi pemanfaatan IoT pada budidaya hidroponik, integrasi data pertanian, dan kelas digital (*smart agriculture*) kepada petani untuk memperluas edukasi budidaya tanaman pangan. Selain itu, penguatan pasokan melalui pembentukan *command center* KAD yang bertindak sebagai pusat informasi dan kebijakan terkait dengan kebutuhan daerah surplus dan defisit. Dalam penguatan KAD tersebut, integrasi data stok dan neraca pangan antar daerah akan dilakukan untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih optimal. Penguatan KAD tersebut juga akan didukung oleh penguatan infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.

BAB IV

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan Dan UMKM

Asset* (yoy)



Tw III
2024

14,73%
Rp103,72 T



Tw II
2024

16,84%
Rp100,45T

Kredit* (yoy)



Tw III
2024

-1,42%
Rp46,81 T



Tw II
2024

11,14%
Rp51,19 T

Kredit** (yoy)



Tw III
2024

5,07%
Rp73,69 T



Tw II
2024

8,54%
Rp73,08T

Dana* (yoy)



Tw III
2024

17,43%
Rp90,74 T



Tw II
2024

20,44%
Rp86,84 T

LDR*



Tw III
2024

51,59%



Tw II
2024

58,94%

NPL*



Tw III
2024

3,29%



Tw II
2024

3,28%

UMKM



Tw III
2024

14,89%
Rp14,30 T



Tw II
2024

13,78%
Rp13,71 T

* dari bank yang berlokasi di Kepri,

** kepada proyek yang berlokasi di Kepri

Intermediasi perbankan pada triwulan III 2024 tetap terjaga meskipun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya. Deselerasi tersebut tecermin dari penurunan laju penyaluran kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK), namun tetap disertai dengan terjaganya kualitas kredit yang tercermin dari risiko kredit pada segmen korporasi dan segmen kredit sektor rumah tangga, sementara risiko kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meningkat.



Kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan III 2024 mengalami perlambatan, tercermin dari penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank yang ada di Kepri dan jumlah DPK yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit perbankan berdasarkan bank yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 9,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 yang tumbuh sebesar 11,14% (yoy). Selain itu, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Kepri tumbuh sebesar 17,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,44% (yoy). Sementara, total Aset tercatat tumbuh sebesar 14,73% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 16,84% (yoy). Selain itu, penyaluran kredit perbankan berdasarkan proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri tercatat sebesar 5,07% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 8,54% (yoy).

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri tetap terjaga. Loan to Deposit Ratio (LDR) Kepri pada triwulan III 2024 mengalami penurunan menjadi 57,26%, setelah triwulan sebelumnya tercatat sebesar 58,94% pada triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga dengan rasio NPL gross yang tercatat sebesar 3,29%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,28%. Meskipun terdapat kenaikan kecil, namun angka tersebut masih menunjukkan risiko penyaluran kredit di Kepri tetap terjaga dengan baik.

Kinerja penyaluran kredit UMKM tumbuh positif dengan risiko kredit yang tetap terjaga. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 14,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,78% (yoy). Peningkatan kinerja penyaluran kredit pada sektor UMKM bersumber dari Lapangan Usaha (LU) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, LU Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan, serta LU Industri Pengolahan yang masing-masing tumbuh 59,68% (yoy); 16,10% (yoy); dan 11,76% (yoy). LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi dan LU Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat masing-masing tumbuh sebesar 12,15% (yoy) dan 5,34% (yoy). Sementara, LU Industri Pengolahan tumbuh lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,21% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit UMKM mengalami peningkatan rasio NPL kredit UMKM sebesar 2,82% dari 2,39% pada triwulan sebelumnya.

4.1 PERKEMBANGAN KONDISI PERBANKAN PROVINSI KEPRI

Penyaluran kredit perbankan untuk proyek yang berlokasi di Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 5,07% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan II 2024 yang tumbuh sebesar 8,54% (yoy). Penurunan kredit lokasi proyek terutama disebabkan oleh penurunan penyaluran kredit pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Real Estate, Sewaan, dan Jasa PT. Berdasarkan jenis penggunaan, perlambatan laju penyaluran kredit disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan pada kredit investasi.

Selanjutnya, aset perbankan tumbuh positif sebesar 14,73% (yoy), termoderasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,84% (yoy). Di samping itu, DPK tumbuh sebesar 17,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,44% (yoy). Deselerasi tersebut terutama terjadi pada giro dan deposito, sedangkan tabungan tumbuh terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memilih instrumen yang lebih likuid seperti tabungan. Pada triwulan III 2024, kemampuan pelaku usaha dalam membayar angsuran kredit tetap terjaga, meskipun perlu diwaspadai adanya sedikit kenaikan pada tingkat kredit bermasalah (rasio NPL gross) dari 3,28% pada triwulan sebelumnya menjadi 3,29%.

4.1.1 Perkembangan Aset Perbankan

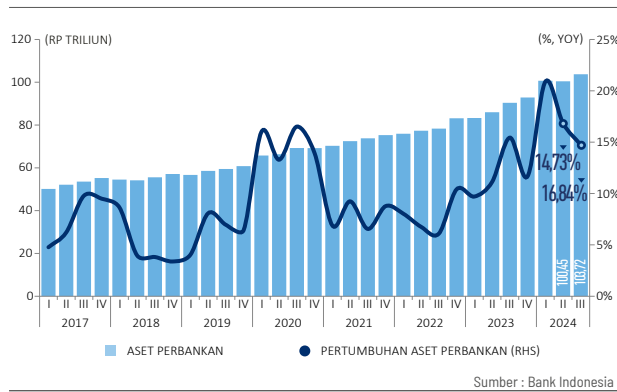
Aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 berjumlah Rp103,72 triliun atau tumbuh 14,73% (yoy), termoderasi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 16,84% (yoy). Pertumbuhan aset bersumber dari kelompok BPD yang tumbuh sebesar 10,16% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,83% (yoy). Aset Bank Persero dan Bank Swasta termoderasi masing-masing menjadi 19,67% dan 10,51% dari sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 20,73% dan 14,41%. Sementara itu, aset perbankan dari kelompok Bank Asing dan Campuran berkontraksi lebih dalam sebesar 44,34% (yoy). Secara keseluruhan, struktur aset perbankan di Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 tercatat didominasi oleh kelompok Bank Persero yakni sebesar 48,49%, diikuti oleh Bank Swasta Nasional (45,47%), BPD (6,03%) serta Bank Asing dan Campuran (0,01%).

Tabel 4.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan Kepri

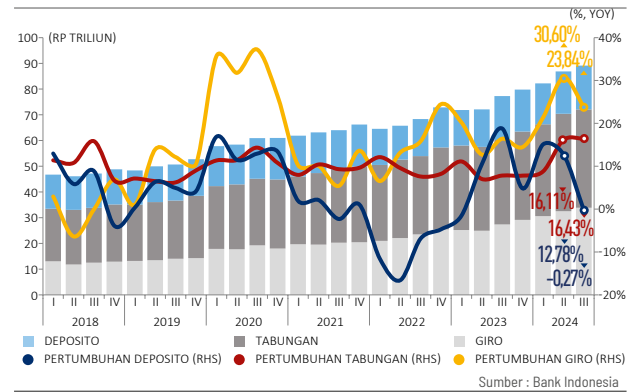
	2021 (Rp Triliun)				2022 (Rp Triliun)				2023 (Rp Triliun)				2024 (Rp Triliun)			Pertumbuhan (%, YoY)		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	Tw I 2024	Tw II 2024	Tw III 2024
Total Aset*	70,28	72,47	73,82	75,31	75,92	77,37	78,31	83,14	83,29	85,97	90,40	92,85	100,68	100,45	103,72	20,88%	16,84%	14,73%
Total Dana*	61,88	63,16	64,03	66,21	64,53	65,77	68,33	72,87	71,84	72,11	77,27	79,80	82,20	86,84	89,14	14,41%	20,44%	15,36%
Total Kredit*	37,63	37,97	38,44	40,15	39,94	41,52	42,98	44,88	45,16	46,06	47,49	48,26	48,61	51,19	51,96	7,64%	11,14%	9,42%
Total Kredit**	53,33	58,01	56,44	59,69	59,35	61,92	63,13	64,86	65,81	67,33	70,13	71,51	71,72	73,08	73,69	8,98%	8,54%	5,07%
NPL*	4,18%	3,71%	3,63%	2,98%	2,97%	2,90%	3,41%	1,91%	2,14%	2,29%	4,33%	3,88%	3,73%	3,28%	3,29%	-	-	-
LDR*	60,81%	60,11%	60,03%	60,63%	61,89%	63,13%	62,91%	61,58%	62,86%	63,87%	61,46%	60,48%	59,14%	58,94%	58,29%	-	-	-

Sumber: Bank Indonesia

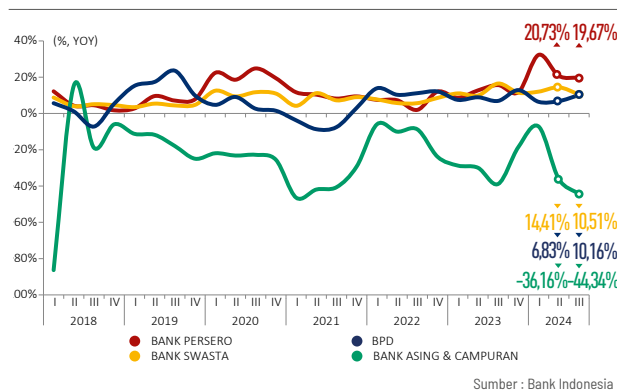
*) dari bank yang berlokasi di Kepri,
**) kepada proyek yang berlokasi di Kepri



Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan



Grafik 4.4 DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan



Grafik 4.2 Pertumbuhan Aset Berdasarkan Kelompok Bank

4.1.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan

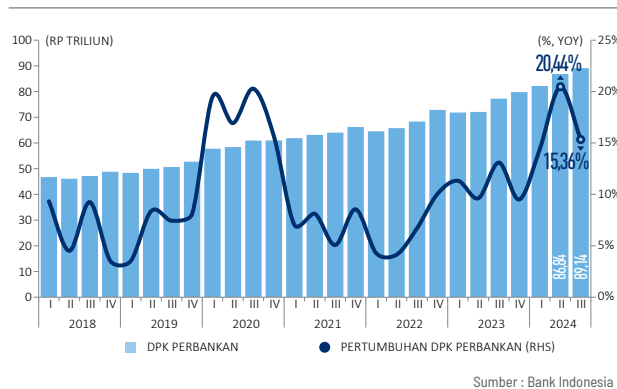
Pada triwulan III 2024, total DPK di Kepri berjumlah Rp90,74 triliun atau tumbuh 17,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 20,44% (yoy) atau berjumlah Rp86,84 triliun. Penurunan tersebut bersumber dari giro dan deposito yang masing-masing termoderasi sebesar 23,84% (yoy) dan -0,27% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II yang masing-masing tumbuh sebesar 30,60% (yoy) dan 12,78% (yoy). Sementara, tabungan mengalami peningkatan dari 16,11% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 18,19% (yoy). Hal ini menunjukkan preferensi simpanan

masyarakat pada instrumen yang lebih likuid meningkat. Struktur DPK pada triwulan III 2024 masih didominasi tabungan dengan pangsa 42,88%, diikuti giro 38,00% dan deposito 19,12%. Penempatan dana yang tinggi pada instrumen simpanan jangka pendek (giro dan tabungan) mengindikasikan masih rendahnya preferensi masyarakat untuk menjadikan simpanan bank sebagai instrumen investasi.

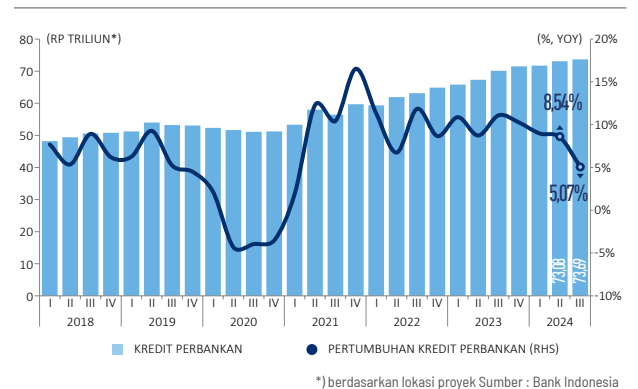
4.1.3 Perkembangan Kredit Perbankan

Jumlah penyaluran kredit (berdasarkan lokasi proyek) di wilayah Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 sebesar Rp73,69 triliun atau tumbuh 5,07% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,54% (yoy). Penurunan terutama bersumber dari kredit investasi yang tercatat 4,98% (yoy) pada triwulan III 2024, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,89% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit modal kerja meningkat dari 0,94% (yoy) menjadi sebesar 1,17% (yoy). Disisi lain, kredit konsumsi tumbuh sebesar 9,31% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,28% (yoy). Secara keseluruhan, struktur kredit pada triwulan III 2024 didominasi oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 33,90%, diikuti oleh kredit konsumsi 33,34% dan kredit modal kerja sebesar 32,76%.

Pada triwulan III 2024, rata-rata tingkat suku bunga kredit perbankan di Provinsi Kepri tercatat 8,74%, lebih rendah dibandingkan triwulan

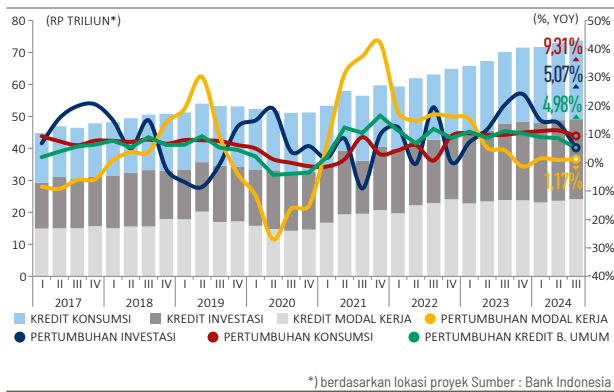


Grafik 4.3 Perkembangan DPK Perbankan



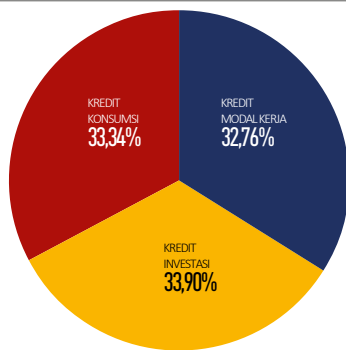
Grafik 4.5 Perkembangan Kredit Perbankan

*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

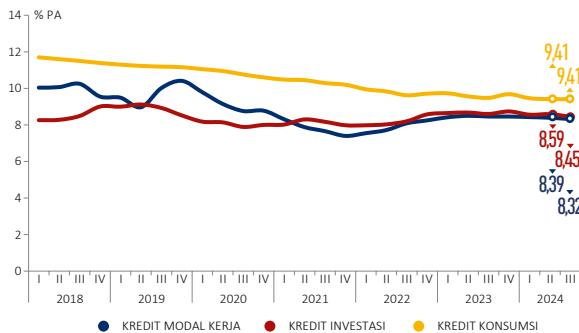


Grafik 4.6 Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan

sebelumnya yang sebesar 8,80%. Pada triwulan III 2024, stance kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia dengan suku bunga acuan BI-Rate turun 25 basis poin pada level 6,00%. Meskipun demikian Bank Indonesia tetap menjaga transmisi kebijakan yang *pro growth* dan *pro market* direspon dengan penurunan suku bunga kredit untuk mendukung penyaluran pembiayaan di sektor strategis. Penurunan suku bunga terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi yang tercatat masing-masing sebesar 8,32% dan 8,45%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 8,39% dan 8,59%. Di samping itu, perkembangan suku bunga simpanan (DPK) pada tabungan, giro, dan deposito cenderung



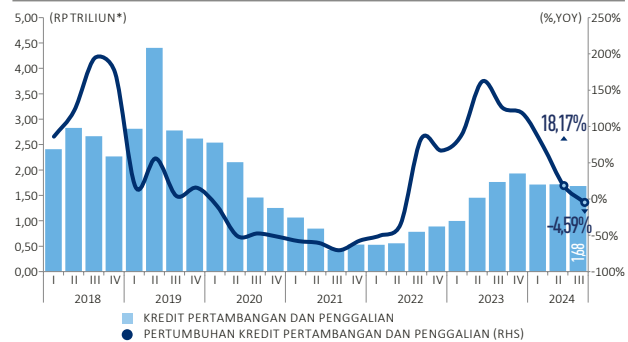
Grafik 4.7 Porsi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan



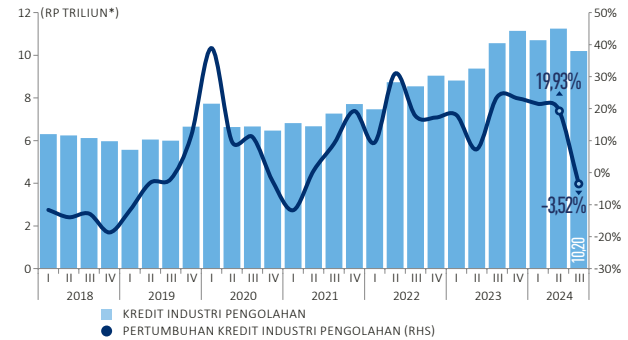
Grafik 4.8 Perkembangan Suku Bunga Kredit

meningkat. Rata-rata suku bunga tabungan, giro, dan deposito pada triwulan berjalan masing-masing tercatat sebesar 0,60%, 2,01% dan 4,32%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 0,58%, 2,01% dan 4,24%.

Secara sektoral, melambatnya penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek bersumber dari LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Real Estate, Sewaan, dan Jasa PT. Melambatnya pertumbuhan kredit pada LU tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan PDRB pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Pertambangan dan Penggalian, serta pertumbuhan LU Industri Pengolahan yang tidak seoptimis prakiraan sebelumnya. LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan dan Penggalian, dan LU Real Estate, Sewaan, dan Jasa PT tercatat masing-masing berkontraksi sebesar 3,52% (yoy), 4,59% (yoy), dan 13,75% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 19,93% (yoy), 18,17% (yoy), dan -13,28% (yoy). Selain itu, LU Perdagangan Besar dan Eceran mengalami penurunan menjadi sebesar 4,44% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,67% (yoy). Sementara itu, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh kredit LU Listrik, Gas, dan Air yang tumbuh 25,06% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,64% (yoy) sejalan dengan meningkatnya aktivitas industri pengolahan sehingga permintaan terhadap penggunaan listrik, gas, dan air meningkat.



Grafik 4.9 Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian



Grafik 4.10 Kredit Sektor Industri Pengolahan

Tabel 4.2 Penyaluran Kredit (Spasial)

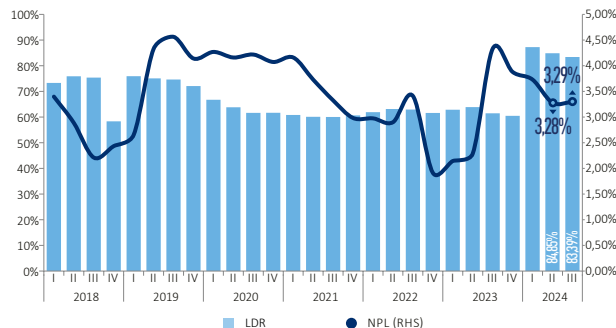
Kabupaten/Kota	Triwulan III 2024	
	Kredit (Rp Triliun*)	Porsi (%)
Batam	55,61	77,01%
Tanjungpinang	7,42	10,37%
Karimun	4,01	5,61%
Lingga	0,69	0,96%
Natuna	2,64	3,69%
Bintan	3,64	5,09%
Kep. Anambas	0,33	0,47%
Kepulauan Riau	74,34	103,00%

Sumber: Bank Indonesia
*)Berdasarkan lokasi proyek

Secara spasial, penyaluran kredit di wilayah Provinsi Kepri masih terkonsentrasi di Kota Batam dengan jumlah kredit pada triwulan III 2024 sebesar Rp55,61 triliun dengan pangsa 77,01% dari total kredit di Provinsi Kepri. Kondisi tersebut sejalan dengan peran Kota Batam sebagai pusat ekonomi di Provinsi Kepri yang memiliki pangsa > 60% dalam PDRB Kepri. Penyaluran kredit terbesar kedua berlokasi di Kota Tanjungpinang dengan pangsa 10,37% dari total kredit atau sebesar Rp7,42 triliun, diikuti Kabupaten Karimun dengan pangsa 5,61% dari total kredit atau sebesar Rp4,01 triliun.

4.1.4 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan

Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Kepri yang tercermin dari rasio LDR berdasarkan lokasi proyek pada triwulan III 2024 mengalami penurunan menjadi 81,92%, setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 84,85%. Penurunan rasio tersebut didukung oleh penyaluran kredit yang masih terjaga di tengah kondisi perekonomian yang membaik. Penyaluran kredit yang terjaga turut didukung oleh kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana rasio NPL gross yang tercatat meningkat dari 3,28% menjadi sebesar 3,29%. Angka NPL ini juga mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian kredit nasabah di Kepri masih dalam batasan risiko aman, di bawah plafon yang ditetapkan 5%.



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.11 Intermediasi dan Risiko Kredit Perbankan Kepri

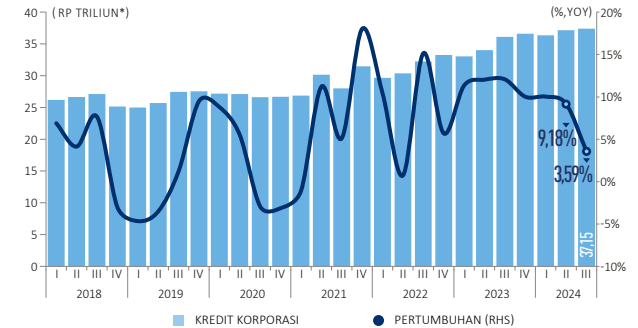
4.2 ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH SERTA PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Pembiayaan pada sektor korporasi dan rumah tangga juga tetap terjaga sejalan dengan pemulihan ekonomi di daerah yang terus berlangsung. Momentum tersebut juga didukung oleh kebijakan keterbukaan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang mendorong penurunan suku bunga kredit. Pada triwulan III terjadi penurunan kinerja kredit sektor korporasi. Sementara itu kredit sektor rumah tangga masih tetap tumbuh positif. Selain itu, penyaluran kredit di UMKM mengalami perbaikan disertai dengan risiko kredit yang tetap terjaga sejalan dengan peningkatan kemampuan bayar pelaku usaha.

4.2.1 Ketahanan Sektor Korporasi

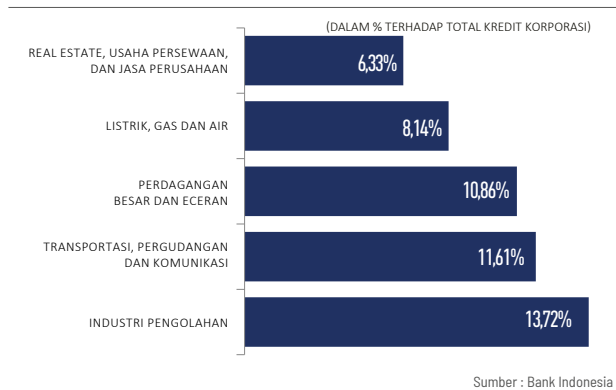
Kinerja penyaluran kredit ke sektor korporasi mengalami penurunan pada triwulan III 2024. Penyaluran kredit korporasi (lokasi proyek) berjumlah Rp37,41 triliun atau melandai 3,59% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,18% (yoy). Di samping itu, risiko kredit korporasi meningkat ditandai dengan meningkatnya NPL kredit korporasi menjadi 5,02%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 4,93%. Kualitas penyaluran kredit korporasi berdasarkan jenis kredit masih terjaga, tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang masih berada di bawah 5% yakni sebesar 1,60%, menurun dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,61%.

Pangsa penyaluran kredit ke sektor korporasi didominasi oleh LU Industri Pengolahan dengan pangsa sebesar 13,72% dari total kredit yang disalurkan kepada korporasi berdasarkan lapangan usaha. Pangsa penyaluran kredit selanjutnya diikuti oleh LU Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi (11,61%), LU Perdagangan Besar dan Eceran (10,86%), LU Listrik, Gas, dan Air (8,14%) serta LU Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan (6,33%). Sementara, pangsa LU lainnya pada triwulan III 2024 masih < 6%.



*) berdasarkan lokasi proyek Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.12 Perkembangan Kredit Korporasi

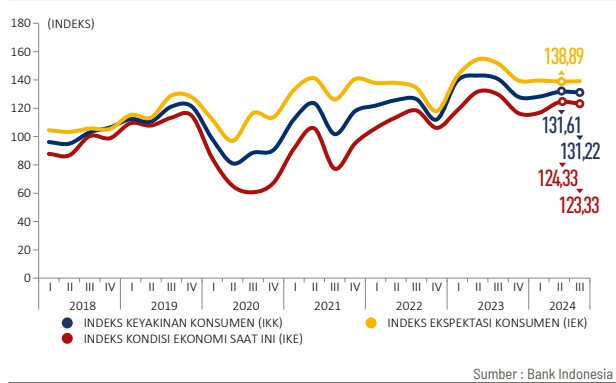


Grafik 4.13 Pangsa Kredit Korporasi (5 LU Terbesar)

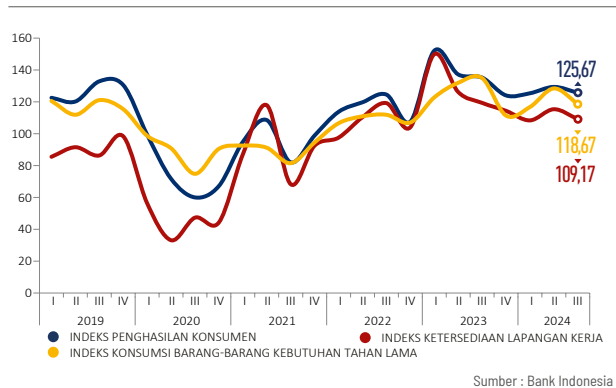
4.2.2 Ketahanan Sektor Rumah Tangga

Ketahanan sektor rumah tangga mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit rumah tangga dan tingkat konsumsi rumah tangga. Indeks Penghasilan Konsumen tercatat mengalami penurunan pada triwulan III 2024 sebesar 125,67 dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 129,33. Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan tingkat keyakinan yang masih terjaga optimis sebesar 124,12 (>100).

Di tengah tingkat keyakinan konsumen yang masih terjaga di level optimis, penyaluran kredit rumah tangga mengalami peningkatan.



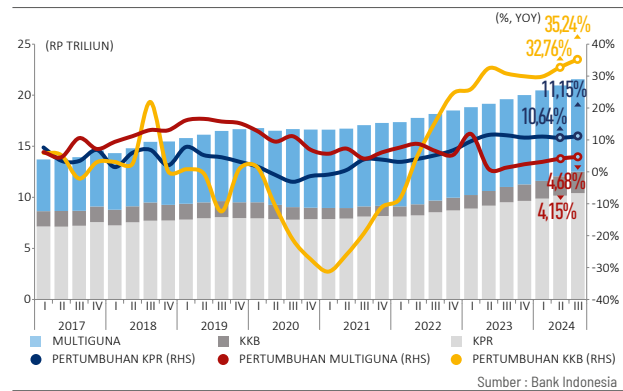
Grafik 4.14 Survei Ekspektasi Konsumen



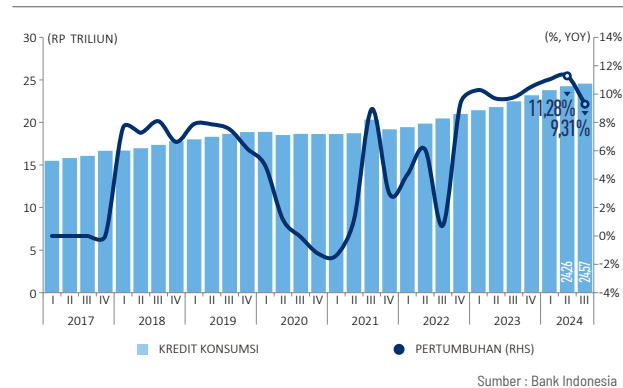
Grafik 4.15 Survei Indeks Penghasilan Konsumen

Kredit rumah tangga tumbuh sebesar 13,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,35% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ini terjadi pada seluruh komponen kredit mencakup Kredit Perumahan Rakyat (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit multiguna yang pada triwulan III 2024 tumbuh masing-masing sebesar 11,15% (yoy), 35,24% (yoy), dan 4,68% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,64% (yoy), 32,76% (yoy), dan 4,15% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit konsumsi tercatat mengalami penurunan sebesar 9,31% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 11,28% (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa preferensi rumah tangga untuk mengambil kredit lebih mengarah pada pembelian aset seperti pembelian kendaraan bermotor. Sementara penggunaan kredit untuk pembelian barang konsumsi menurun di tengah dinamika ketidakpastian global yang tinggi pada triwulan III.

Jumlah DPK milik perseorangan pada triwulan III 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,91% (yoy), melandai dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,32% (yoy). Deselerasi pertumbuhan DPK perseorangan terjadi terutama karena giro yang berkontraksi lebih dalam dari 22,08% menjadi 23,11% dan deposito yang mengalami penurunan dari 9,06% (yoy) berkontraksi menjadi -0,65% (yoy) pada triwulan III. Di samping itu, tabungan mengalami peningkatan dari 8,69% menjadi 9,83% pada triwulan III. Pertumbuhan DPK yang secara umum melandai mengindikasikan kebutuhan likuiditas yang meningkat pada triwulan III dan upaya



Grafik 4.16 Kredit Rumah Tangga

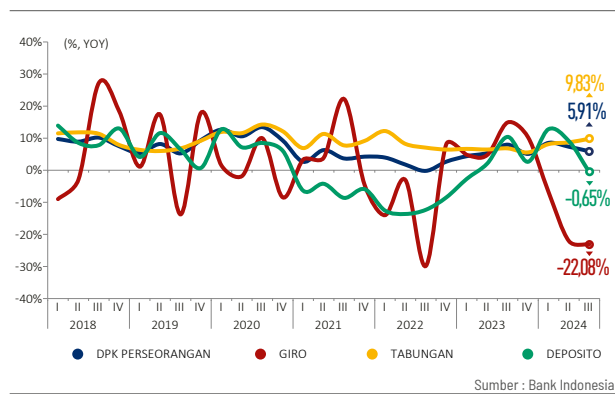


Grafik 4.17 Kredit Konsumsi

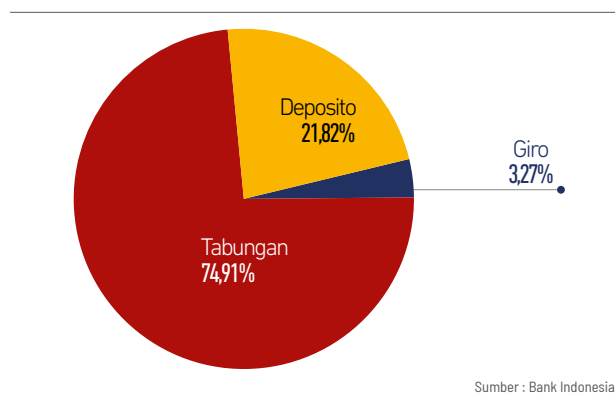
masyarakat untuk mempertahankan daya beli di tengah meningkatnya tarif kelompok perguruan tinggi sejalan dengan masuknya tahun ajaran baru di triwulan III-2024. Dengan perkembangan tersebut, struktur DPK perseorangan masih didominasi jenis tabungan dengan pangsa 74,91%, diikuti deposito 21,82% dan giro 3,27%. Tingginya pangsa tabungan terhadap total DPK perseorangan menunjukkan kecenderungan preferensi masyarakat untuk menyimpan dana pada instrumen yang lebih likuid.

Dari sisi risiko kredit, NPL kredit rumah tangga pada triwulan III 2024 tercatat menurun dan berada dibawah threshold 5%.

NPL kredit rumah tangga tersebut menurun menjadi 1,60% dari sebelumnya sebesar 1,66 pada triwulan II. Penurunan NPL terjadi pada Kredit Pemilikan Rumah dari 2,11% menjadi 2,08%. Sementara, penurunan NPL kredit rumah tangga tertahan oleh peningkatan NPL Kredit Kendaraan Bermotor dari 0,63% menjadi 0,75%.



Grafik 4.18 DPK Perseorangan



Grafik 4.19 Pangsa DPK Perseorangan

Tabel 4.3 Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga

Kategori				2022				2023				2024		
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Kredit Rumah Tangga	2,02%	2,03%	1,84%	2,10%	1,98%	1,87%	1,61%	1,78%	2,00%	1,95%	1,69%	1,78%	1,66%	1,60%
Kredit Pemilikan Rumah	3,00%	2,92%	2,63%	2,85%	2,83%	2,57%	2,28%	2,43%	2,71%	2,52%	2,32%	2,33%	2,11%	2,08%
Kredit Kendaraan Bermotor	1,91%	1,68%	1,03%	0,88%	0,61%	0,55%	0,45%	0,42%	0,48%	0,63%	0,51%	0,58%	0,63%	0,75%
Kredit Peralatan Rumah Tangga	2,54%	2,06%	2,21%	2,89%	1,93%	1,12%	0,79%	0,90%	0,80%	0,88%	1,13%	1,22%	1,15%	1,34%
Kredit Multiguna	1,09%	1,19%	1,17%	1,39%	1,40%	1,42%	1,26%	1,40%	1,66%	1,61%	1,39%	1,43%	1,42%	1,37%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	1,79%	1,91%	1,80%	3,39%	1,60%	1,67%	1,22%	1,73%	1,70%	2,69%	1,24%	1,72%	1,20%	1,28%

Sumber: Bank Indonesia
(*) berdasarkan lokasi proyek

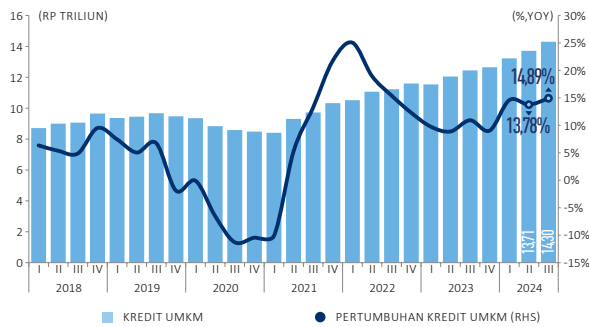
4.2.3 Ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penyaluran kredit UMKM (lokasi proyek) pada triwulan III 2024 tetap tumbuh positif dengan risiko kredit yang perlu diwaspadai.

Penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2024 tumbuh sebesar 14,89% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,78% (yoy). Di sisi lain, risiko kredit mengalami peningkatan, tercermin dari rasio NPL kredit UMKM yang semula tercatat sebesar 2,41% menjadi 5,14%.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit tercatat sebesar 19,41% meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 18,76. Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi Kepri tersebut dari waktu ke waktu semakin mendekati 20% sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Lapangan Usaha, penyaluran kredit UMKM masih terkonsentrasi pada LU Perdagangan Besar & Eceran yakni sebesar 40,84%, LU Industri Pengolahan yang memiliki pangsa sebesar 8,39%, LU Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dengan pangsa sebesar 6,29%. Sedangkan penyaluran kredit UMKM yang mengalami peningkatan yaitu Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi sebesar 13,48% dan Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya sebesar 7,47%. Adapun pangsa penyaluran kredit UMKM pada LU lainnya masing-masing masih < 6%.

Peningkatan kredit UMKM pada triwulan III 2024 didorong oleh LU Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum meningkat sebesar 12,15% (yoy) tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,15% (yoy). LU Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan tercatat sebesar 16,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,34% (yoy). Selain itu, LU Pedagang Besar dan Eceran juga tercatat sebesar 4,27% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,70% (yoy). Dalam rangka mendukung penguatan UMKM di Provinsi Kepri, Pemerintah berperan dalam penyaluran pembiayaan mikro dan ultra mikro oleh perbankan, melalui subsidi bunga pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Bank Indonesia turut berperan antara lain dengan mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan kewajiban bank untuk memenuhi secara bertahap Rasio Pembiayaan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 4.20 Perkembangan Kredit UMKM

Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pembiayaan inklusif merupakan penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau Perorangan Berpenghasilan Rendah (PBR) dalam Rupiah dan valuta asing. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri juga terus mendorong UMKM agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital antara lain melalui dukungan dalam penyelenggaraan pameran, kurasi produk, pelatihan, dan *business matching* terhadap para pelaku usaha UMKM yang dilakukan secara berkelanjutan.



BOKS 2

Gebyar Melayu Pesisir 2024: Digitalisasi Untuk Transformasi Ekonomi Kepri Bagi Kemajuan Negeri

Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Kepulauan Riau (BI Kepri) terus berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Sepanjang tahun 2024, upaya ini diwujudkan melalui program *Gebyar Melayu Pesisir* (GMP), yang menjadi platform strategis untuk mempercepat digitalisasi dan pengembangan UMKM. Rangkaian kegiatan GMP mencakup kurasi produk unggulan, peningkatan kapasitas pelaku usaha (*capacity building*), perluasan kemitraan dan akses pembiayaan, promosi perdagangan, layanan perizinan dan sertifikasi halal, edukasi keuangan inklusif, hingga onboarding digital UMKM, melibatkan pelaku usaha dari seluruh kabupaten dan kota di Kepri.

Sebagai pembuka, *Road to GMP* yang digelar dari Januari hingga Agustus 2024 menghadirkan beragam kegiatan persiapan. Acara

puncak berlangsung pada 15-18 Agustus 2024, bersinergi dengan **Pekan QRIS Nasional (PQN)** dan program **Bahanakan Cinta, Bangsa dan Paham Rupiah (Bahari) Kepri**. Kegiatan PQN merupakan event tahunan yang terdiri dari sosialisasi, edukasi, bazaar kuliner, QRIS Experience Rp1, dan berbagai games interaktif serta hiburan yang dihubungkan dengan transaksi menggunakan QRIS dengan tujuan untuk mendorong terbentuknya ekosistem pembayaran digital yang semakin kuat, mendorong daya tarik masyarakat akan penggunaan QRIS, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Program Bahari Kepri mencakup peluncuran kurikulum CBP Rupiah pada materi ajar tingkat SD dan SMP se Kota Batam, berbagai lomba edukasi CBP Rupiah dan labirin edukasi CBP Rupiah. Peresmian acara dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, dengan kehadiran virtual Menteri Koperasi dan UKM serta Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada



Gambar B2.1 Kepala Perwakilan BI Prov. Kepri dan Sekda Prov. Kepri dalam Opening Ceremony GMP 2024



Gambar B2.2 Menteri Koperasi dan UKM dan Deputi Gubernur Bank Indonesia turut hadir secara virtual dalam Opening Ceremony GMP 2024



Gambar B2.3 Welcoming Speech oleh Menparekraf Sandiaga Uno dalam Seminar Sistem Pembayaran

pembukaan tersebut, digelar *fashion show* yang menampilkan delapan desainer unggulan binaan BI Kepri dengan koleksi busana *ready-to-wear* khas daerah, diperagakan oleh model profesional dan komunitas.

Selama rangkaian GMP, berbagai inovasi ditampilkan untuk mendukung pengembangan UMKM dan digitalisasi transaksi, termasuk pameran produk unggulan, bazar kuliner khas Kepri, serta implementasi kanal pembayaran QRIS di seluruh merchant. Penjualan produk tercatat mencapai Rp12,31 miliar secara *online* maupun *offline*, mencerminkan dampak positif GMP terhadap pelaku usaha lokal. Selain itu, masyarakat juga diajak memahami kebijakan Bank Indonesia melalui labirin edukasi, permainan interaktif, serta booth layanan sistem pembayaran dan fintech.



Gambar B2.5 Funbike Kemerdekaan sebagai rangkaian GMP 2024



Gambar B2.4 Kunjungan pameran UMKM oleh influencer Teuku Wisnu

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, seminar-seminar bertema ekonomi digital dan daya saing UMKM turut diselenggarakan dengan menghadirkan narasumber dari kalangan regulator, praktisi, dan tokoh publik. Seminar ini membahas isu-isu penting seperti perlindungan konsumen, keamanan data, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Puncak GMP 2024 ditutup dengan peluncuran kurikulum “Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah” untuk siswa SD dan SMP. Program hasil kerja sama dengan pemerintah daerah dan Nongsa Digital Park ini bertujuan menginternalisasi literasi keuangan sejak dini. Sebagai *Strategic Flagship Event*, GMP 2024 tidak hanya menjadi momentum penting bagi pengembangan UMKM, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi digital yang adaptif dan inklusif di Kepri.



Gambar B2.6 Peluncuran Kurikulum “Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah” oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam

BAB V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Inflow Uang Kartal



Tw III
2024

Rp 944 M

Tw II
2024

Rp 1,31 T



Outflow Uang Kartal



Tw III
2024

Rp 2,73 T

Tw II
2024

Rp 3,19 T



Net Flow Uang Kartal



Tw III
2024

Rp 1,78 T
Net Outflow

Tw II
2024

Rp 1,89 T
Net Outflow



Transaksi RTGS



Tw III
2024

Rp 52,25 T
13,93% (yoy)

Tw II
2024

Rp 43,93 T
17,24% (yoy)



Transaksi SKNBI



Tw III
2024

Rp 6,75 T
4,89% (yoy)

Tw II
2024

Rp 6,03 T
3,90% (yoy)



Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian, aktivitas transaksi pembayaran tunai menggunakan Rupiah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tetap tumbuh positif meskipun mengalami perlambatan pada triwulan III 2024. Selain itu, transaksi pembayaran nontunai turut mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital khususnya *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).



Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan III 2024 mencatatkan *net outflow* sebesar Rp1,78 triliun, melandai dibandingkan triwulan II 2024 yang tercatat *net outflow* sebesar Rp1,89 triliun. Meskipun demikian, kinerja ekonomi Kepri tetap tumbuh positif sejalan dengan aktivitas transaksi pembayaran yang tetap tumbuh positif meskipun melandai. Hal ini tercermin dari peningkatan transaksi QRIS dan Uang Elektronik (UE) yang didukung oleh meningkatnya preferensi dan akseptasi masyarakat terhadap penggunaan transaksi nontunai.

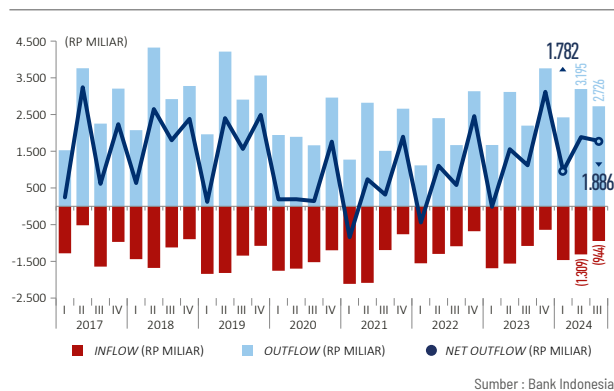
5.1 TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

5.1.1 Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*Inflow*¹/*Outflow*²)

Pada triwulan III 2024, pergerakan aliran uang tunai tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp1,78 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai *net outflow* sebesar Rp1,89 triliun. Sejalan dengan pertumbuhan aliran uang tunai tersebut, kinerja ekonomi Kepri tetap tumbuh positif.

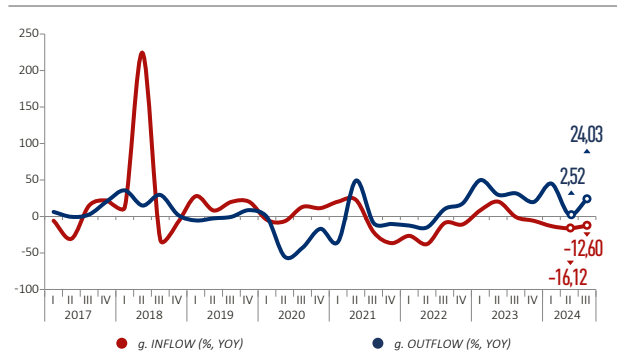
Jumlah aliran uang kartal yang keluar (*outflow*) pada triwulan III 2024 berjumlah Rp2,73 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 sebesar Rp3,19 triliun. Pada saat yang sama, aliran uang kartal yang masuk (*inflow*) tercatat sebesar Rp944 miliar, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp1,31 triliun. Kondisi *net outflow* pada periode laporan mengindikasikan perekonomian yang semakin kuat sejalan dengan konsumsi rumah tangga, pemerintah, dan LNPR di Kepri yang tumbuh positif diiringi mobilitas masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini juga didukung oleh realisasi belanja pemerintah pada periode laporan terserap lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kebutuhan uang tunai di Provinsi Kepri.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan uang tunai di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri terus



Grafik 5.1 Perkembangan Inflow dan Outflow Kepri

- 1 *Inflow* : aliran uang masuk ke Bank Indonesia melalui setoran bank,
2 *Outflow* : aliran uang keluar dari Bank Indonesia melalui penarikan bank



Grafik 5.2 Perkembangan Pertumbuhan Inflow dan Outflow

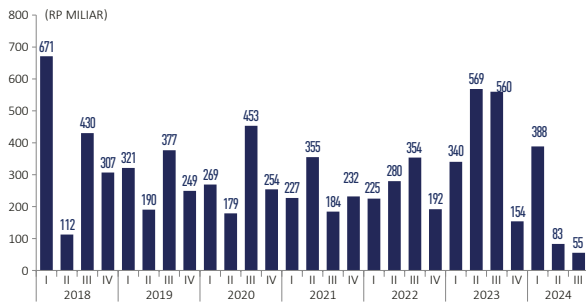
menyelenggarakan kegiatan kas titipan³ yang tersebar di tiga tempat yakni Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Karimun. Selain itu, kegiatan kas keliling telah dilaksanakan di dalam kota dan luar kota untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Terpencil) untuk menjamin tersedianya Rupiah yang layak edar bagi seluruh masyarakat Kepri. Selain itu, Bank Indonesia juga turut menyelenggarakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) pada tahun 2024 yang menyasar ke wilayah 3T yaitu Pulau Singkep (Kab. Lingga), Pulau Tambelan (Kab. Bintan), Pulau Subi Besar dan Pulau Midai (Kab. Natuna), serta Pulau Tarempa (Kab. Kep. Anambas).

5.1.2 Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia berperan menyediakan uang kartal layak edar dalam rangka menjaga kualitas uang yang diedarkan. Proses penyediaan uang kartal layak edar melibatkan beberapa aspek penting, mulai dari penerbitan uang yang berkualitas, pengaturan jumlah uang beredar, edukasi masyarakat melalui program Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah, kas keliling, hingga pemeliharaan kualitas uang layak edar. Dalam rangka memelihara kualitas uang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia menjalankan *Clean Money Policy* dengan melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) yang berasal dari penukaran oleh masyarakat maupun setoran perbankan.

Jumlah uang kartal tidak layak edar yang dimusnahkan pada triwulan III 2024 tercatat sebanyak Rp55 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berjumlah Rp83 miliar. Penurunan jumlah pemusnahan UTLE tersebut sejalan dengan penurunan jumlah uang masuk (*inflow*) pada triwulan III 2024. Hal ini tercermin dari penurunan jumlah pecahan uang besar yang dimusnahkan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pemusnahan uang kartal tidak layak edar ini meliputi uang yang mengalami kerusakan berat maupun telah mencapai masa edarnya. Penurunan jumlah uang yang dimusnahkan didorong oleh kondisi uang beredar yang lebih baik sejalan dengan kampanye nasional CBP Rupiah yang digaungkan Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat uang Rupiah di seluruh wilayah Kepri. Tidak hanya itu, pembelajaran tentang uang

- 3 Kas Titipan merupakan salah satu upaya mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia terkait penerbitan uang sekaligus memfasilitasi perbankan dalam hal penyetoran dan penarikan uang tunai dikarenakan keterbatasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah. Pelaksana Kas Titipan yaitu Bank Mandiri Tanjungpinang, Bank Riau Kepri Natuna dan BNI Tanjung Balai Karimun.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.3 Perkembangan Pemusnahan UTLE (dalam miliar Rupiah)

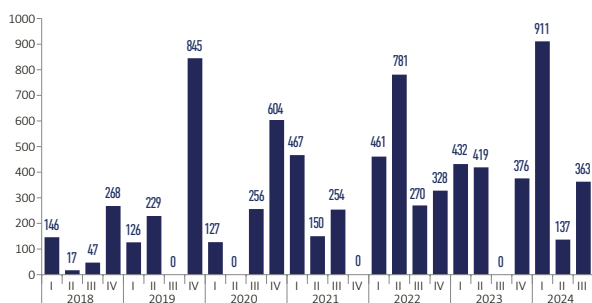
Rupiah kini juga menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di tingkat sekolah.

5.1.3 Upaya Menekan Peredaran Uang Palsu (UPAL)

Dalam rangka meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan kebanggaan terhadap Rupiah maka sejumlah kegiatan edukasi CBP Rupiah terus dilakukan ke masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan ciri keaslian uang Rupiah, menumbuhkan kecintaan pada Rupiah dan membangkitkan kebanggaan menggunakan Rupiah sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Melalui edukasi CBP Rupiah tersebut diharapkan pemahaman masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah semakin meningkat dan dapat menekan peredaran uang palsu. Selama triwulan III 2024 terdapat 363 lembar temuan uang palsu (UPAL) di wilayah Kepri, meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebanyak 137 lembar uang palsu. Peningkatan temuan UPAL tersebut seiring dengan meningkatnya pelaporan temuan UPAL sejalan dengan konsistensi BI dalam menyosialisasikan edukasi CBP atau diseminasi terkait ancaman hukuman bagi pelaku, atau upaya sejenis dari BI.

Dalam hal masyarakat menemukan uang Rupiah yang diragukan keasliannya, masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank



Sumber : Bank Indonesia

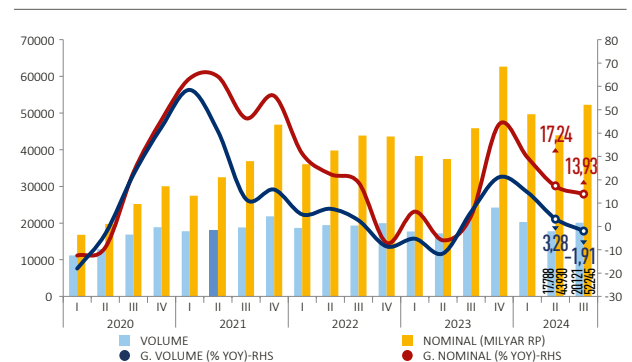
Grafik 5.4 Perkembangan Temuan Uang Palsu (lembar)

Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya dan dihimbau untuk melaporkan temuan tersebut disertai fisik uang yang diragukan keasliannya kepada bank, kepolisian, atau meminta klarifikasi langsung ke kantor Bank Indonesia terdekat. Laporan masyarakat atas uang yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia, baik yang disampaikan langsung atau melalui bank, akan diteliti lebih lanjut. Jika uang tersebut dinyatakan tidak asli oleh Bank Indonesia, maka masyarakat dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5.2 TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI

5.2.1 Transaksi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS)

Nominal transaksi sistem Real-Time Gross Settlement (RTGS) triwulan III 2024 tetap tumbuh meskipun mengalami perlambatan. Transaksi BI-RTGS di Provinsi Kepri pada triwulan III 2024 tercatat mencapai Rp52,25 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh mencapai Rp43,93 triliun. Meskipun demikian, pertumbuhan secara tahunan tercatat mengalami deselerasi jika dibandingkan dengan triwulan II 2024 yakni dari 17,24% (yoy) menjadi 13,93% (yoy) pada triwulan III 2024. Di sisi lain, volume transaksi pada triwulan III 2024 berkontraksi sebesar 1,91% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 yang tumbuh 3,28% (yoy). Tren penurunan transaksi RTGS mengindikasikan adanya perubahan preferensi layanan pembayaran ke alternatif pembayaran lainnya yang tercermin dari peningkatan jumlah volume dan nominal transaksi QRIS yang terakselerasi masing-masing sebesar 92,28% (yoy) dan 103,09% (yoy).

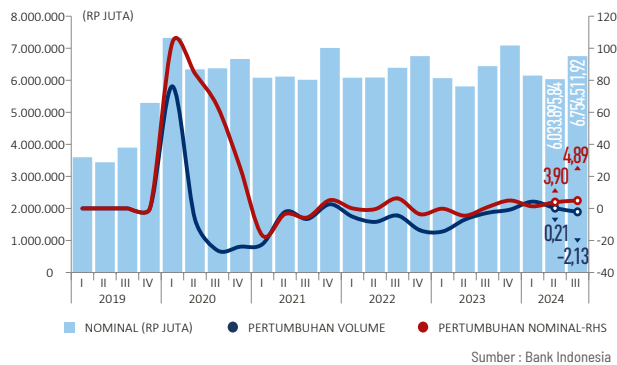


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.5 Perkembangan RTGS di Provinsi Kepri

5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada saat yang sama, pertumbuhan nominal transaksi kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) selama triwulan III 2024 mengalami peningkatan. Pertumbuhan nominal transaksi kliring selama triwulan III 2024 terakselerasi sebesar 4,89% (yoy) atau sebesar Rp6,75 triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2024 yang



Grafik 5.6 Perkembangan Transaksi Kliring di Provinsi Kepri

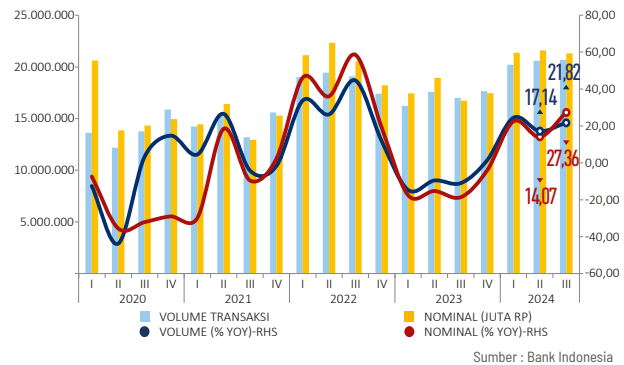
tumbuh sebesar 3,90% (yoy) atau sebesar Rp6,03 triliun. Meskipun demikian, pertumbuhan volume transaksi terkontraksi 2,13% (yoy) pada triwulan III 2024, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2024 yang tumbuh sebesar 0,21% (yoy) yang mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memilih menggunakan layanan SKNBI untuk transaksi dalam nominal yang besar di tengah semakin beragamnya layanan jasa transfer. Saat ini, selain BI RTGS dan SKNBI, sudah ada BI FAST yang menyediakan layanan transfer 24/7.

5.2.3 Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (UE)

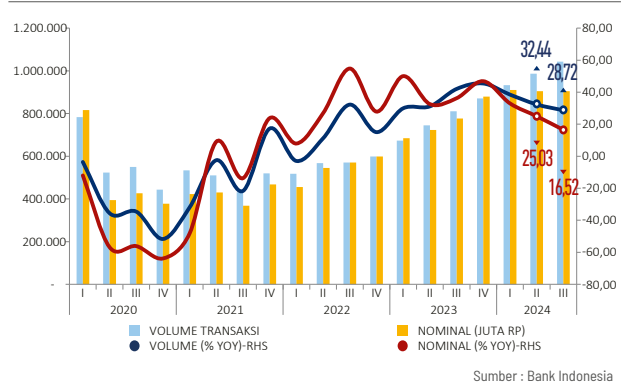
Transaksi menggunakan kartu debit pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan dari sisi nilai transaksi maupun sisi volume transaksi seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi Kepri yang membaik. Nilai transaksi kartu debit tumbuh sebesar 27,36% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 14,07% (yoy). Sementara itu, volume transaksi tumbuh sebesar 21,82% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 17,14% (yoy).

Di sisi lain, volume dan nominal transaksi menggunakan kartu kredit pada triwulan III 2024 tetap kuat meski mengalami perlambatan. Volume transaksi tumbuh sebesar 28,72% (yoy), termoderasi dibandingkan triwulan II 2024 yang tumbuh sebesar 32,44% (yoy). Selain itu, nominal transaksi termoderasi dari 25,03% (yoy) menjadi 16,52% (yoy). Meskipun termoderasi, namun pertumbuhan penggunaan kartu kredit masih mengindikasikan bahwa konsumsi tetap tumbuh didukung oleh kredit/pembiayaan perbankan.

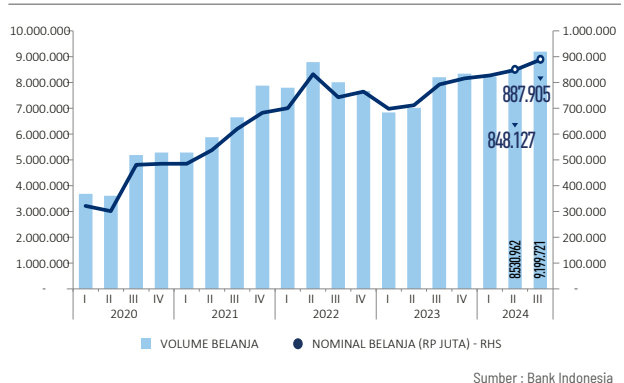
Jumlah transaksi menggunakan UE di wilayah Kepri pada triwulan III 2024 tercatat Rp887,91 miliar, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2024 yang tercatat sebesar Rp848,13 miliar. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan kinerja perekonomian Kepri yang tumbuh positif. Sebagai upaya untuk meningkatkan transaksi menggunakan UE, Bank Indonesia terus mendorong penggunaan transaksi nontunai khususnya QRIS.



Grafik 5.7 Perkembangan Transaksi Kartu Debit



Grafik 5.8 Perkembangan Transaksi Kartu Kredit



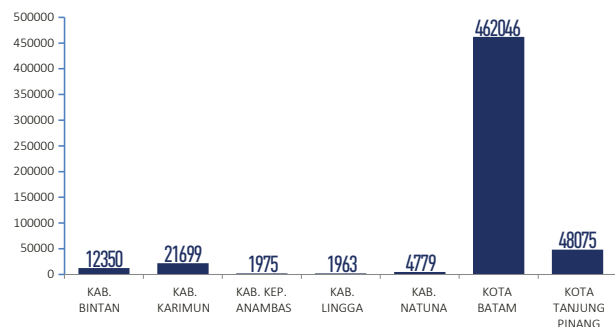
Grafik 5.9 Perkembangan Transaksi UE di Provinsi Kepri

5.2.4 Perkembangan QRIS

Implementasi QRIS di wilayah Kepri tumbuh secara signifikan dan diharapkan dapat mendukung SP yang aman, lancar dan handal serta turut mendorong inklusi keuangan khususnya pada UMKM. Dari sisi user/pengguna, pada triwulan III 2024 tercatat penambahan sebanyak 31.847 pengguna baru atau tumbuh sebesar 6,73% (qtq) dibandingkan dengan triwulan II 2024, sehingga secara akumulasi total pengguna QRIS di Kepri telah mencapai 505.025 pengguna. Selain itu, dari sisi transaksi, sampai dengan triwulan III 2024 tercatat total transaksi sebanyak 23.045.714 transaksi, tumbuh sebesar 16,67% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Nominal total transaksi

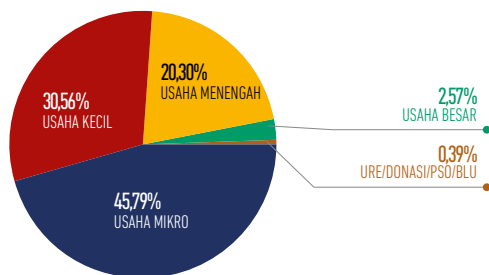
QRIS di Kepri hingga triwulan III 2024 tercatat sebesar Rp1,31 triliun atau tumbuh sebesar 14,56% (qtq).

Hingga triwulan III 2024, jumlah *merchant* QRIS tercatat sebesar 552.887 *merchant*, atau bertambah sebesar 17.187 *merchant* dari triwulan II 2024. Mayoritas *merchant* berlokasi di Kota Batam (83,57%), diikuti oleh Kota Tanjungpinang (8,70%) dan Kab. Karimun (3,92%). *Merchant* QRIS di wilayah Kepri didominasi oleh kategori Mikro dengan pangsa sebesar 45,79%, diikuti kategori Usaha Kecil (30,56%), dan Usaha Menengah (20,68%). Berdasarkan hal tersebut, terdapat lebih dari 97,02% transaksi QRIS yang dilakukan oleh UMKM.



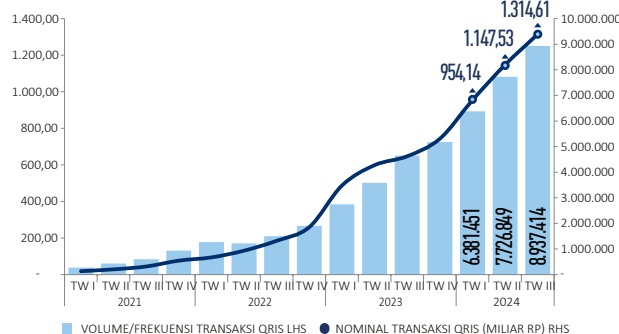
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.10 Perkembangan QRIS berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kepri Triwulan III 2024



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.11 Perkembangan Merchant QRIS berdasarkan Kelompok Usaha Triwulan III 2024



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.12 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Provinsi Kepri



Sumber : Bank Indonesia (data diolah)

Grafik 5.13 Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS di Provinsi Kepri

5.2.5 Intensifikasi Sistem Pembayaran Nontunai

Upaya perluasan penggunaan transaksi digital (QRIS) terus dilakukan pada berbagai sektor dan segmen pengguna. Berdasarkan karakteristik Kepri yang menjadi tempat transit bagi wisatawan dan *melting pot* dari berbagai penduduk Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mendorong penggunaan QRIS, BI Kepri melakukan upaya strategi dalam peningkatan pengguna QRIS seperti sinergi dan kolaborasi, sosialisasi, *showcasing*, dan *onboarding* QRIS. Strategi perluasan implementasi QRIS yang dilaksanakan selama triwulan III 2024 antara lain:

1. Sinergi dan kolaborasi Bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), Pemda, Komunitas, Asosiasi Media, Pelaku Usaha dan Instansi Terkait.
2. Perluasan komunikasi QRIS Cross Border khususnya pada kawasan wisata.
3. Perluasan QRIS pada sektor prioritas, seperti kawasan wisata, pasar, kuliner, pelabuhan, layanan Kesehatan, rumah ibadah dan pembayaran pajak/retribusi.
4. *Reward* bagi *merchant* dan *user* bekerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya.
5. Edukasi/ sosialisasi/ *onboarding*/ hiburan/ perlombaan kerjasama dengan PJP dan instansi terkait lainnya:
 - a. QRIS Goes to School/Campus;
 - b. Kolaborasi pada kegiatan/event strategis di Kepri;
 - c. Sinergi event strategis antar Unit/Fungsi Bank Indonesia.
6. Perluasan QRIS yang disinergikan dengan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk pembayaran pajak dan retribusi, serta belanja melalui fitur QRIS - Kartu Kredit Indonesia (KKI).
7. *On boarding* pada sektor pariwisata seperti hotel, travel agent, dan objek wisata.
8. *Showcase* dan QRIS Experience dalam memperluas transaksi QRIS pada event strategis.

Bank Indonesia Kepri akan terus mendorong usaha pada sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk dapat mengimplementasikan QRIS serta mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi QRIS. BI Kepri telah melakukan beberapa kegiatan dan sinergi event yaitu sosialisasi, FGD, dan rapat koordinasi bersama para stakeholders terkait untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat. Adapun salah satu kegiatan yang telah dilakukan antara lain Sosialisasi QRIS khususnya QRIS Antarnegara kepada penggiat wisata melalui asosiasi diantaranya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA), dan Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia (ASPABRI). Selain itu, dalam rangka bulan Ramadhan, Bank Indonesia Kepri melaksanakan kegiatan sinergi berupa *On Boarding*, Sosialisasi, dan *QRIS Experience* pada berbagai Bazaar Ramadhan dan Operasi Pasar Murah.

Ke depan, Bank Indonesia Kepri akan terus mendorong usaha pada sektor pariwisata serta sektor pendukung lainnya untuk dapat mengimplementasikan QRIS serta mengakselerasi ekosistem pembayaran digital khususnya di sektor pariwisata Kepri melalui intensifikasi sosialisasi QRIS, khususnya QRIS *Cross-Border* mengingat letak geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia serta sebagian besar kunjungan wisman didominasi oleh kedua negara tersebut. Ke depannya Bank Indonesia Kepri juga akan memperluas publikasi QRIS Antarnegara pada kawasan pelabuhan lainnya yang merupakan tempat keluar masuk turis mancanegara.

5.2.6 Pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

ETPD terus dilakukan dalam rangka perluasan *cashless society* dan keuangan inklusif dengan menyediakan saluran pembiayaan nontunai dalam pelaksanaan transaksi keuangan Pemerintah. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Bank Indonesia Kepri memiliki beberapa strategi serta upaya untuk mendorong baik dari aspek implementasi, realisasi, maupun lingkungan strategis, antara lain perluasan kanal pembayaran digital dalam transaksi Pemerintah

Daerah, peningkatan transaksi non-tunai melalui QRIS dan *Teller* untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta penguatan aspek lingkungan strategis, khususnya pelaksanaan sosialisasi oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendorong implementasi ETPD di Kepri sepanjang triwulan III 2024:

- Rapat koordinasi & *capacity building* dengan Tim Teknis Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk membahas evaluasi dan tindak lanjut peta jalan masing-masing daerah.
- Memfasilitasi antar bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) & Pemda untuk mendorong implementasi kanal digital & Integrasi *Cash Management System* (CMS).
- Berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penerimaan untuk mendorong perluasan ekosistem nontunai.
- Coaching clinic* dan pendampingan pengisian Indeks ETPD.
- Penyampaian *strategic advisory* kepada kepala daerah terkait kondisi, tantangan/isu & strategi TP2DD.
- High Level Meeting* (HLM) TP2DD untuk eskalasi isu strategis & mendorong *political will* kepala Daerah.
- Benchmarking* dengan daerah lain melalui kegiatan studi banding dan kunjungan kerja.

5.2.7 Bantuan Sosial Nontunai

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Kepri mendukung akselerasi elektronifikasi transaksi pemerintah melalui program penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) nontunai. Program Bansos yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antara lain adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Program Kartu Pra Kerja. Program Sembako dan PKH disalurkan melalui dua mekanisme yakni secara nontunai melalui Himbara dan tunai melalui PT Pos.

Realisasi penyaluran program PKH tahap ketiga 2024 secara nominal sebesar 11,040 miliar, sedangkan penyaluran kepada KPM sebesar 32.576 KPM. Penyaluran program sembako berdasarkan jumlah KPM

Tabel 5.1 Penyaluran PKH Tahap 4 tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kepri

PROVINSI	KAB/KOTA	Penyalur	SP2D (Jml KPM)	SP2D (Nominal)	Penyaluran (Jml KPM)	Penyaluran (Nominal)	% Penyaluran (Jml KPM)	% Penyaluran (Nominal)	Penyerapan (Jml KPM)	% Penyerapan (Jml KPM)	Mekanisme
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	BRI	2.975	712.758.187	2.975	712.758.187	100,00%	100,00%	2.849	95,76%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	BINTAN	POS	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	BNI	5.315	1.319.583.133	5.315	1.319.583.133	100,00%	100,00%	5.217	98,16%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KARIMUN	POS	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	BRI	746	179.583.301	746	179.583.301	100,00%	100,00%	629	84,32%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	POS	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	BRI	16.223	3.667.065.550	16.223	3.667.065.550	100,00%	100,00%	15.052	92,78%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	POS	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	BNI	3.774	887.774.790	3.774	887.774.790	100,00%	100,00%	3.709	98,28%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	POS	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	BRI	3.543	801.958.216	3.543	801.958.216	100,00%	100,00%	3.370	95,12%	NON TUNAI
KEPULAUAN RIAU	LINGGA	POS	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNAI
KEPULAUAN RIAU	NATUNA	POS	-	-	-	-	-	-	-	-	TUNAI

Sumber: Bank Indonesia, diolah (data triwulan III 2024)

pada September 2024 adalah sebesar 148.917,00 dengan persentase penyerapan terhadap penyaluran sebesar 100%. Pembayaran digital menggunakan QRIS pada bansos, moda transportasi umum dan ETPD selalu ditingkatkan sebagai metode pembayaran yang paling mudah dilakukan.

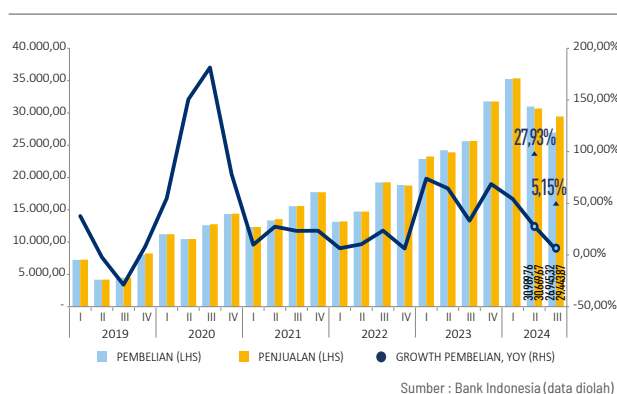
5.3 TRANSAKSI KUPVA BB DAN PJP LR

Dalam rangka menjaga kelancaran transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri terus melakukan *monitoring* perizinan dan pengawasan terhadap operasional 120 KUPVA BB dan 65 PJP LR yang berada di Provinsi Kepri hingga triwulan III 2024.

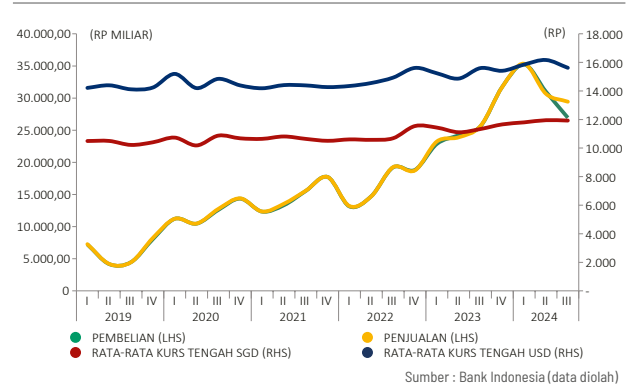
5.3.1 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

Perkembangan KUPVA BB di Provinsi Kepri pada Triwulan III 2024 relatif stabil dan tidak ada perubahan jumlah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Cabang (KC) jika dibandingkan dengan triwulan II 2024. Jumlah KP dan KC KUPVA BB yakni masing-masing 120 kantor dan 68 kantor masih sama dengan jumlah pada Triwulan II 2024.

Pada triwulan III 2024, transaksi Uang Kertas Asing (UKA) didominasi oleh SGD sebesar 55,01% atau sejumlah Rp31,02 triliun, diikuti oleh USD sebesar 32,71% atau sejumlah Rp18,45 triliun, CNY sebesar 6,45% atau sejumlah Rp3,63 triliun, MYR sebesar 3,31% atau sejumlah Rp1,87 triliun dan mata uang lainnya sebesar 2,5% atau sejumlah Rp1,41 triliun. Adapun peningkatan transaksi tertinggi terjadi pada mata uang TWD (Taiwan Dolar) yang didorong oleh pelaksanaan perayaan tradisi Masyarakat Tionghoa yakni Festival Zhong Yuan atau bulan hantu di Provinsi Kepri yang mengundang pemuka agama terkemuka di Bulan Agustus. Secara umum, transaksi UKA pada Triwulan III 2024 mengalami penurunan sebesar 8,55% atau menurun dari sejumlah Rp61,66 triliun pada Triwulan II 2024 menjadi sejumlah Rp56,39 triliun pada triwulan III 2024.



Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi KUPVA

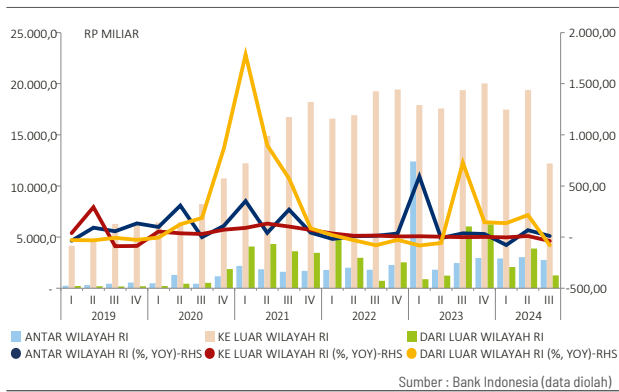


Grafik 5.15 Pergerakan Transaksi KUPVA & Nilai Tukar Rupiah

5.3.2 Perkembangan Transaksi PJP LR

Berdasarkan jenis transaksinya, komposisi transaksi pada PJP LR di Kepri masih didominasi oleh jenis transaksi ke luar wilayah Indonesia dengan pangsa sebesar 75,15%, diikuti transaksi antar wilayah di Republik Indonesia sebesar 17,04%, dan transaksi masuk dari luar wilayah Indonesia sebesar 7,80%. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa PJP LR di Provinsi Kepri lebih banyak digunakan untuk memfasilitasi pengiriman dana ke luar wilayah Indonesia antara lain untuk keperluan pembayaran transaksi pembelian barang impor maupun transaksi lainnya. Sejalan dengan transaksi pada PJP LR yang meningkat, terdapat 12 (dua belas) izin pembukaan kantor pusat KUPVA BB dan PJP Layanan Remitansi yang telah diberikan dan terdapat 8 (delapan) proses perizinan KUPVA BB dan Layanan Remitansi sedang berjalan. Hal ini mengindikasikan bahwa industri KUPVA BB dan PJP Layanan Remitansi masih memiliki ruang untuk pertumbuhan di Provinsi Kepri. Hal ini mengindikasikan bahwa industri KUPVA BB dan PJP Layanan Remitansi masih memiliki ruang untuk pertumbuhan di Provinsi Kepri.

Jumlah Penyelenggara Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) di Provinsi Kepri pada Triwulan III 2024 meningkat sebesar 3,17% menjadi sejumlah 65 Penyelenggara, dari sebelumnya pada Triwulan II 2024 sejumlah 63. Dari frekuensi dan volume nominal transaksi, baik transaksi *outgoing*, *incoming* dan domestik mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi *outgoing* mengalami penurunan sebesar 37,13% (qtq) menjadi sejumlah Rp12,19 triliun dari Triwulan II 2024 yang berjumlah Rp19,39 triliun. Transaksi *incoming* mengalami penurunan sebesar 67,47% (qtq) menjadi sejumlah Rp1,26 triliun dari Triwulan II 2024 yang sejumlah Rp3,89 triliun. Transaksi domestik mengalami penurunan sebesar 9,52% (qtq) menjadi sejumlah Rp2,76 triliun dari Triwulan II 2024 yang berjumlah Rp3,05 triliun. Secara umum, pada Triwulan III 2024 total pengiriman dana oleh PJP LR di Provinsi Kepri mengalami penurunan sebesar 38,41% (qtq) menjadi sejumlah Rp16,22 triliun dari sebelumnya pada Triwulan II 2024 sejumlah Rp26,33 triliun.



Grafik 5.16 Perkembangan Transaksi Pada PJP LR

5.3.3 Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Provinsi Kepulauan Riau

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri secara aktif melakukan fungsi edukasi Pelindungan Konsumen melalui sosialisasi daring dan luring serta pembuatan konten infografis dan video di media sosial. Selama triwulan III tahun 2024 Fungsi Perizinan Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen telah melakukan edukasi pelindungan konsumen dan ToT Perlindungan Konsumen Kepada Guru Ekonomi tingkat SMA se-kota Batam bersinergi dengan Dinas Pendidikan pada tanggal 30 September 2024. Kegiatan

edukasi tersebut berkolaborasi dengan Unit Kehumasan dan Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran melalui sosialisasi luring serta bazaar. Di samping itu, telah dilaksanakan edukasi melalui stasiun radio berupa siaran langsung dan himbuan kepada masyarakat di Kota Batam. Berdasarkan Indeks Keberdayaan Konsumen – Sistem Pembayaran (IKK-SP) 2023 Provinsi Kepri sebesar 66,62% yang berada pada level kritis (60-80%). Hal ini menjelaskan bahwa konsumen telah mampu dan berani menyampaikan pendapat/masalah ketika ada hak-haknya yang tidak dipenuhi atau adanya beban berlebihan atas kewajibannya, serta mampu mengenali risiko dan menghindarinya. Pada triwulan III 2024 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri menerima 3 (tiga) pengaduan konsumen dan telah diselesaikan 100%. Perbandingan jumlah pengaduan pada triwulan I dengan triwulan II ditunjukkan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 Perbandingan Jumlah Pengaduan

Jumlah Jam Kerja Per Minggu	Tw II 2024		TW III 2024	
	Jumlah	Proporsi	Jumlah	Proporsi
Pengaduan Konsumen OJK (Kredit)	1	14.3%	1	33.3%
e-licensing	-	-	-	-
Transfer Dana	4	57.1%	1	33.3%
Saksi Ahli (Cek)	2	28.6%	-	-
Lainnya	-	-	1	33.3%
TOTAL	7	100%	3	100%

Sumber: Bank Indonesia, diolah



BOKS 3

Digital Competition CBP Rupiah 2024: Wadah Kreativitas Generasi Muda Menuju Transformasi Digital

Mata uang bagi suatu negara tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi pembayaran/perdagangan dan sarana untuk menjaga stabilitas ekonomi. Mata uang juga merupakan identitas/alat pemersatu bangsa dan lebih penting dari itu merupakan simbol kedaulatan suatu negara. Mata Uang Rupiah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945, Pasal 23 B: "Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang". Hal ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan literasi Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah berdasarkan kelompok usia dan untuk menginspirasi masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa/i tentang pentingnya CBP Rupiah, maka Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau berkolaborasi dengan Infinite Learning – Nongsa Digital Park menyusun program edukasi CBP Rupiah secara digital melalui metode *gamification*. Program yang dinamakan *Digital Competition CBP Rupiah* ini diharapkan dapat membantu pelajar dan mahasiswa/i untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran CBP Rupiah karena edukasi melalui *game* lebih sesuai dengan segmen anak muda. Peserta yang mengikuti lomba ini berasal dari 80 Sekolah SMA/SMK Sederajat di Kota Batam dan 14 Perguruan Tinggi di Kepulauan Riau dengan total ± 9.400 peserta

Lomba *Digital Competition CBP Rupiah 2024* dirancang untuk memberikan ruang bagi generasi muda dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi di bidang digital. Tahapan pertama dimulai dengan *Open Registration* yang berlangsung pada 9 September hingga 7 Oktober 2024. Pada tahap ini para peserta dapat melakukan pendaftaran dan bergabung dalam kompetisi ini. Selanjutnya, tim dari KPw BI Kepri melaksanakan *Roadshow* di SMA/SMK Sederajat pada 10 hingga 23 September 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan kompetisi sekaligus menginspirasi para pelajar. *Roadshow* berlanjut ke Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (PTN/PTS) mulai 24 September hingga 7 Oktober 2024 untuk menjangkau mahasiswa yang ingin turut berpartisipasi dalam kompetisi tersebut.

Pada 8 dan 9 Oktober 2024, proses Seleksi Peserta telah dilakukan untuk memilih proposal terbaik yang akan melaju ke tahap berikutnya. Peserta yang lolos seleksi telah mengikuti *workshop* pada 10 dan 11 Oktober 2024. Dalam kegiatan *workshop* peserta dibekali pengetahuan tambahan untuk mengembangkan ide lebih lanjut terkait inovasi digital yang akan dilombakan. Kegiatan *Workshop Digicom* yang diikuti sebanyak 423 peserta dari Tingkat SMA/SMK sederajat dan 14 PTN/PTS se Kepulauan Riau baik secara daring dan luring.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyelenggaraan *Bootcamp* pada 17 hingga 19 Oktober 2024, yang merupakan program intensif untuk mengasah solusi digital dengan bimbingan mentor berpengalaman. Kegiatan *Bootcamp* diikuti oleh 100 peserta yang lolos seleksi pada tahap sebelumnya. Pelaksanaan *Bootcamp* yang diselenggarakan di Infinite Learning Nongsa Digital Park.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, puncak acara diselenggarakan pada 2 November 2024 yakni *Main Event: Winner Announcement* yang mengumumkan pemenang dari kegiatan *Digital Competition CBP Rupiah*. Pada acara puncak ini dilaksanakan pemberian hadiah CBPR Digicom dengan kategori *Design Graphic Logo* dan Maskot CBP, *Motion Graphic CBP*, dan *Game Development CBP* dilaksanakan pada tanggal 2 November 2024 bersamaan dengan acara Batam Jazz & Fashion (BAJAFASH) 2024 bertempat di Atrium Edu Park Panbil Batam yang diserahkan langsung oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Ibu Destry Damayanti, dan turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bpk. Suryono, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Bpk. Adidoyo Prakoso.

Dengan terselenggaranya kegiatan CBPR *Digital Competition* ini diharapkan publikasi Cinta Bangga Paham Rupiah di kalangan pemuda dan kaum milenial akan semakin luas. Dengan demikian, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Rupiah melalui digitalisasi edukasi dan sosialisasi CBP dengan memanfaatkan talenta-talenta digital yang dimiliki pelajar dan mahasiswa di Kepulauan Riau.



Gambar B3.1 Design Twibbon, flyer, backdrop dan feed program Digital Competition CBP Rupiah



Gambar B3.2 Roadshow Program Digital Competition CBP Rupiah



Gambar B3.3 Workshop dan Bootcamp program Digital Competition CBP Rupiah

BAB VI

Kesejahteraan Masyarakat dan Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja



Agustus 2024
1.120.660
Jiwa



Agustus 2023
1.093.686
Jiwa

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



Agustus 2024
67,14%



Agustus 2023
67,29%

Tingkat Pengangguran Terbuka

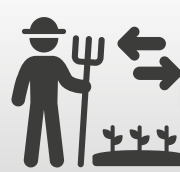


Agustus 2024
6,39%



Agustus 2023
6,80%

Nilai Tukar Petani



Tw III 2024
105,25



Tw II 2024
105,61

Tingkat Kemiskinan



Maret 2024
5,37%



Maret 2023
5,69%

Indeks Pembangunan Manusia



Tahun 2024
79,89



Tahun 2023
79,08

Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan perbaikan tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) seiring dengan tren pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Selain itu, kesejahteraan petani mengalami peningkatan sebagaimana tergambar dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang mengalami kenaikan seiring terjadinya kenaikan indeks yang diterima petani.



Tabel 6.1 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Kepri

Indikator	Periode					Perubahan 1 Tahun	
	Ags'20	Ags'21	Ags'22	Ags'23	Ags'24	Orang	% Perubahan
Angkatan Kerja	1.133.776	1.207.014	1.259.712	1.093.686	1.120.660	26.974	2,47%
Bekerja	1.016.600	1.087.419	1.155.997	1.019.356	1.049.090	29.734	2,92%
Pengangguran	117.176	119.595	103.715	74.330	71.570	(2.760)	-3,71%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,34%	9,91%	8,23%	6,80%	6,39%		-6,03%
- Pedesaan	5,41%	4,43%	5,88%	7,00%	2,50%		-64,29%
- Perkotaan	10,89%	10,45%	8,52%	6,77%	6,74%		-0,44%
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,28%	68,27%	68,94%	68,68%	69,17%		

Sumber: BPS (data diolah)

6.1 KETENAGAKERJAAN

6.1.1 KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Kepri terus melanjutkan perbaikan tercermin dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)¹ yang menurun. TPT pada Agustus 2024 berada pada level 6,39%, menurun dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat 6,80%. Perbaikan tersebut utamanya terjadi di pedesaan yang mengalami penurunan TPT dari 7,00% pada Agustus 2023 menjadi 2,50% pada Agustus 2024. Hal tersebut sejalan dengan mobilitas masyarakat yang meningkat dan normalisasi aktivitas usaha seiring pandemi Covid-19 yang telah berakhir.

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, TPT secara tahunan untuk level pendidikan SMA dan SMK mengalami penurunan, sedangkan untuk level ≤SD, SMP dan Perguruan Tinggi (Diploma dan Universitas) mengalami peningkatan. TPT kelompok pendidikan SMA dan SMK mengalami perubahan masing-masing dari 7,85% dan 9,99% pada Agustus 2023 menjadi 7,80% dan 6,83% pada Agustus 2024. Sementara kelompok pendidikan ≤SD, SMP, diploma dan universitas

mengalami peningkatan TPT masing-masing sebesar 5,44%, 5,87%, 2,93% dan 3,53% pada Agustus 2023 menjadi 5,48%, 6,26%, 5,32% dan 4,36% pada Agustus 2024.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepri didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan dengan pangsa sebanyak 23,65% dari jumlah tenaga kerja pada Agustus 2024, menurun dibandingkan Agustus 2023 dengan pangsa 25,23%. Hal ini mencerminkan bahwa LU Industri Pengolahan memiliki peran yang strategis sebagai penyumbang PDRB terbesar dan menyediakan lapangan kerja formal terbanyak di Provinsi Kepri. LU berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja secara berurutan yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (16,59%), LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (10,82%), LU Konstruksi (8,03%), dan LU Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (7,08%).

Buruh/karyawan merupakan status pekerjaan yang paling dominan di Provinsi Kepri dengan porsi sebesar 64,16%, diikuti kelompok berusaha sendiri (wiraswasta mandiri) sebesar 17,42%. Pangsa kelompok berusaha sendiri dan pekerja keluarga/tak dibayar

Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran						
		Aug'18	Aug'19	Aug'20	Aug'21	Aug'22	Aug'23	Aug'24
1	≤SD	2,39%	3,89%	4,25%	7,76%	3,31%	5,44%	5,48%
2	SMP	6,04%	5,33%	9,92%	11,72%	10,38%	5,87%	6,26%
3	SMA	12,37%	10,49%	11,02%	11,75%	11,03%	7,85%	7,80%
4	SMK	14,30%	10,22%	16,55%	9,96%	11,34%	9,99%	6,83%
5	Diploma I/II/III	0,84%	3,77%	9,56%	8,82%	3,51%	2,93%	5,32%
6	Universitas	1,39%	5,07%	7,75%	7,09%	2,50%	3,53%	4,36%

Sumber: BPS (diolah)

Tabel 6.3 Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Agt'18	Agt'19	Agt'20	Agt'21	Agt'22	Agt'23	Agt'24
1	Industri Pengolahan	23,37%	23,80%	22,76%	25,01%	25,77%	25,23%	23,65%
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Spd Motor	19,35%	17,30%	17,32%	17,67%	17,41%	16,45%	16,59%
3	Administrasi Pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan	5,95%	6,41%	6,18%	6,02%	5,15%	5,55%	5,76%
4	Konstruksi	9,44%	7,92%	6,86%	6,64%	7,14%	7,74%	8,03%
5	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,06%	7,71%	8,95%	9,00%	7,80%	8,36%	7,08%
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,09%	8,22%	7,92%	7,54%	10,19%	9,01%	10,82%
7	Transportasi dan Pergudangan	6,44%	6,39%	6,85%	6,05%	6,34%	6,22%	6,46%
8	Informasi, Komunikasi, jasa keuangan, asuransi, real estat dan perusahaan	1,35%	1,66%	1,26%	1,48%	2,07%	1,72%	1,36%
9	Jasa Lainnya	7,13%	6,72%	6,57%	5,08%	6,43%	6,24%	5,26%
10	Tambang, Listrik, Air, dan Gas	2,44%	2,54%	2,34%	1,83%	1,32%	2,11%	2,15%

Sumber: BPS (data diolah)

¹ Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja

Tabel 6.4 Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepri (%)

No	Status Pekerjaan Utama	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Perubahan 1 tahun (Poin Persen)
		Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	
1	Berusaha Sendiri	19,83	19,29	21,80	20,90	19,80	20,17	17,42	-2,75
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	4,16	4,59	4,32	6,10	5,77	5,63	6,06	0,43
3	Berusaha dibantu buruh tetap	3,27	4,04	3,65	3,15	3,23	3,77	4,29	0,52
4	Buruh/karyawan	64,95	66,39	60,94	64,79	60,45	62,56	64,16	1,60
5	Pekerja Bebas	3,30	2,51	3,86	4,02	4,12	1,71	2,30	0,59
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	4,50	3,19	5,42	5,90	6,63	6,17	5,77	-0,40
TOTAL		100	100	100	100	100	100	100	

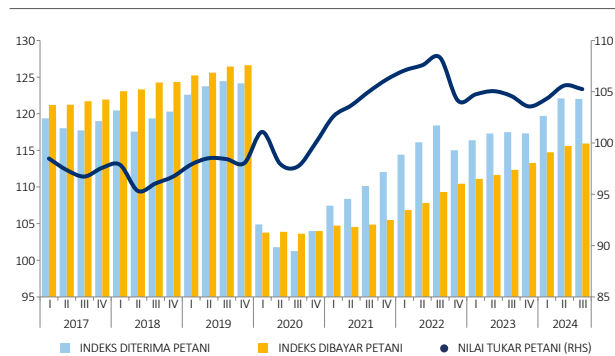
Sumber: BPS (diolah)

mengalami penurunan masing-masing 2,75 persen poin dan 0,40 persen poin pada bulan Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara peningkatan pangsa jumlah pekerja terjadi pada kelompok buruh/karyawan, pekerja bebas, berusaha dibantu buruh tetap dan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 1,60 persen poin, 0,59 persen poin, 0,52 persen poin dan 0,43 persen poin pada bulan Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

6.2 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

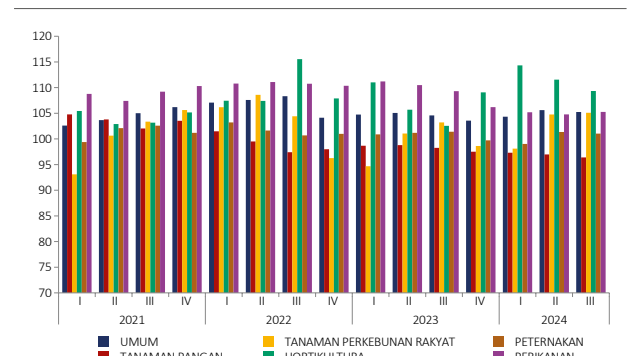
6.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Nilai NTP yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan analisis triwulanan, tingkat kesejahteraan petani pada triwulan III 2024 yang merupakan rata-rata bulan Juli-September 2024 mengalami penurunan dibanding



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.1 Perkembangan NTP



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.2 NTP Berdasarkan Subsektor

Tabel 6.5 Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri

Sub Kelompok / Kelompok	2018 = 100														
	2021				2022				2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1. Tanaman Pangan															
a. Indeks yang Diterima (It)	110,13	108,80	107,29	109,68	109,13	108,23	107,59	109,04	110,36	110,94	111,08	111,16	112,62	113,22	112,92
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,11	104,82	105,15	105,62	107,53	108,77	110,46	111,28	111,84	112,29	113,05	113,99	115,74	116,75	117,14
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	104,78	103,79	102,03	103,53	101,49	99,50	97,41	97,99	98,67	98,80	98,26	97,52	97,31	96,97	96,40
2. Hortikultura															
a. Indeks yang Diterima (It)	111,43	107,61	108,20	111,07	115,06	116,38	127,04	119,47	123,41	117,88	115,10	123,46	131,29	129,21	126,97
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,01	104,58	104,88	105,60	107,09	108,34	129,95	110,74	111,16	111,52	112,25	113,18	115,12	115,82	116,13
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	105,45	102,90	103,17	105,17	107,44	107,42	115,55	107,89	111,02	105,70	102,55	109,07	114,34	111,56	109,34
3. Tanaman Perkebunan Rakyat															
a. Indeks yang Diterima (It)	97,93	105,50	108,70	110,97	114,13	117,98	115,11	107,04	105,85	113,62	116,99	112,52	113,59	122,35	123,23
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	105,20	104,84	105,17	105,90	107,49	108,64	110,27	111,19	111,78	112,43	113,08	114,08	115,77	116,78	117,24
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pr)	93,11	100,64	103,36	105,63	106,17	108,59	104,41	96,27	94,69	101,06	103,22	98,63	98,12	104,77	105,10
4. Peternakan															
a. Indeks yang Diterima (It)	103,67	106,51	107,27	106,35	106,85	108,89	109,45	110,35	111,02	112,16	112,97	111,37	111,82	115,15	115,10
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,30	104,31	104,57	105,10	106,53	107,40	108,70	109,28	110,04	110,85	111,41	112,03	112,93	113,62	113,92
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pt)	99,39	102,11	102,58	101,18	103,22	101,64	100,69	100,98	100,89	101,19	101,40	99,73	99,02	101,35	101,03
5. Perikanan															
a. Indeks yang Diterima (It)	113,43	112,00	114,30	115,97	117,51	117,96	119,58	121,19	123,07	122,87	122,33	119,86	120,08	120,26	121,10
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,29	104,28	104,67	105,12	106,06	106,66	107,98	109,81	110,68	111,21	111,92	112,88	114,16	114,77	115,05
c. Nilai Tukar Petani (NTP-Pi)	108,77	107,40	109,20	110,31	110,79	111,08	110,75	110,36	111,20	110,49	109,30	106,20	105,19	104,78	105,26
Umum															
a. Indeks yang Diterima (It)	107,45	108,38	110,14	112,05	114,41	116,10	118,41	115,02	116,38	117,30	117,49	117,31	119,70	122,08	122,03
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	104,73	104,54	104,87	105,50	106,84	107,82	109,31	110,45	111,11	111,65	112,34	113,27	114,73	115,59	115,94
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	102,60	103,66	105,02	106,20	107,08	107,59	108,33	104,14	104,75	105,06	104,59	103,57	104,33	105,61	105,25

Sumber: BPS (data diolah)

triwulan sebelumnya (April-Juni 2024). Rata-rata NTP pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 105,25, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 105,61. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan turunnya Indeks yang Diterima (It) petani di subsektor Holtikultura, Tanaman Pangan dan Peternakan.

Berdasarkan subsektor, NTP triwulan tertinggi tercatat pada sub kelompok Holtikultura sebesar 109,34 dan NTP terendah tercatat pada sub kelompok Tanaman Pangan sebesar 96,40. Meskipun masih mencatatkan NTP tertinggi dibandingkan subsektor lain, namun NTP sub kelompok Holtikultura mengalami penurunan sebesar 1,99% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan NTP tertinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya terjadi pada sub kelompok Perikanan sebesar 0,45%. Hal ini disebabkan oleh naiknya permintaan komoditas ikan-ikanan ditengah pasokan yang menipis karena faktor cuaca, sehingga memberikan keuntungan lebih bagi nelayan.

6.2.2 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri pada Maret 2024 tercatat sebanyak 138.300 orang, menurun dibandingkan periode Maret 2023 yang tercatat sebesar 142.500 orang. Pada periode Maret 2024, garis kemiskinan mengalami peningkatan dari Rp742.526/bulan/kapita pada Maret 2023 menjadi Rp782.211/bulan/kapita pada Maret 2024. Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada periode Maret 2024 tercatat sebesar 0,704%, lebih rendah dibandingkan dengan

periode Maret 2023 sebesar 0,823%. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2024 juga mengalami penurunan dari 0,181% pada Maret 2023 menjadi sebesar 0,146% pada Maret 2024.

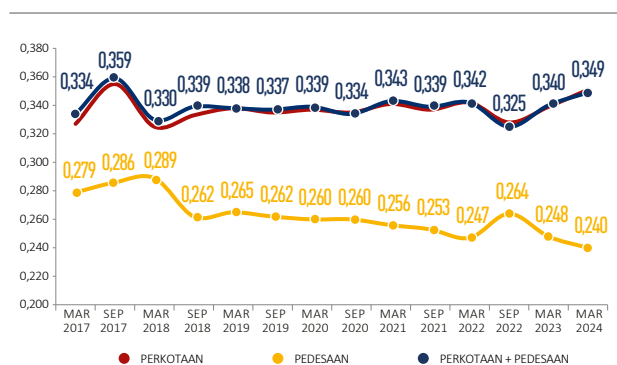
6.2.3 Gini Ratio (GR)

Gini Ratio² Provinsi Kepri pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,349, meningkat dibandingkan Maret 2023 sebesar 0,340. Kenaikan Gini Ratio mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk di Provinsi Kepri menunjukkan pemburukan ditandai dengan kesenjangan yang meluas pada periode Maret 2023 – Maret 2024. Berdasarkan lokasi, tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah perdesaan. Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,351, meningkat dari Maret 2023 tercatat sebesar 0,339, sementara Gini Ratio di perdesaan tercatat sebesar 0,240, menurun dari Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,248. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Pedesaan mengalamim perbaikan, sedangkan Perkotaan mengalami yang yang berlawanan atau ketimpangan yang semakin tinggi. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, Indeks Gini Ratio di Provinsi Kepri relatif tinggi di Sumatera, atau kedua setelah Jambi, meskipun masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio secara nasional (0,388).

Tabel 6.6 Profil Kemiskinan di Provinsi Kepri

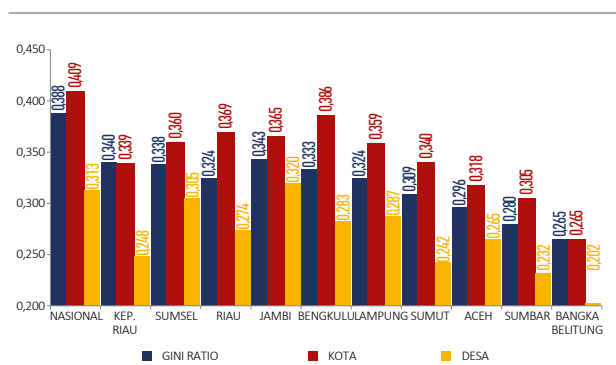
	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	2024
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Mar
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	125.370	128.462	131.676	125.362	128.462	127.758	131.966	142.611	144.462	137.750	151.680	148.890	142.500	138.300
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,06	6,13	6,20	5,83	5,90	5,80	5,92	6,13	6,12	5,75	6,24	6,03	5,69	5,37
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	513.237	536.027	559.291	567.972	594.059	602.038	614.727	617.532	642.425	653.853	684.070	730.462	742.526	782.211
Indeks Kedalaman Kemiskinan/P1 (%)	0,971	1,183	0,995	0,591	0,690	0,900	1,110	1,213	1,070	0,953	1,047	0,886	0,823	0,704
Indeks Keparahan Kemiskinan/ P2 (%)	0,228	0,313	0,243	0,107	0,130	0,18	0,290	0,423	0,280	0,218	0,252	0,186	0,181	0,146
Pertumbuhan Penduduk Miskin (yoy)	4,12%	7,82%	5,03%	-2,41%	-2,44%	1,91%	2,73%	11,63%	9,47%	-3,41%	5,00%	8,09%	-6,05%	-2,95%
Pertumbuhan Garis Kemiskinan (yoy)	4,71%	6,64%	8,97%	5,96%	6,22%	6,00%	3,48%	2,57%	4,51%	5,88%	6,48%	11,72%	8,55%	5,34%

Sumber: BPS (data diolah)



Sumber: BPS (data diolah)

Grafik 6.3 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri



Sumber: BPS (data diolah)

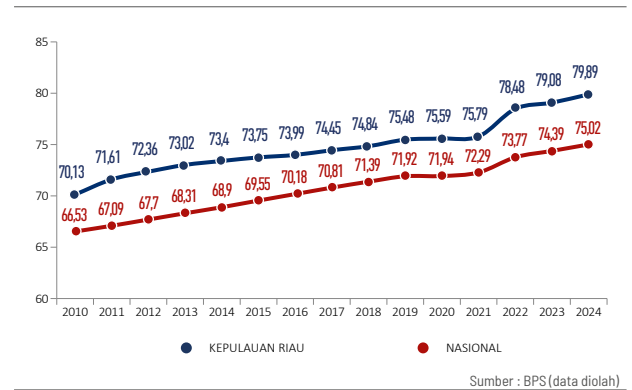
Grafik 6.4 Gini Ratio Provinsi di Wilayah Sumatera

2 Gini Ratio merupakan rasio ketimpangan pengeluaran penduduk yang nilainya antara 0 sampai 1. Gini Ratio yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

6.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Kepri pada tahun 2024 tercatat sebesar 79,89, meningkat 0,81 poin (1,01%) dibandingkan tahun sebelumnya 79,08. Peningkatan IPM Kepri 2024 didukung oleh peningkatan ketiga dimensi penyusunnya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH), dimensi pengetahuan yang diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi dimensi umur panjang dan hidup sehat, angka UHH saat Lahir di Kepri tercatat sebesar 75,12, artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,12 tahun, lebih lama 0,22 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2023.

Angka UHH penduduk di Provinsi Kepri pada tahun 2024 tercatat 75,12 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 74,90 tahun yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Tingkat Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami peningkatan menjadi 13,27 tahun yang diikuti peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 10,50 tahun. Peningkatan angka harapan sekolah maupun rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengeluaran per kapita juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp15.573.000,-, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.998.000,-.



Grafik 6.5 Perkembangan IPM Provinsi Kepri

Secara kewilayahan, seluruh daerah di Provinsi Kepri mengalami peningkatan IPM, dimana IPM Kota Batam dan Tanjungpinang termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi dengan angka IPM masing-masing 83,32 dan 81,58. Sementara itu 4 (empat) kabupaten lainnya termasuk dalam kelompok IPM tinggi yang meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Karimun. Secara keseluruhan, semua Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau mencatatkan peningkatan IPM dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 6.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri Menurut Komponen

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,42	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	74,25	74,36	74,62	74,90	75,12
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,51	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,98	12,99	13,05	13,27
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,38	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	10,18	10,37	10,41	10,50
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rp 0000	12.267	12.513	12.740	12.942	13.019	13.177	13.359	13.566	13.976	14.466	14.209	14.122	14.469	14.998	15.573
IPM		71,13	71,61	72,36	73,02	73,40	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	77,69	77,87	78,48	79,08	79,89

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 6.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Karimun	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	71,70	72,65	74,70	75,49
Bintan	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	74,57	74,99	77,50	77,96
Natuna	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	73,09	73,47	78,23	78,60
Lingga	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	65,83	66,57	72,23	73,05
Kepulauan Anambas	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	69,23	69,61	72,80	73,47
Batam	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	81,12	81,67	82,64	83,32
Tanjungpinang	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,93	79,64	81,14	81,58
Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	78,48	79,08	79,89

Sumber: BPS (data diolah)

BAB VII

Prospek Perekonomian Daerah



Perekonomian global diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% (yoy) pada 2024 atau melambat dibandingkan tahun 2023, kemudian diproyeksikan stabil pada tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 masih on track terhadap estimasi sebelumnya, di tengah revisi ke atas pada ekonomi Amerika Serikat (AS) yang disertai dengan revisi ke bawah bagi sejumlah negara maju lainnya. Sejalan dengan ekonomi global, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh kuat dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang masih kuat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara keseluruhan tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh meskipun berpotensi tertahan sejalan dengan baseline realisasi yang tinggi pada tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2025, perekonomian Kepri diperkirakan kembali menguat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan ekspor yang meningkat.

Tekanan inflasi di Provinsi Kepri pada tahun 2024 dan 2025 juga diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Beberapa faktor pendukung terjaganya inflasi antara lain normalisasi harga pangan dan energi global, perbaikan rantai pasok, serta penguatan sinergi upaya pengendalian inflasi di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).



7.1 PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian global diperkirakan tumbuh dan tetap on track dari prakiraan sebelumnya. Berdasarkan proyeksi dari *International Monetary Fund* (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 3,2% (yoy), atau tidak berubah dibandingkan prakiraan sebelumnya, dan tetap berada di level yang sama pada tahun 2025. Hal tersebut sejalan dengan revisi ke atas pada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, namun diimbangi dengan revisi ke bawah pada negara-negara maju lainnya, khususnya di kawasan Eropa. Sementara itu, disrupsi pada produksi dan pengiriman komoditas khususnya minyak, konflik geopolitik, serta cuaca ekstrem mendorong revisi ke bawah pada sejumlah negara Timur Tengah, namun juga dapat diimbangi dengan revisi ke atas di sejumlah negara Asia yang didorong oleh meningkatnya permintaan semikonduktor dan elektronik. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 (Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) di tahun 2024 dan 2025 diperkirakan masih tetap kuat sebesar 4,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,0% (yoy).

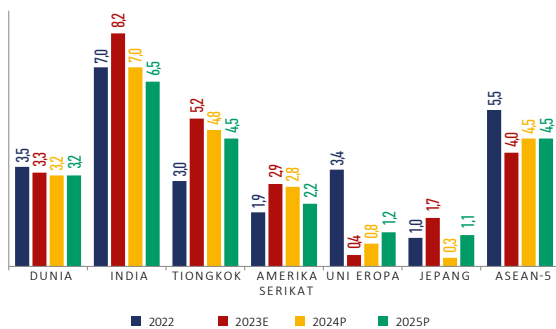
Tekanan inflasi global diperkirakan melanjutkan tren penurunan, dari 6,7% (yoy) pada tahun 2023 menjadi 5,8% (yoy) pada tahun 2024 dan 4,3% (yoy) pada tahun 2025. Hal tersebut terutama didorong oleh penurunan harga energi yang lebih cepat dari prakiraan. Meskipun demikian, risiko berlanjutnya konflik geopolitik global masih menjadi

perhatian yang dapat berdampak pada meningkatnya tekanan inflasi. Tren disinflasi yang masih terjadi diperkirakan akan mendorong kebijakan moneter yang lebih longgar. Adapun berdasarkan prakiraan IMF, inflasi di negara ASEAN-5 juga diperkirakan melandai, dari sebesar 3,5% (yoy) pada tahun 2023 turun menjadi 2,3% pada tahun 2024.

Ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berdaya tahan di tengah tingginya ketidakpastian global. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024 berada pada kisaran 4,7% - 5,5% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang oleh konsumsi Pemerintah sejalan dengan kenaikan aktivitas belanja Pemerintah pada akhir tahun. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen yang terjaga dan dampak positif pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah. Investasi diperkirakan juga berlanjut didukung oleh belanja modal perusahaan serta volume produksi dan pesanan seperti tercermin pada indeks *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Bank Indonesia.

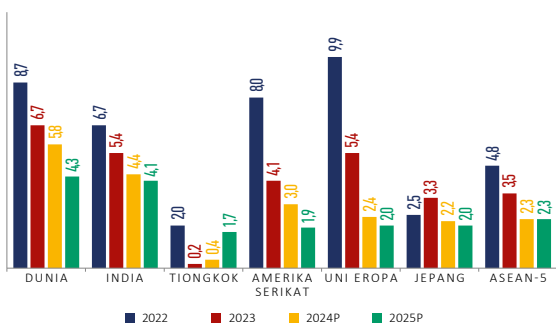
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh, meskipun berpotensi tidak setinggi tahun sebelumnya. Perekonomian Kepri tetap tumbuh didukung oleh kinerja ekspor yang membaik, ditunjukkan oleh *Likert Scale* (LS) Penjualan Ekspor sejalan dengan permintaan global terhadap komoditas utama Kepri yang masih tinggi. Selain itu, investasi diperkirakan tetap tumbuh meskipun melambat setelah realisasi yang tinggi pada tahun sebelumnya. Sementara itu, dari sisi LU, pertumbuhan ekonomi Kepri terutama ditopang oleh LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. **Dengan pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Provinsi Kepri pada tahun 2024 di prakirakan tumbuh pada kisaran 4,6% - 5,4% (yoy).**

Kinerja perekonomian pada tahun ini tetap tumbuh positif yang diperkirakan bersumber dari LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi serta LU Perdagangan Besar dan Eceran. Pertumbuhan pada LU Industri Pengolahan didorong membaiknya sistem logistik dan iklim investasi pasca pandemi, serta *demand* yang masih kuat dari negara mitra. Sementara itu, pertumbuhan pada LU Konstruksi sejalan dengan



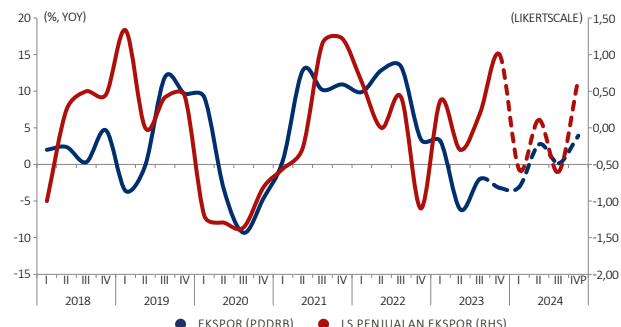
Sumber : IMF World Economic Outlook, Oktober 2023

Grafik 7.1 Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang (% ,yoy)



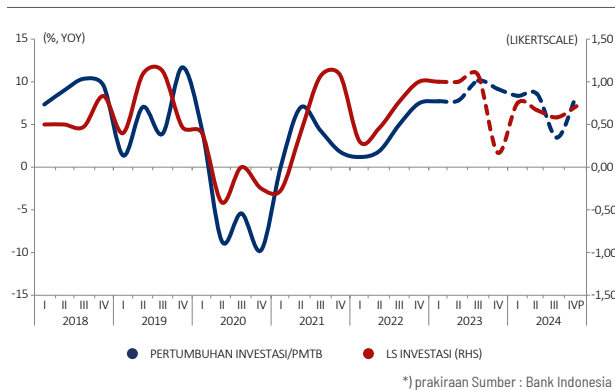
Sumber : IMF World Economic Outlook, Oktober 2023

Grafik 7.2 Perkembangan Inflasi Negara Mitra Dagang (% ,yoy)



*) prakiraan Sumber : Bank Indonesia

Grafik 7.3 Likert Scale Prakiraan Penjualan Ekspor



Grafik 7.4 Likert Scale Perkiraan Investasi

masifnya pembangunan di Provinsi Kepri, terutama pembangunan infrastruktur jalan di Kota Batam. Selain itu, pembukaan sektor *Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE)*, pelaksanaan *sport events* dan atraksi pariwisata yang kembali normal di wilayah Kepri akan mendorong sektor pariwisata untuk tumbuh lebih tinggi serta menghasilkan *multiplier effect* pada sektor lainnya.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 4,9 s/d 5,7%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024.

Dari sisi pengeluaran, ekonomi tahun 2025 akan banyak ditopang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang biasanya meningkat pada akhir tahun. Berakhirnya pemilu dan pilkada juga diharapkan mendorong investasi yang cenderung *wait and see* pada tahun sebelumnya. Akselerasi kinerja perekonomian pada tahun depan diperkirakan bersumber dari Lapangan Usaha (LU) utama yaitu LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Industri

Pengolahan. Akselerasi LU Perdagangan diperkirakan bersumber dari meningkatnya permintaan sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif serta meningkatnya kunjungan wisatawan. Sementara itu, meningkatnya penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* secara global diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap industri semikonduktor dan elektronik tetap kuat.

7.2 PROSPEK INFLASI

Mencermati perkembangan terkini baik di global maupun nasional, inflasi Provinsi Kepri tahun 2024 diperkirakan terjaga di dalam sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Inflasi diperkirakan terjaga sejalan dengan ekspektasi inflasi yang masih berada dalam sasaran, tingkat *imported inflation* yang masih terkendali, serta bauran kebijakan yang dijalankan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Selanjutnya, inflasi pangan juga diperkirakan menurun sejalan dengan berakhirnya El Nino yang mendukung ketahanan pangan tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun dibayangi risiko peralihan menuju La Nina. Terkendalinya inflasi juga didukung oleh langkah antisipatif melalui GNPIP dalam menjaga harga komoditas pangan yang rentan terhadap tekanan inflasi.

Sinergi TPID melalui GNPIP diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai target sasaran inflasi. Di samping itu, moderasi tarif angkutan sejalan dengan penambahan jumlah armada/ rute penerbangan menahan tekanan inflasi lebih lanjut. Terjaganya inflasi di dalam kisaran sasaran tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan moneter yang didukung dengan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui TPID.

Tabel 7.1 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2024

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Pemulihan Permintaan	Perbaikan mobilitas dan peningkatan kunjungan wisatawan baik nasional maupun mancanegara.	▲
Investasi dan Proyek Strategis Nasional	Terdapat beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri	▲
Kebijakan Tarif Impor AS-Tiongkok	Pemberlakuan kebijakan tarif impor sejumlah komoditas yang diterapkan oleh AS terhadap Tiongkok memberikan <i>spillover effect</i> terhadap industri elektronik di Kepri.	▲
Proteksionisme Pangan	Risiko penerapan kebijakan larangan ekspor komoditas pangan.	▼
Risiko Geopolitik	Risiko geopolitik dapat berdampak terhadap harga pangan dan energi dunia	▼

Tabel 7.2 Risiko Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2025

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan	Arah
Kebijakan Moneter Akomodatif	Kebijakan moneter yang lebih akomodatif seiring dengan tren inflasi yang melandai diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat.	▲
Kunjungan Wisatawan	Implementasi kebijakan <i>short term visa</i> serta kebijakan pendorong pariwisata lainnya dapat mendukung kunjungan wisman.	▲
Investasi	Berakhirnya tahun politik diharapkan memberikan kepercayaan kepada investor sehingga tidak lagi bersikap <i>wait and see</i> .	▲
Proyek Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus	Berlanjutnya pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kepri.	▲
Transisi Pemerintahan AS	Transisi pemerintahan AS sebagai mitra dagang utama perlu dicermati, khususnya terkait dengan kebijakan perdagangan internasional.	▼
Risiko Geopolitik	Gejolak geopolitik yang masih berlanjut dapat memberikan disrupsi terhadap perekonomian global hingga domestik.	▼

Tabel 7.3 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2024

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
<i>Upside Risk</i>	- Peningkatan permintaan dan penguatan daya beli masyarakat seiring dengan kondisi pemulihan ekonomi domestik. - Kenaikan harga komoditas pangan global terutama beras karena penurunan produksi beras di sejumlah negara, serta kebijakan relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. - Berlanjutnya gangguan rantai pasokan akibat ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina dan ketegangan geopolitik Timur Tengah dapat berdampak pada tekanan <i>imported inflation</i>. - Kenaikan harga pupuk yang dipicu penurunan anggaran subsidi pupuk dan pestisida yang menyebabkan kenaikan biaya produksi. - Pulihnya aktivitas dunia usaha yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sehingga mendorong permintaan/daya beli.
<i>Downside Risk</i>	- Pengetatan kebijakan moneter di negara maju maupun negara berkembang dan suku bunga masih akan tetap tinggi. - Normalisasi harga minyak dunia diperkirakan dapat menurunkan tingkat harga BBM, avtur, dan bahan bakar rumah tangga. - Normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan jumlah armada, rute, dan frekuensi penerbangan. - Konsumsi masyarakat tertahan seiring dengan kenaikan suku bunga.

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada tahun 2025 diperkirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1% (yoy). Inflasi pada tahun 2025 diperkirakan terutama bersumber dari beberapa kelompok komoditas, antara lain (1) kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2) transportasi, dan (3) penyediaan makanan dan minuman. Tekanan inflasi diperkirakan akan tetap stabil sejalan dengan normalisasi pasokan, harga komoditas global, dan rantai pasok dunia. Selain itu, peran aktif TPID dan Satgas Pangan dalam menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi juga diperkirakan mampu meredam laju inflasi. Risiko inflasi yang perlu diperhatikan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk.
- Peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang berdampak langsung terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas.
- Dampak lanjutan peningkatan tarif parkir, tarif rumah sakit dan tarif listrik terhadap kenaikan harga komoditas lainnya.
- Potensi meningkatnya *imported inflation* seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut.

7.3 REKOMENDASI

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholders* lainnya akan terus diperkuat. Sehubungan hal tersebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, antara lain:

- Memperkuat realisasi belanja pemerintah, baik APBD maupun APBN, yang dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian.
- Mendorong hilirisasi bahan baku dan sumber daya alam yang ada di Kepri untuk memperkuat *local value chain* (LVC).
- Mendorong normalisasi frekuensi dan perluasan rute penerbangan baru di wilayah Kepri untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sekaligus menjaga stabilitas inflasi dari komoditas angkutan udara.
- Penguatan aspek 3A dan 2P (Akses, Amenitas, Atraksi, Pelaku, dan Promosi) sebagai upaya mendorong pemulihan sektor pariwisata, antara lain dengan penambahan *event*, peningkatan promosi MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) serta *quality tourism*.

Tabel 7.4 Risiko Inflasi Kepulauan Riau Tahun 2025

Komponen	Faktor Pendorong / Penahan
<i>Upside Risk</i>	- Potensi kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak ketegangan geopolitik yang masih berlangsung, seperti kenaikan harga beras dan pupuk. - Peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang berdampak langsung terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas. - Dampak lanjutan peningkatan tarif parkir, tarif rumah sakit dan tarif listrik terhadap kenaikan harga komoditas lainnya. - Potensi meningkatnya <i>imported inflation</i> seiring dengan risiko ketidakpastian global yang masih berlanjut.
<i>Downside Risk</i>	- Berlanjutnya normalisasi harga minyak dunia diperkirakan dapat menurunkan tingkat harga komoditas energi. - Normalisasi tarif angkutan udara seiring penambahan dan perluasan frekuensi penerbangan. - Inflasi inti tetap terjaga sejalan dengan terkendalinya ekspektasi inflasi. - Berlanjutnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.

5. Mendukung implementasi kebijakan *short term visa* guna mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke wilayah Kepri.
6. Memperkuat dukungan terhadap implementasi kebijakan *special border treatment* yang telah diinisiasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru dalam hal perdagangan, pariwisata, kesehatan, dan pengurangan pajak turis.
7. Mendorong implementasi pengembangan pariwisata tematik di Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun sehingga daya tarik wisata di Kepri dapat memiliki keunikan masing-masing.
8. Mendorong peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) antara lain dengan pemberian insentif, penguatan regulasi termasuk integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem *One Single Submission-Risk Based Approach* (OSS RBA).
9. Mendorong berlanjutnya pembangunan proyek-proyek konstruksi, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar dapat terlaksana secara *on track* dan sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan.
10. Mendorong promosi investasi dengan menjadikan PSN dan KEK sebagai salah satu daya tarik investasi di Kepri, khususnya dengan lokasi yang strategis serta kepastian iklim investasi dengan berakhirnya tahun politik.
11. Meningkatkan perluasan digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai kanal digital, termasuk upaya peningkatan akseptansi *merchant* dan *user QRIS* sehingga juga dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, termasuk promosi QRIS *cross border*.
12. Memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di bawah koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang sekaligus dapat mendorong optimalisasi realisasi pendapatan maupun belanja pemerintah daerah.
13. Memperkuat program pemberdayaan UMKM antara lain melalui dukungan pembiayaan, *capacity building*, perluasan akses pasar, maupun pendampingan sehingga dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang berorientasi ekspor.

Selanjutnya, beberapa upaya yang juga dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, antara lain:

1. Melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan GNPIP untuk mengendalikan inflasi pangan melalui 7 (tujuh) program unggulan, yakni: (1) penguatan ketahanan pangan komoditas pangan

- strategis; (2) penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri; (3) optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD); (4) dukungan fasilitasi distribusi pangan; (5) dukungan optimalisasi pasar murah, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (6) penguatan digitalisasi dan data pangan; serta (7) penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
2. Di tengah keterbatasan lahan pertanian yang subur, peningkatan produksi pangan di Kepri terus didorong, antara lain penanaman serentak cabai melalui Gerakan Sekolah Menanam (GSM) Cabai di 100 SMA/SMK se-Kepri sebanyak 25.000 bibit, peningkatan budidaya cabai merah melalui koperasi dan kelompok-kelompok tani, maupun pembangunan *greenhouse* untuk menjaga produksi di tengah kendala cuaca. Upaya peningkatan produksi pangan juga dapat dilakukan dengan mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pengembangan budidaya komoditas pangan strategis.
3. Koordinasi dan komunikasi yang efektif juga memegang peranan penting dalam pengendalian inflasi. Sinergi dan kolaborasi antara pihak-pihak yang tergabung dalam TPID perlu terus dilakukan melalui rapat koordinasi, rapat teknis, hingga *High Level Meeting* (HLM) untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pengendalian inflasi. Selain itu, pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat juga perlu terus dilakukan antara lain dengan rutin mendiseminasikan informasi kecukupan pasokan, kewajaran harga, serta mengampanyekan himbauan belanja bijak melalui TV, radio, media sosial, dan *flyer*.
4. Sinergitas antar instansi dalam TPID juga perlu terus diperkuat melalui penyelarasan program yang dapat mendukung GNPIP dan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, sinergitas untuk mengendalikan inflasi tentunya juga diperlukan dalam mengimplementasikan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
5. Mengoptimalkan kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan bahan pangan khususnya yang didatangkan dari luar daerah dengan dukungan asosiasi distributor.
6. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait dengan program stabilisasi dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan strategis.

Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Eksekutif
Indikator Ekonomi Dan Moneter Triwulanan
Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau

INDIKATOR	2022				2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
MAKRO											
Laju Inflasi (yoy)*	3,24	5,89	6,79	5,83	4,77	2,64	2,05	2,76	3,37	3,54	2,53
IHK MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	115,17	122,59	121,07	122,34	122,64	124,07	124,85	128,95	109,16	110,36	107,94
IHK PAKAIAN DAN ALAS KAKI	106,72	107,03	106,50	107,10	109,05	109,92	110,68	111,24	105,34	106,15	106,23
IHK PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	101,49	101,81	102,39	103,04	103,89	104,11	104,52	104,59	102,89	103,00	104,93
IHK PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	108,04	109,30	109,77	109,94	110,89	111,22	110,62	110,70	102,11	101,79	101,79
IHK KESEHATAN	103,27	103,10	103,23	103,41	103,52	103,66	103,69	103,77	103,72	103,82	103,91
IHK TRANSPORTASI	101,79	106,04	117,08	119,05	114,25	116,10	116,87	120,09	110,79	111,56	111,86
IHK INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,05	99,15	99,03	99,03	99,18	99,17	99,25	99,30	100,06	100,03	100,03
IHK REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	105,33	107,17	107,46	107,52	107,73	107,82	108,27	108,31	101,25	101,28	101,45
IHK PENDIDIKAN	114,18	114,18	117,34	117,34	117,40	117,40	120,63	120,63	104,19	104,19	102,15
IHK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	108,03	109,77	110,07	110,18	110,22	110,25	110,76	110,91	101,68	102,70	102,87
IHK PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	116,65	117,73	117,85	120,28	122,36	122,72	123,31	125,72	108,30	111,06	112,53
Pertumbuhan PDRB (yoy)**	2,83	5,01	6,03	6,40	6,51	5,04	4,88	4,45	5,20	4,90	5,02
Ekspor Non Migas (Juta USD**)	9,90	12,88	13,34	3,45	3,15	(6,14)	(1,96)	(3,20)	(3,06)	3,88	4,15
Impor Non Migas(Juta USD**)	9,61	12,47	14,33	4,41	3,17	(7,57)	(2,10)	(1,78)	(4,11)	3,00	3,78
PERBANKAN											
Giro (Rp miliar)	20.975	22.088	23.498	25.467	25.220	24.908	27.355	29.153	30.605	32.530	33.876
Tabungan (Rp miliar)	29.538	30.479	30.451	31.850	32.820	32.626	32.832	34.340	35.705	37.881	38.225
Deposito (Rp miliar)	14.022	15.037	12.097	15.554	13.803	14.571	17.086	16.305	15.888	16.433	17.040
Total DPK (Rp miliar)	64.535	67.613	66.046	72.871	71.843	72.106	77.273	79.799	82.197	83.798	89.141
Total Asset (Rp miliar)	75.924	77.367	78.314	83.142	83.291	85.971	90.402	92.850	100.684	100.447	103.478
Total Kredit (Rp miliar)	59.354	61.920	63.127	64.861	65.810	67.327	70.132	71.507	71.717	73.688	74.336
Suku Bunga Kredit tertimbang kredit	8,48%	8,50%	8,62	8,82	8,92	8,90%	8,83%	8,83%	8,83%	8,80%	8,74%
Suku Bunga Dep 3 bln tertimbang kredit	2,76%	2,43%	2,62%	3,22%	3,55%	3,67%	3,91%	4,30%	4,13%	4,19%	4,28%
LDR (%)	98,24%	94,22%	95,58%	88,73%	93,50%	93,37%	90,76%	89,61%	87,25%	87,94%	83,39%
NPL (%)	3,27%	2,87%	3,08%	2,18%	2,18%	2,42%	3,66%	3,78%	3,73%	3,28%	3,29%
SISTEM PEMBAYARAN											
Inflow (miliar Rp)	1.540	1.297	1.088	680	1.686	1.561	1.080	1.200	1.239	1.309	944
Outflow (miliar Rp)	1.114	2.401	1.668	3.133	1.671	3.117	2.198	2.962	1.780	3.195	2.726
Volume Kliring (lembar)	69.279	70.929	68.779,0	48.087,0	50.215	66.535	67.249	82.833	61.532	69.283	69.262
Nominal Kliring (miliar Rp)	3.540.018	3.547.218	3.600.741	2.410.536	3.278.058	3.225.906	3.614.866	4.167.192	3.366.996	3.374.095	3.731.188

Sumber: BPS dan BI
Ket: *) Mulai Januari 2020 menggunakan Tahun Dasar 2018 = 100 dan mulai Januari 2024 menggunakan Tahun Dasar 2022 = 100
**) Data Sangat Sementara

Tabel 2 Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)
Provinsi Kepulauan Riau
Mulai Januari 2020 menggunakan Tahun Dasar 2018 dan mulai Januari 2024 menggunakan Tahun Dasar 2022

No	KELOMPOK	Sep 2023		Des 2023		Mar 2024		Jun 2024		Sep 2024	
		Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm	Indeks	%mtm
UMUM		114,66	0,16	116,42	0,44	105,94	0,46	106,69	0,28	106,32	0,14
I.	MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	124,85	(0,07)	107,66	0,82	109,16	0,32	110,36	0,56	107,94	0,10
a.	MAKANAN	120,80	(0,23)	106,69	0,97	108,32	0,31	109,50	0,54	106,33	(0,05)
b.	MINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL	111,76	0,14	106,26	0,05	106,73	0,00	107,58	0,49	108,11	0,75
c.	MINUMAN BERALKOHOL	101,31	0,00	102,71	0,91	101,81	0,00	102,32	0,00	103,06	0,02
d.	ROKOK DAN TEMBAKAU	163,63	0,63	117,91	0,46	119,00	0,01	120,64	0,68	122,93	0,86
II.	PAKAIAN DAN ALAS KAKI	110,68	0,19	104,12	0,32	105,34	0,05	106,15	(0,08)	106,23	0,00
a.	PAKAIAN	111,74	0,25	104,36	0,21	104,57	0,01	106,01	0,04	106,07	0,01
B.	ALAS KAKI	106,59	(0,04)	103,23	0,76	108,29	0,04	106,71	(0,54)	106,87	0,00
III.	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	104,52	0,11	102,51	0,07	102,89	0,01	103,00	0,01	104,93	0,18
a.	SEWA RUMAH	106,62	0,28	105,14	0,00	105,26	0,00	105,51	0,00	106,28	0,36
b.	PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, DAN KEAMANAN TEMPAT TINGGAL/PERUMAHAN	105,48	0,00	101,40	0,01	102,13	0,01	102,30	0,12	102,57	0,03
C.	PENYEDIAAN AIR DAN LAYANAN PERUMAHAN LAINNYA	100,06	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
d.	LISTRIK, DAN BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	103,22	0,00	100,96	0,21	101,57	-	101,57	0,00	105,55	0,09
IV.	PERLENGKAPAN, PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN RUMAH TANGGA	110,62	(0,07)	101,82	0,05	102,11	(0,01)	101,79	0,00	101,79	0,08
a.	FURNITUR, PERLENGKAPAN DAN KARPET	103,95	0,00	101,92	0,00	102,01	0,00	102,10	0,00	102,16	0,05
b.	TEKSTIL RUMAH TANGGA	103,43	0,00	103,17	0,51	103,17	0,00	103,17	0,00	102,92	0,00
c.	PERALATAN RUMAH TANGGA	106,94	(0,10)	100,57	0,44	100,69	0,00	100,88	0,56	101,03	0,01
d.	BARANG PECAH BELAH DAN PERALATAN MAKAN MINUM	97,32	0,00	98,72	0,00	99,25	0,00	100,49	0,00	100,49	0,00
e.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERUMAHAN DAN KEBUN	106,26	0,00	102,23	0,00	103,10	0,00	103,04	(0,09)	104,25	0,14
f.	BARANG DAN LAYANAN UNTUK PEMELIHARAAN RUMAH TANGGA RUTIN	117,73	(0,11)	102,41	(0,09)	102,76	(0,01)	101,95	(0,18)	101,82	0,11
V.	KESEHATAN	103,69	0,04	99,88	0,04	103,72	0,01	103,82	0,03	103,91	(0,01)
a.	OBAT-OBATAN DAN PRODUK KESEHATAN	105,48	0,09	99,68	0,08	101,97	0,01	102,06	0,05	102,23	(0,02)
b.	JASA RAWAT JALAN	100,49	0,00	100,15	0,00	101,61	0,00	101,83	0,00	101,83	0,00
c.	JASA RAWAT INAP	100,00	0,00	100,00	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00	112,76	0,00
d.	JASA KESEHATAN LAINNYA	126,61	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00	100,17	0,00
VI.	TRANSPORTASI	116,87	0,09	110,51	0,87	110,79	0,02	111,56	0,71	111,86	0,11
a.	PEMBELIAN KENDARAAN	108,98	0,00	101,95	0,00	102,75	0,01	102,94	0,14	104,60	0,02
b.	PENGOPERASIAN PERALATAN TRANSPORTASI PRIBADI	116,45	0,76	110,95	(0,03)	113,65	0,01	113,71	0,01	113,73	(0,25)
c.	JASA ANGKUTAN PENUMPANG	124,87	(1,30)	117,25	3,45	111,25	(0,00)	114,25	2,94	113,55	0,61
d.	JASA PENGIRIMAN BARANG	132,81	0,00	106,50	0,00	107,43	0,00	107,43	0,00	116,04	8,01
VII.	INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN JASA KEUANGAN	99,25	0,14	100,07	0,06	100,06	(0,00)	100,03	0,00	100,03	0,00
a.	PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	97,02	(0,04)	100,04	0,00	99,96	(0,00)	99,85	0,00	99,85	0,00
b.	LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	100,29	0,21	100,09	0,08	100,09	0,00	100,09	0,00	100,09	0,00
c.	JASA KEUANGAN	95,75	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
VIII	REKREASI, OLAHRAGA, DAN BUDAYA	108,27	0,00	101,69	0,04	101,25	(0,01)	101,28	(0,01)	101,45	(0,06)
a.	BARANG REKREASI LAINNYA DAN OLAHRAGA	102,72	0,00	100,07	0,00	100,10	0,00	100,22	0,07	100,33	0,01
b.	LAYANAN REKREASI DAN OLAHRAGA	100,19	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	0,00
c.	LAYANAN KEBUDAYAAN	121,55	0,00	109,62	0,00	109,62	0,00	111,43	0,00	111,43	0,00
d.	KORAN, BUKU, DAN PERLENGKAPAN SEKOLAH	112,59	0,00	103,07	0,07	101,96	(0,01)	101,75	(0,09)	102,07	(0,16)
IX	PENDIDIKAN	120,63	1,54	104,15	0,00	104,19	0,00	104,19	0,00	102,15	0,85
a.	PENDIDIKAN DASAR DAN ANAK USIA DINI	120,89	0,00	103,12	0,00	103,27	0,00	103,27	0,00	104,43	0,00
b.	PENDIDIKAN MENENGAH	114,75	0,00	101,59	0,00	101,59	0,00	101,59	0,00	89,53	0,00
c.	PENDIDIKAN TINGGI	130,07	5,47	108,44	0,00	108,44	0,00	108,44	0,00	111,10	2,45
d.	PENDIDIKAN LAINNYA	111,88	0,00	101,49	0,00	101,57	0,00	101,57	0,00	102,40	0,00
X	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN/RESTORAN	110,76	0,32	101,58	0,01	101,68	0,00	102,70	0,11	102,87	0,02
a.	JASA PELAYANAN MAKANAN DAN MINUMAN	110,76	0,32	101,58	0,01	101,68	0,00	102,70	0,11	102,87	0,02
XI	PERAWATAN PRIBADI DAN JASA LAINNYA	123,31	0,32	106,83	0,64	108,30	0,06	111,06	0,13	112,53	0,07
a.	PERAWATAN PRIBADI	118,49	0,13	105,31	0,10	105,42	(0,00)	105,58	0,17	105,61	0,12
b.	PERAWATAN PRIBADI LAINNYA	134,42	0,66	110,89	1,60	115,53	0,06	124,65	0,06	129,45	(0,02)
c.	PERLINDUNGAN SOSIAL	107,25	0,00	105,91	0,00	107,40	0,00	107,40	0,00	108,88	0,00
d.	JASA LAINNYA	108,19	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 3 Perkembangan Inflasi Kota Batam, Tanjungpinang dan Nasional (% , mtm)

KOTA	2022				2023				2024		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1. Batam	0,73%	0,84%	1,08%	1,14%	-0,32%	0,52%	0,12%	0,48%	0,45%	0,29%	0,18%
2. Tanjungpinang	0,36%	0,80%	0,92%	0,85%	-0,04%	0,29%	0,42%	0,17%	0,04%	0,16%	-0,05%
3. Karimun									0,53%	0,30%	0,02%
4. Kepulauan Riau	0,68%	0,84%	1,06%	1,11%	0,44%	0,49%	0,16%	0,44%	0,46%	0,28%	0,14%
5. Nasional	0,66%	0,49%	1,17%	0,66%	4,97%	0,14%	0,19%	0,41%	0,52%	-0,08%	-0,12%

Sumber: BPS (data diolah)

Tabel 4 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)
Provinsi Kepulauan Riau

KETERANGAN	2023							2024								
	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
ASET	85.971	87.846	88.576	90.402	92.995	93.835	92.850	92.330	94.529	100.684	97.499	97.690	100.447	101.001	101.656	103.478
DANA PIHAK KETIGA	72.106	72.970	74.955	76.915	76.915	81.085	79.799	79.946	81.684	82.197	82.197	84.010	83.798	86.701	87.575	89.141
a. Giro	24.908	25.490	27.105	27.926	27.926	29.286	29.153	28.958	30.767	30.605	30.605	31.543	30.484	32.555	32.770	33.876
b. Tabungan	32.626	32.906	33.103	33.304	33.304	33.889	34.340	35.173	34.984	35.705	35.705	36.399	36.858	37.951	37.773	38.225
c. Deposito	14.571	14.574	14.747	15.685	15.685	17.910	16.305	15.814	15.933	15.888	15.888	16.068	16.456	16.195	17.032	17.040
KREDIT																
a. Jenis Penggunaan	67.327	68.074	74.655	70.132	71.053	71.226	71.507	71.161	71.429	71.717	72.617	73.079	73.688	73.800	73.588	74.336
Modal Kerja	23.405	23.210	27.181	23.863	24.219	24.251	23.759	23.260	23.431	23.086	23.506	23.625	24.143	20.329	20.169	20.254
Investasi	22.124	22.870	24.123	23.794	24.158	24.003	24.544	24.562	24.510	24.826	25.083	25.198	24.980	28.566	28.198	28.563
Konsumsi	21.798	21.994	23.352	22.474	22.676	22.972	23.203	23.339	23.488	23.806	24.028	24.257	24.566	24.905	25.220	25.519
b. Jenis Kredit	67.327	68.074	74.655	70.132	71.053	71.226	71.507	71.161	71.429	71.717	72.617	73.079	73.688	73.800	73.588	74.336
UMKM	12.031	11.895	13.318	12.449	12.604	12.714	12.646	12.588	12.778	13.224	13.070	13.387	13.711	13.848	13.902	14.302
Non UMKM	55.296	56.179	61.337	57.683	58.449	58.513	58.861	58.573	58.651	58.493	59.547	59.692	59.977	59.952	59.685	60.034
c. Kolektibilitas	67.327	68.074	68.657	70.132	71.053	71.226	71.507	71.161	71.429	71.717	72.617	73.079	73.688	73.800	73.588	74.336
Lancar	61.376	62.354	63.079	65.188	65.685	65.642	66.528	62.018	62.281	63.049	63.791	64.453	65.380	65.624	66.169	67.510
D.P.Khusus	4.324	3.113	2.957	2.378	2.720	2.980	2.277	6.418	6.423	5.994	6.117	5.953	5.892	5.718	4.977	4.377
Kurang Lancar	357	1.284	1.285	214	192	213	353	398	353	160	153	142	118	163	217	201
Diragukan	563	572	532	1.496	1.592	552	519	197	261	450	125	160	194	150	144	216
Macet	706	751	804	856	864	1.840	1.829	2.130	2.111	2.065	2.432	2.372	2.104	2.144	2.079	2.033
RATIO																
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	93,37%	93,29%	91,60%	91,18%	92,38%	87,84%	89,61%	89,01%	87,45%	87,25%	88,35%	86,99%	87,94%	85,12%	84,03%	83,39%
b. Non Performing Loans (NPL)	2,42%	3,83%	3,82%	3,66%	3,73%	3,66%	3,78%	3,83%	3,81%	3,73%	3,73%	3,66%	3,28%	3,33%	3,32%	3,29%

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 5 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.)
Wilayah Kepulauan Riau **)

KETERANGAN	2023							2024								
	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
ASET	18.728	19.682	19.609	19.834	20.215	20.012	20.087	19.676	21.195	21.316	22.069	20.758	21.516	21.799	21.535	22.593
DANA PIHAK KETIGA	14.145	14.045	14.625	16.156	13.323	17.395	19.866	16.216	17.108	17.178	17.755	16.742	17.596	18.365	18.422	19.532
a. Giro	5.113	5.026	6.227	6.855	5.859	6.783	7.034	6.418	7.715	7.591	8.126	6.851	7.609	8.354	8.169	9.207
b. Tabungan	6.945	7.043	7.413	7.042	6.574	6.793	9.279	7.886	7.291	7.443	7.491	7.817	7.877	7.931	7.842	7.904
c. Deposito	2.087	1.976	985	2.259	890	3.820	3.554	1.912	2.102	2.144	2.138	2.074	2.110	2.080	2.412	2.420
KREDIT																
a. Jenis Penggunaan	15.845	15.654	16.918	16.225	16.465	16.486	17.316	17.253	17.381	17.485	17.511	17.556	17.584	17.865	18.277	18.731
Modal Kerja	3.879	3.745	4.081	3.819	3.945	3.922	3.898	3.757	3.789	3.823	3.805	3.787	3.764	3.793	3.864	3.922
Investasi	4.324	4.224	4.799	4.590	4.665	4.626	5.440	5.460	5.499	5.483	5.499	5.502	5.473	5.627	5.926	6.233
Konsumsi	7.643	7.685	8.039	7.817	7.855	7.938	7.978	8.036	8.093	8.179	8.206	8.266	8.348	8.445	8.487	8.576
b. Jenis Kredit	15.845	15.654	16.918	16.225	16.465	16.486	17.316	17.253	17.381	17.485	17.511	17.556	17.584	17.865	18.277	18.731
UMKM	3.884	3.916	4.305	4.124	4.183	4.201	4.191	4.074	4.142	4.188	4.146	4.216	4.229	4.252	4.251	4.447
Non UMKM	11.962	11.738	12.614	12.101	12.282	12.285	13.125	13.179	13.239	13.297	13.365	13.340	13.355	13.614	14.026	14.284
c. Kolektibilitas	15.845	15.654	15.889	16.225	16.465	16.486	17.316	17.253	17.381	17.485	17.511	17.556	17.584	17.865	18.277	18.731
Lancar	14.354	14.293	14.583	14.921	15.075	15.184	16.125	15.891	16.014	16.189	16.179	16.242	16.282	16.573	16.960	17.410
D.P.Khusus	666	567	513	559	608	558	538	718	716	612	655	645	615	604	586	600
Kurang Lancar	194	162	156	112	110	110	31	75	57	83	81	64	40	41	77	29
Diragukan	457	451	407	374	405	402	399	36	69	73	47	79	99	66	53	92
Macet	174	180	229	259	267	231	223	533	526	528	549	526	548	582	599	600
RATIO																
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	112,02%	111,46%	115,68%	100,43%	123,58%	94,77%	87,16%	106,39%	101,60%	101,79%	98,62%	104,86%	99,93%	97,28%	99,21%	95,90%
b. Non Performing Loans (NPL)	5,20%	5,07%	4,99%	4,59%	4,75%	4,51%	3,78%	3,73%	3,75%	3,91%	3,86%	3,81%	3,91%	3,86%	4,00%	3,85%

Sumber: Bank Indonesia
**) meliputi Tanjungpinang, Tanjung Balai Karimun, Natuna

Tabel 6 Data Perbankan (Bank Umum) (Dlm. Juta Rp.) Kota Batam

KETERANGAN	2023							2024								
	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
ASET	67.243	68.164	68.967	70.569	72.780	73.822	72.763	72.655	73.334	79.369	75.430	76.932	78.931	79.201	80.121	80.885
DANA PIHAK KETIGA	57.961	58.925	60.330	60.759	63.592	63.690	59.932	63.730	64.576	65.019	66.255	67.580	69.248	68.335	69.153	69.610
a. Giro	19.796	20.464	20.878	21.071	22.067	22.503	22.120	22.540	23.051	23.013	23.417	23.830	24.922	24.201	24.601	24.669
b. Tabungan	25.681	25.863	25.689	26.263	26.730	27.096	25.062	27.287	27.693	28.262	28.908	29.401	30.003	30.019	29.931	30.321
c. Deposito	12.484	12.598	13.762	13.425	14.795	14.091	12.751	13.902	13.831	13.743	13.930	14.349	14.323	14.115	14.620	14.620
KREDIT																
a. Jenis Penggunaan	51.482	52.420	57.737	53.907	54.588	54.741	54.190	53.908	54.047	54.232	55.107	55.523	56.104	55.935	55.311	55.605
Modal Kerja	19.526	19.465	23.100	20.045	20.274	20.330	19.861	19.503	19.642	19.263	19.701	19.837	20.379	16.535	16.306	16.332
Investasi	17.800	18.646	19.324	19.204	19.493	19.377	19.104	19.102	19.011	19.342	19.584	19.696	19.507	22.939	22.272	22.330
Konsumsi	14.155	14.309	15.313	14.658	14.821	15.034	15.226	15.303	15.394	15.627	15.822	15.990	16.218	16.460	16.733	16.943
b. Jenis Kredit	51.482	52.420	57.737	53.907	54.588	54.741	54.190	53.908	54.047	54.232	55.107	55.523	56.104	55.935	55.311	55.605
UMKM	8.147	7.979	9.013	8.324	8.422	8.512,51	8.454,99	8.514,78	8.635,15	9.036,27	8.924,84	9.171,08	9.482,20	9.596,31	9.651,41	9.855,78
Non UMKM	43.334	44.440	48.724	45.582	46.166	46.228,10	45.735,39	45.393,18	45.412,21	45.195,91	46.181,87	46.352,17	46.622,12	46.338,46	45.659,31	45.749,49
c. Kolektibilitas	51.482	52.420	52.769	53.907	54.588	54.741	54.190	53.908	54.047	54.232	55.107	55.523	56.104	55.935	55.311	55.605
Lancar	47.022	48.061	48.496	50.267	50.610	50.458	50.403	46.127	46.268	46.860	47.612	48.211	49.098	49.051	49.209	50.100
D.P.Khusus	3.658	2.546	2.444	1.819	2.113	2.422	1.739	5.700	5.707	5.381	5.461	5.307	5.277	5.115	4.391	3.777
Kurang Lancar	163	1.121	1.129	102	82	103	321	322	296	77	72	78	78	122	140	172
Diragukan	106	120	125	1.122	1.186	150	120	161	192	377	78	81	94	85	91	124
Macet	532	571	575	597	597	1.608	1.606	1.598	1.584	1.538	1.884	1.846	1.557	1.562	1.480	1.432
RATIO																
a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	88,82%	88,96%	87,47%	88,72%	85,84%	85,95%	90,42%	84,59%	83,70%	83,41%	83,17%	82,16%	81,02%	81,85%	79,98%	79,88%
b. Non Performing Loans (NPL)	1,56%	3,46%	3,47%	3,38%	3,42%	3,40%	3,78%	3,86%	3,83%	3,67%	3,69%	3,61%	3,08%	3,16%	3,09%	3,11%

Sumber: Bank Indonesia
Ket : Satuan Dalam Miliar Rupiah

Tabel 7 Perputaran Kliring Batam, Tanjungpinang dan Tanjung Balai Karimun

JENIS	2023								2024					
	I		II		III		IV		I		II		III	
	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari	Total	Rata-rata Perhari
A. WARKAT KLIRING														
1. WARKAT (Lbr)	50.215	773	66.535	1.024	67.249	1.035	82.833	1.274	61.532	992	69.283	1.117	69.262	1.117
2. NOMINAL (Jt.Rp)	3.278.058	52.872	3.225.906	52.031	3.614.866	58.304	4.167.192	67.213	3.366.996	54.306	3.374.095	54.421	3.731.188	60.180

Sumber: Bank Indonesia

Daftar Istilah

Istilah	Arti
Akselerasi	Pertumbuhan yang lebih tinggi pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
Andil Inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana masyarakat (berupa tabungan, deposito, giro, dll) yang disimpan di suatu bank.
Derajat Desentralisasi Fiskal	Kemampuan daerah untuk memenuhi pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ekspor	Seluruh barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Faktor Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi pengeluaran lapangan usaha atau output gap, eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat.
Faktor Non Fundamental	Faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (volatile food), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered prices</i>).
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial.
Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi (IKE)	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli.
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (persistent).
Inflasi IHK	Kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Inflow	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Kliring	Pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kontraksi	Pertumbuhan yang negatif.
Kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kualitas kredit	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur (bank) dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang atau pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Istilah	Arti
Liaison	Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.
Loan to Deposit Ratio (LDR)	Rasio yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang disalurkan dengan dana pihak ke tiga yang dihimpun pada suatu waktu tertentu.
Melambat	Pertumbuhan yang lebih rendah pada periode laporan dibandingkan dengan periode tertentu.
mtm (month to month)	Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Net-outflow	Selisih bersih antara jumlah <i>inflow</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>net-outflow</i> bila terjadi <i>outflow</i> lebih besar dibandingkan <i>inflow</i> , dan <i>net-inflow</i> bila terjadi sebaliknya
Non Performing Loan (NPL)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
Outflow	Jumlah aliran kas keluar dari Kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/dikelola secara komersil yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja, dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu. 1. PDRB atas dasar harga berlaku Penjumlahan nilai tambah bruto yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian 2. PDRB atas dasar harga konstan Perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya.
qtq (quarter to quarter)	Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Real Time Gross Settlement (RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebit maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerima pembayaran.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
Saldo Bersih Tertimbang (SBT)	Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/ subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	Survei triwulanan yang bertujuan untuk mendapatkan indikator pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha secara triwulanan.
Survei Konsumen (SK)	Survei bulanan yang bertujuan untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada 6 bulan mendatang.
Uang Giral	Uang terdiri atas rekening giro, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh waktu, yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam Rupiah dan sistem moneter.
Uang Kartal	Uang yang terdiri atas uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada KPN dan bank umum.
yoy (year on year)	Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.



**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Tim Perumusan KEKDA Provinsi

Jl. Engku Putri No.1, Tlk. Kering Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau

